

PROSIDING

GELAR BUDAYA SPIRITUAL DAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT

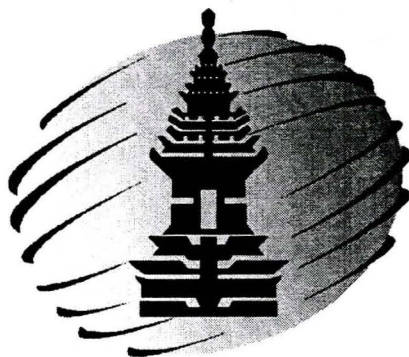


ktorat
yaan

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
TAHUN 2006

306.4
PRO

LAPORAN
GELAR BUDAYA SPIRITUAL DAN
KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT



DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA
TAHUN 2006

KATA PENGANTAR

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, pada tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 2006, bertempat di Taman Budaya Bali, telah menyelenggarakan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat yang diikuti peserta yang terdiri dari unsur : Tokoh Adat, Tokoh Kepercayaan, Tokoh Agama, Budayawan/Ilmuwan, Lembaga Adat, Organisasi Kepercayaan, dan Instansi Terkait.

Kegiatan-kegiatan yang disajikan dalam Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat meliputi : Pameran, Pemaparan Budaya Spiritual, Dialog Temu dan Peragaan Upacara Adat dengan tujuan memperkenalkan keragaman budaya spiritual dari organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Kepercayaan Komunitas Adat.

Dalam Usaha penyebarluasan informasi kepada masyarakat, maka Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyusun dan menerbitkan dalam bentuk Prosiding Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat.

Melalui penerbitan dan penyebaran ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kepercayaan Komunitas Adat dengan segala keragamannya.

Jakarta, Desember 2006
Pejabat Pembuat Komitmen

Dra. Istiasih

SAMBUTAN DIREKTUR

Penerbit dan penyebaran “Prosiding” ini merupakan usaha penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kami menghargai dan menyambut baik usaha penerbitan dan penyebaran ini.

Semoga penerbitan dan penyebaran Prosiding tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kepercayaan Komunitas Adat dan diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat di tahun-tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan, penerbitan Prosiding ini kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2006

Direktur Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa



Drs. Sulistyo Tirtokusumo, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	v
I. PENYELENGGARAAN GELAR BUDAYA SPIRITUAL DAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT	1
II. SAMBUTAN SAMBUTAN	
- Sambutan Gubernur Bali	31
- Sambutan Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film	36
III. MAKALAH-MAKALAH	
- Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Spiritual Untuk Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa (Prof. DR. H. Damardjati Supadjar).....	43
- Membangun Budi Pekerti Luhur Menuju Indonesia Adil Makmur (KPH. Darudriyo Sumodiningrat)	54
- Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Kepercayaan Komunitas Adat Untuk Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa	73
- Tri Tangtu Di Bumi Tata Wilayah, Tata Wayah, Tata Lampah	84
- Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-nilai Adat Bikomi Untuk Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa.	87

- Nilai - Nilai Asas Jatidiri Melayu Sebagai Perekat kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara (Oleh: Tenas Effendy)	99
- Keragaman Budaya Spiritual Sebagai Pemersatu Bangsa (Bismar Siregar)	127
- Keragaman Budaya Spiritual Sebagai Pemersatu Bangsa (Chandra Setiawan)	153
- Amandemen UUD '45 tentang Kebudayaan dan Masyarakat Adat (Prof. H. KMA M. Usop, M.A.)	164
- Keragaman Kepercayaan Komunitas Adat Sebagai Pemersatu Bangsa (Prof. H. KMA M. Usop, M.A.) ...	171
- Upacara Adat Karaton Surakarta Sebagai Perwujudan Kepercayaan Komunitas Adat (Oleh GRAY Koes Raspiyah, S.S.	184
- Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Spiritual untuk Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa (Oleh Suko Sudarso)	193
- Keragaman Budaya Spiritual Sebagai Pemersatu Bangsa (Etiko Kusjarmiko, SH)	205
- Keragaman Kepercayaan Komunitas Adat Sebagai Pemersatu Bangsa (I Gusti Agung Arwana)	216
- Keragaman Kepercayaan Komunitas Adat Sebagai Pemersatu Bangsa " <i>Nganten Ngerorod</i> " (Putu Windia, SH. Msi)	256
- Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Spiritual untuk Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa (Oleh Dr. Budya Pradipta)	275
- Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Spiritual untuk Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa (Oleh Ade Makmur K)	288

I
PENYELENGGARAAN
GELAR BUDAYA SPIRITUAL
DAN
KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar

Bangsa Indonesia yang mendiami wilayah kepulauan Nusantara ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, kepercayaan, dan adat istiadat. Keragaman tersebut makin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dengan keragaman latar belakang tersebut, bangsa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah bangsa lain dimuka bumi ini. Tampilan Indonesia secara utuh dimata dunia dengan kekayaan budaya yang dimilikinya didukung oleh kesadaran semboyan “BHINEKA TUNGGAL IKA” yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kepercayaan Komunitas adat merupakan warisan luhur budaya bangsa yang sudah lama ada, diyakini, dan dihayati oleh sebagian rakyat Indonesia secara turun temurun. Didalam kedua kepercayaan tersebut terkandung nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan pedoman dalam usaha pengembangan jati diri dan integritas bangsa.

Eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai warisan budaya luhur bangsa memang riil karena ada masyarakat yang mendukungnya, dan dijamin oleh UUD 45, pasal 28 E ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap/sesuai dengan hati nuraninya”, dan pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu”, serta pasal 32 ayat 1 yang berbunyi : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan inilai-nilai budayanya “.

Menurut data tahun 2005, masyarakat penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terwadahi dalam 247 organisasi ditingkat pusat dan 980 organisasi ditingkat cabang. Organisasi-organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebar di 25 propinsi dengan jumlah anggota sekitar 9 juta orang. Dalam kehidupan keorganisasiannya masing-masing organisasi mempunyai kepengurusan yang bekerja untuk kemajuan organisasinya. Masing-masing organisasi juga mempunyai tuntunan atau pedoman dan kegiatan yang dilaksanakan dibidang mental, spiritual, dan sosial.

Kepercayaan komunitas adat juga diyakini dan dihormati

oleh masyarakat pendukungnya, terutama dalam menghadapi gejala kehidupan yang menderanya. Dengan kepercayaan tersebut, para pendukungnya berusaha untuk menjaga keselarasan kehidupan, utamanya dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan sesama manusia. Dengan kata lain, kepercayaan tersebut mengandung nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Oleh karena itu, kepercayaan tersebut patut untuk dilestarikan, dikembangkan, dan diamalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan dampaknya dapat bergaung pada masyarakat dunia untuk mempertinggi citra Indonesia.

Sebagai unsur budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur seyogyanya budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat tersebut diperkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kegiatan itu dapat menjadi acuan kerja dalam upaya menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan yang disebabkan oleh keberagaman budaya pada umumnya. Dalam rangka itulah, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kapasitasnya sebagai fasilitator dalam pelestarian budaya spiritual bermaksud menyelenggarakan kegiatan “GELAR BUDAYA SPIRITUAL DAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT”. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya pemahaman, motivasi, dan partisipasi masyarakat

Indonesia dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.

B. Tema dan Sub Tema

Kegiatan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat pada tahun 2006 mengambil Tema sebagai berikut :

“Pemberdayaan budaya spiritual dan kepercayaan Komunitas Adat dalam memperkuat jati diri dan integritas bangsa “.

dengan Sub Tema :

- 1. Keragaman Budaya Spritual dan kepercayaan Komunitas Adat sebagai pemersatu bangsa;**
- 2. Aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat untuk pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa.**

C. Dasar

Dasar diadakannya Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat adalah :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 No.0224.0/40-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film;

2. Program kegiatan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun anggaran 2006.

D Tujuan.

Tujuan diadakannya Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas adat, adalah untuk :

1. Memperkenalkan berbagai jenis dan bentuk budaya spiritual dari organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepercayaan Komunitas adat yang merupakan bagian dari budaya Indonesia;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penghayatan masyarakat akan eksistensi dan identitas budaya spiritual sebagai salah satu unsur pengemban budi luhur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia;
3. Mengembangkan kreatifitas para penghayat dan komunitas adat sehingga dapat memposisikan diri dan berperan aktif dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan bangsa;
4. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kepercayaan masyarakat.

II. M A T E R I

Gelar budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

A. Pameran.

Dalam pameran ditampilkan ; Photo kegiatan organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kepercayaan Komunitas Adat, Buku-buku, Leaflet, Benda Pusaka dan Kerajinan, dan Tanaman Obat.

1. Photo

a. Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terdiri dari :

- 1) Weringin Seto
- 2) Budi Suci
- 3) Darma Murti
- 4) Parmalim
- 5) Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran
- 6) Sumarah Purbo
- 7) Tri Jaya (1 Suro di Tegal)
- 8) 1 Suro

- 9) Pola Kegiatan
- 10) Gelar Budaya I (2005)
- 11) Trisoka
- 12) Grafik keberadaan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 13) Pandawa

b. Kepercayaan Komunitas Adat, terdiri dari :

- 1) Upacara Asyeik
- 2) “ Muang Jong
- 3) “ Tabot
- 4) “ Melabuh
- 5) “ Seren Taun
- 6) “ Larung Sesaji
- 7) “ Wisudhan Waranggono
- 8) “ Kuang Kei
- 9) “ Babunga Tahun
- 10) “ Rambu Solo
- 11) “ Penyembuhan penyakit “Balia”
- 12) “ Labuhan Hondhodento
- 13) “ Tama Maus
- 14) “ Bersih Desa Doko
- 15) “ Mang Rara Manua
- 16) “ Mulud Beleq

17) “ Ruwatan

2. Buku

Buku yang akan ditampilkan adalah buku-buku yang berkaitan dengan :

- a. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Adat dan Budaya Nusantara;
- c. Nilai-nilai Luhur Budaya Spiritual Bangsa;
- d. Pengobatan Tradisional.

3. Leaflet

Leaflet yang akan dipamerkan sekaligus dibagikan kepada pengunjung adalah leaflet tentang organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kepercayaan Komunitas Adat, yaitu :

- a. Sumarah Purbo
- b. Tama Maus
- c. Nganggung
- e. Uis Neno
- f. Masade

4. Benda Pusaka dan Kerajinan

Benda-benda pusaka yang akan dipamerkan adalah dari :

- a. Ponco Putro
- b. Wayan Rituk
- c. Uang Kepeng
- d. Kerajinan dari Sapto Darmo

B. Temu Tokoh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kepercayaan Komunitas Adat.

Kegiatan ini sebagai wahana mempertemukan tokoh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tokoh komunitas adat dengan LSM, ilmuwan, budayawan, guru dan pemerintah serta masyarakat. Pada kegiatan ini 5 tokoh kepercayaan dan 5 tokoh komunitas adat akan berbicara tentang “Keragaman Budaya Spiritual sebagai pemersatu Bangsa dan Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Spiritual untuk pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa” dengan 8 nara sumber. Tujuan Temu Tokoh adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepercayaan komunitas adat yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat Indonesia, meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai budaya bangsa sehingga dapat menumbuhkan sikap toleransi antara masyarakat dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

komunitas adat, serta meningkatkan sumber daya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas adat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya spiritual serta mengamalkan nilai-nilai luhur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Pemaparan Budaya Spiritual

Pemaparan Budaya Spiritual pada gelar budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat kali ini akan dipaparkan secara langsung 6 (enam) organisasi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu :

1. Bambu Kuning dari Bali
2. Gereja Adat Musi dari Sulawesi Utara/Gorontalo
3. Pirukunan Purwa Ayu Mardi Utama dari Jawa Timur
4. Persatuan Warga Sapta Darma dari Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Penghayat Kapribaden dari DKI Jakarta
6. Waspada dari Jawa Tengah

Sementara itu kepada seluruh peserta juga akan diberikan 4 (empat) naskah pemaparan budaya spiritual dari organisasi :

1. Sabuk Belo dari Nusa Tenggara Barat

Aji Dipo dari Bandung

3. Parmalim dari Sumatera Utara
4. Paguyuban Pendidikan Ilmu Kerokhanian (P.P.I.K) dari Lampung

D. Dialog Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kepercayaan Komunitas Adat

Dialog Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kepercayaan Komunitas Adat akan membahas materi : “Keragaman Budaya Spiritual sebagai Pemersatu Bangsa dan Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Spiritual untuk Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa. Kedua materi tersebut akan disampaikan oleh 8 pemakalah dan 8 nara sumber dari berbagai unsur antara lain : HAM, Pakar Hukum, Perguruan Tinggi, Penghayat, komunitas adat dan Birokrasi. Adapun tujuan dari dialog adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan apresiasi masyarakat akan eksistensi dan identitas budaya spiritual sebagai salah satu unsur budaya dan pengembangan budi luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mengembangkan kreatifitas para penghayat dan komunitas adat sehingga dapat memposisikan diri dan berperan aktif dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses

pembangunan bangsa.

E. Pengenalan Nilai-nilai

Pengenalan nilai dalam gelar budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat ini akan disajikan atau diperagakan beraneka ragam budaya, yaitu :

1. Peragaan upacara adat :
 - a. Upacara adat perkawinan
 - b. Jamasan (membersihkan keris pusaka)
 - c. Tarian Ritual
 - d. Uang Kepeng (membersihkan uang keping)
2. Pengamalan :
 - a. Pengobatan alternatif dari organisasi :
 - 1) Perseorangan dari Makasar
 - 2) Gayuh Urip Utami dari DKI Jakarta
 - 3) Bambu Kuning dari Bali
 - 4) Lebak Cawene dari Bandung
 - b. Tanaman Obat/jamu/obat alternatif dari organisasi :
 - 1) Darma Murti dari Lampung
 - 2) Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan (KBTPK) dari Malang
 - 3) Obashi dari Bali

- 4) Sapto Darmo dari Yogya
- c. Atraksi
 - 1) Uang Kepeng dari Bali
 - 2) Atraksi dari Bambu Kuning (Bali)
 - 3) Audio Visual : Pemutaran video tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepercayaan komunitas adat.

III. PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat

Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat diadakan pada tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2006 bertempat di Taman Budaya, Jln. Nusa Indah, Denpasar-Bali.

B. Peserta

Peserta gelar budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat terdiri dari unsur :

1. Tokoh Adat
2. Tokoh Agama;
3. Tokoh Kepercayaan;
4. Budayawan;
5. Ilmuwan;
6. Akademisi;
7. Lembaga adat;

8. Organisasi Kepercayaan;
9. Para pejabat Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film;
10. Para pejabat/staf Dit. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
11. Para Pejabat Pemerintah Daerah di lingkungan Kebudayaan;
12. Panitia.

C. Daftar Nama Pemakalah, Nara Sumber, Moderator.

1. Temu Tokoh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - a. Pemakalah
 - 1). Etiko Kusjatmiko, S.H
 - 2). Ir. Andri Hernandi, M.Sp
 - 3). Prof. Dr. Damarjati Supajar
 - 4). KPH. Darudriyo Sumodiningrat
 - 5). Dr. Budya Pradipta
 - b. Nara Sumber
 - 1). Drs. Damami, M.Ag
 - 2). Ki Adi Samidi
 - 3). Drs. K. Permadi, S.H
 - 4). Ibu Kartini Sudono

c. Moderator

Dr. H. Abdurrahman

2. Temu tokoh Kepercayaan Komunitas Adat

a. Pemakalah

1). I Gusti Agung Arnawa

2). Tenas Effendi

3). Prof. Yasmin Shahab

4). Ade Suherlin

5). Drs. Yohanes Sanak

b. Nara Sumber

1). Prof.Dr. Edi Sedyawati

2). Dr.Heddy Shri Ahimsa Putra

3). Dra.FajriaNovari Manan

4). Dr. IGN Anom

c. Moderator

Drs. H. Nunus Supardi

3. Dialog Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

a. Pemakalah

1). Prof. Bismar Siregar, SH

2). Dr. Candra Setiawan

3). Ir. Suko Sudarso

4). Dr. Ida Bagus Agastya

- b. Nara Sumber
 - 1). Dr. Irwan Abdullah
 - 2). Ir. Agung Mulyana, M.Sc
 - 3). Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat M.Sc
 - 4). Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H, MH
 - c. Moderator
 - Drs. Abdul Latif Bustami, Msi
4. Dialog Kepercayaan Komunitas Adat
- a. Pemakalah
 - 1). Prof. H. KMA M.Usop. M.A
 - 2). GRAY Koes Raspiyah, S.S. (GKR Madu Retno)
 - 3). Putu Windia, S.H. Msi
 - 4). Drs. Ade Makmur, M.Phil
 - b. Nara Sumber
 - 1). Dr. Muchlis Paeni
 - 2). Dra. Pinky Saptandari, MA
 - 3). Dr. Ida Bagus Wiana
 - 4). H. Asmui Bakar
 - c. Moderator
 - Drs. Ketut Sumarta

IV. RUMUSAN HASIL

A. Rumusan Dialog Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat

Berdasarkan pengarahannya dari Gubernur Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas kebudayaan Provinsi Bali, Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, para pemakalah, para nara sumber, dan partisipasi peserta, maka dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Krisis kehidupan yang melanda Indonesia dibutuhkan peneguhan jati diri Ke-Indonesia-an, yaitu Pancasila sebagai idiologi bangsa. Pancasila sebagai dasar kebudayaan Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, dasar-dasar pengembangan kebudayaan daerah, komunitas adat dan peradaban bangsa.
2. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya spiritual yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan pembangunan karakter nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya spiritual sangat penting bagi pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa.
4. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepercayaan

komunitas adat merupakan warisan leluhur budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan pedoman dalam usaha pengembangan jati diri dan integrasi bangsa.

5. Budaya spiritual sebagai hasil cipta, rasa, karsa yang bersumber dari dan berorientasi, dan bermuara kepada Tuhan Yang Maha esa. Pendidikan Budi Pekerti adalah kumpulan aturan/acuan tentang budi yang hendak dipekertikan secara terdidik ke dalam kenyataan sehari-hari.
6. Budaya local dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan dan pengawasan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
7. Kearifan lokal sebagai warisan budaya spiritual dan kepercayaan adat dapat menjembatani hubungan antar pemangku kebudayaan dari berbagai komunitas dalam proses interaksi dan integrasi di tingkat daerah, nasional, dan global.
8. Perwujudan nilai-nilai kepercayaan dalam pendidikan budi pekerti dapat menjadi faktor utama peneguhan kesadaran akan jati diri bangsa.
9. Etika dan nilai moral yang tumbuh dari kesadaran dibutuhkan dalam peneguhan nilai-nilai kepercayaan menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

10. Pendidikan Budi Pekerti memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter bangsa dan kerukunan hidup beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Denpasar, 1 Juni 2006

Tim Perumus

Ketua : Drs. Abd. Latif Bustami, M.Si

Anggota : Ir. Ketut Darmika

Drs. I Made Purna, M.Si

Naen Soeryono, SH, MH

B. Rumusan Temu Tokoh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat

Setelah mendengarkan:

1. Sambutan Gubernur Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
2. Sambutan Bapak Dirjen Niali Budaya Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

3. Pemaparan dari para pemakalah dan nara sumber
4. Diskusi yang berkembang pada sesi Temu Tokoh

Maka Tim perumus menyusun perumusan sekaligus rekomendasi sebagai berikut:

I. KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Perlunya pengakuan Negara terhadap keanekaragaman budaya spiritual di setiap sub etnis di Indonesia sebagai perekat persatuan dan kesatuan dalam bentuk produk hokum ataupun kebijakan yang dapat diimplementasikan di lapangan.
2. Keanekaragaman nilai-nilai budaya spiritual di setiap etnis perlu divisualisasikan dan diaktualisasikan kembali sebagai modal dasar bangsa dalam memperkuat kebhinekaan.
3. Kearifan lokal (local wisdom) yang hidup dalam setiap sub etnis perlu ditumbuhkembangkan dan direvitalisasi sesuai dengan arus dinamika perkembangan zaman.
4. mendesak kepada pemerintah agar nilai-nilai luhur yang ada di setiap sub etnis yang berupa budi pekerti dan tata laku segera dilaksanakan sebagai mata pelajaran mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan ke perguruan tinggi sesuai

dengan konteks kedaerahan masing-masing sebagai mata pelajaran wajib (bukan muatan local).

5. mendesak kepada organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk segera membuat/menyiapkan konsep tentang pendidikan budi pekerti sebagai acuan dalam menyusun kurikulum dan strategi pembelajaran di sekolah.
6. Perlu dibentuk pusat kajian, penggalan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam rangka menambah wawasan kebudayaan lintas etnis, yang dapat memberikan ...
7. Perbedaan yang terdapat dalam nilai-nilai luhur di setiap etnis perlu disikapi sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa, dan bukan dipandang sebagai sumber konflik horizontal yang terjadi di masyarakat.

II. KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT

1. Keanekaragaman kepercayaan di setiap komunitas adat yang merupakan bagian dari kehidupannya perlu senantiasa diayomi dan diberikan hak-haknya sebagai bagian dari komunitas bangsa Indonesia, sesuai dengan keunikannya masing-masing, tanpa disadari rasa diskriminasi.

2. Kepercayaan di setiap komunitas adat sebagai wujud hak-hak sipil mereka, perlu mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara dalam bentuk regulasi dan perlakuan yang adil oleh aparat di daerah.
3. Permasalahan yang timbul dalam komunitas adat hendaknya diselesaikan dengan mengacu kepada undang-undang dan peraturan daerah serta norma yang hidup dan berlaku pada komunitas masyarakat adat tersebut.
4. Pengaturan hak-hak ulayat sebagai kekayaan komunitas adat semestinya dikelola oleh masyarakat adat tersebut dan apabila akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan, perlu dilibatkan secara aktif unsur dari masyarakat adat.
5. Pemerintah sebagai unsur eksekutif perlu melibatkan lembaga legislative dan yudikatif dalam menyusun kebijakan guna memberdayakan komunitas masyarakat adat untuk memperkuat kedudukan komunitas masyarakat adat secara hukum.

Demikian hasil rumusan Gelar Budaya Spiritual khususnya bidang Temu Tokoh, dengan harapan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan bidang budaya spiritual

Rekomendasi

1. Gelar budaya spiritual perlu diselenggarakan setiap tahun secara bergiliran di antara provinsi-provinsi di Indonesia
2. Gelar Budaya spiritual diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya pemahaman, motivasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.
3. Pentingnya penguatan kelembagaan adat, kerapatan adat di desa-desa, Majelis Adat Kecamatan, Majelis Adat, Dewan Adat.
4. Pentingnya pelestarian dan pengamalan kepercayaan yang mengandung nilai-nilai religius, nilai moral, dan nilai filosofis.
5. Budaya Spiritual dan kepercayaan komunitas adat tersebut diperkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui pendidikan formal, non formal, dan informal.
6. Pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan public dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Indonesia seutuhnya.
7. Pentingnya disiapkan piranti sosialisasi terdiri atas kurikulum, buku ajar, bahan bacaan pendukung, sumber daya manusia, dan anggaran.
8. pendidikan Budi Pekerti dan pembangunan karakter bangsa dijadikan program nasional.

9. Keberadaan budaya spiritual dengan segala pirantinya harus didesakkan ke DPR dan DPRD serta pemerintah untuk mendapatkan persetujuan.
10. mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk melembagakan secara resmi terbentuknya Lembaga Nasional Pendidikan Budi pekerti dan karakter bangsa.

Ditetapkan di Denpasar Bali

Pada tanggal : 01 Juni 2006

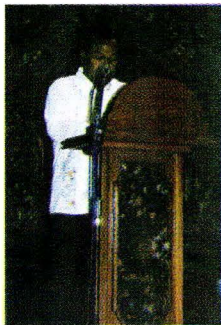
TIM PERUMUS

1. Drs. BAMBANG INDRIANTO, M.Si (Ketua merangkap anggota)
2. dr. IDABAGUS WIRYANATA (Sekretaris merangkap anggota)
3. Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd. (Anggota)
4. YOHANES PALAUNSOEKA (Anggota)

II

SAMBUTAN -SAMBUTAN

**SAMBUTAN GUBERNUR BALI PADA ACARA
GELAR BUDAYA SPIRITUAL DAN KEPERCAYAAN
KOMUNITAS ADAT, TANGGAL 30 MEI 2006 DI TAMAN
BUDAYA, JALAN NUSA INDAH DENPASAR BALI**



Sambutan Gubernur Bali yang disampaikan oleh
Kepala Dinas Kebudayaan Prop. Bali yaitu Bapak Drs. Nika Naya

Yth. :

- Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI
- Ketua DPRD Provinsi Bali
- Ka Kanwil Agama Provinsi Bali
- Para undangan dan peserta yang berbahagia.

Om Swastiastu,

Mengawali sambutan saya ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan pujastuti kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa – Tuhan

Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya kita sekalian dapat berkumpul pada hari ini serta diberikan kekuatan dan keselamatan guna bersama-sama mengikuti acara Gelar Budaya Spirituakl dan Kepercayaan Komunitas Adat dalam suasana yang damai.

Hadirin yang saya hormati

Pertama-tama khususnya kepada peserta dari luar Bali, saya ucapkan selamat datang di pulau Dewata semoga suasana Pulau Dewata memberikan motivasi dan inspirasi sehingga kegiatan Gelar Budaya Spiritual dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama.

Dalam era modernisasi dan arus globalisasi ini umat manusia dihadapkan pada suatu tantangan perubahan yang tidak bisa dielakkan terutama adanya pergeseran paradigma terhadap nilai social dan budaya, sehingga mau tidak mau manusia harus mampu menyelaraskan diri dengan perubahan yang terjadi. Budaya tradisi merupakan kearifan lokal suatu masyarakat yang merupakan essensi dari nilai-nilai spiritual dihadapkan pada suatu budaya global yang ditandai dengan: adanya perpindahan orang, arus teknologi, materialisme, dan pengaruh idiologi.

Namun demikian budaya global juga memiliki dampak positif, yaitu meningkatkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal, dan adanya revitalisasi nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, saya melihat bahwa upaya mensinergikan nilai-nilai tradisi dengan budaya

global perlu dilakukan untuk menguatkan budaya tradisi sehingga tetap dapat aksis mengikuti perkembangan zaman.

Budaya Bali sangat dinamis menghadapi arus modernisasi dan globalisasi, karena budaya Bali memiliki konsep “Desa Kala Patra”, yaitu upaya suatu komunitas adat di Bali untuk menyeleraskan diri dengan keadaan lingkungan dan waktu sehingga dalam menjalani proses kehidupannya akan dapat lebih bermakna.

Hadirin yang saya hormati,

Melihat berbagai tantangan yang dihadapi komunitas adat di bumi nusantara ini, saya melihat bahwa penyelenggaraan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat yang mengambil tema “Pemberdayaan Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat dalam memperkokoh Jati Diri dan Integritas Bangsa” merupakan upaya yang sangat strategis di tengah-tengah bangsa kita dewasa ini menghadapi suatu krisis yang bersifat multi-dimensional dan berkelanjutan. Masyarakat Bali lebih akrab membaca tanda zaman dewasa ini sebagai zaman “kaliyuga” yaitu suatu kondisi yang menggambarkan dimana batas antara sifat baik dan buruk sangat tipis. Seperti halnya yang terjadi dewasa ini, ketika suatu sifat-sifat buruk atau ketidakbenaran secara terus-menerus dieksploitasi melalui berbagai media, sehingga yang menonjol dikonsumsi oleh masyarakat adalah hal tersebut.

Dengan semakin mengemukanya nilai-nilai ketidakbenaran

dimasyarakat, jangan sampai mampu memprovokasi keragaman budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat nusantara dalam mempersatukan bangsa ini. Semangat bhineka tunggal ika perlu dijunjung tinggi dan dimaknai dalam kehidupan masyarakat adat kekinian. Pemerintah Provinsi Bali sangat menyadari pentingnya menjaga kepercayaan komunitas adat masyarakat Bali sehingga dibuatlah Peraturan Daerah (Perda 03 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman) sebagai payung hukum masyarakat adat/pakraman menjalankan aktivitasnya.

Sejalan dengan terbentuknya payung hukum berupa Perda, pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota juga memberdayakan serta memfasilitasi keberadaan lembaga adat/pakraman yaitu “Majelis Desa Pakraman” yang ada mulai di tingkat kecamatan (Majelis Alit Desa Pakraman), tingkat Kabupaten/kota (Majelis Madya Desa Pakraman), dan tingkat Provinsi (majelis Agung Desa Pakraman). Melalui aktivitas Majelis Desa Pakraman inilah langkah-langkah revitalisasi dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat di Bali.

Hadirin yang saya hormati,

Sehubungan adanya proses perubahan yang tidak dapat kita hindari, hendaknya komunitas adat perlu lebih peka, cermat, dan cerdas dalam menyeleraskan diri dengan perubahan yang terjadi, hal ini sangat penting agar kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tidak tercabut

dari nilai-nilai budayanya yang pada dasarnya bersumber pada nilai-nilai spiritualnya sendiri.

Bertitik tolak dari hal tersebut bangsa ini belum terlambat untuk mengadakan suatu rekonstruksi pemikiran yang membangun integritas bangsa dalam mewujudkan keharmonisan dan keselarasan tatanan kehidupan budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat dengan menumbuhkan keragaman adat-istiadat yang ada di bumi nusantara ini.

Harapan saya, mudah-mudahan pikiran-pikiran baik datang dari segala penjuru, dan dengan mensinergikan nilai-nilai tradisi yang dimiliki lembaga adat di bumi nusantara dengan nilai- modern bangsa ini akan mencapai kebesaran bumi nusantara yang pernah kita capai.

Sekian dan terima kasih

Selamat mengikuti gelar budaya ini

Om, Santi, Santi, Santi, Om

Gubernur Bali

Ttd

Dewa Beratha.

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN
FILM. DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PADA PEMBUKAAN GELAR BUDAYA SPIRITUAL**



Dirjen NBSF DR. Sri Hastanto, S. Kar, Membuka Gelar Budaya Spiritual
ditandai dengan Pemukulan Gong

Yang saya hormati,

- Saudara Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
- Para Pejabat Instansi Terkait
- Para Pejabat di lingkungan Pemda Propinsi Bali
- Tokoh Masyarakat
- Seluruh peserta dan hadirin semua,.....

Ass, Wr, Wb, Salam Sejahtera,Om Swasti Astu dan Rahayu.

- Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas izin dan perkenanNya terhadap hajat kita menyelenggarakan **Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat** di Denpasar Bali ini. Gelar Budaya ini akan meliputi: Dialog dan Temu Tokoh, Pemaparan Budaya Spiritual, Pengenalan Nilai-nilai Luhur dan Pameran.

Gelar tahun ini merupakan gelar budaya spiritual yang kedua kali (Pertama di selenggarakan di Yogyakarta).

- Para hadirin yang kami hormati.

Satu kenyataan bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki keanekaragaman budaya yang tumbuh sebagai usaha budi rakyat Indonesia dan berkembang seirama dengan dinamika kehidupan masyarakat dan peradaban dunia. Salah satu unsur kebudayaan bangsa yang masih hidup dan dihayati oleh sebagian rakyat Indonesia adalah budaya spiritual yang berakar dari ajaran dan emplementasi kegiatan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kepercayaan Komunitas Adat yang ada di setiap etnis dan suku-suku bangsa di Indonesia.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kepercayaan Komunitas Adat adalah salah satu ujud kebudayaan bangsa yang

berbagai unsur positifnya perlu untuk dilestarikan: dilindungi, diembangkan dan dimanfaatkan).

Kita khususnya para panghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta penganut Kepercayaan Komunitas Adat mempunyai tugas melestarikan budaya ini. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menjadi pendorong dan fasilitatornya.

- Para hadirin yang saya hormati

Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik yang kebatinan, kejiwaan, kerohanian dan kepercayaan komunitas adat, adalah dijamin oleh Undang-Undang yaitu: Pasal 28 E UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945, sedangkan dasar untuk melestarikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Pasal 32 UUD 1945,

- Para hadirin yang saya hormati

Di dalam setiap budaya kita, yang bhineka ini, di dalamnya hampir selalu terdapat apa yang sering disebut dengan istilah *local wisdom* atau kearifan budaya setempat/lokal. Berbagai kearifan yang terdapat di dalam setiap budaya itu, selalu mengajarkan kepada kita untuk hidup berdampingan dengan sesama hidup kita, bukan hanya sesama manusia tetapi juga dengan binatang, tumbuh-

tumbuhan, makhluk-makhluk lain serta alam di sekitar kita

Kearifan inilah yang merupakan ruh ajaran, ritual dan perilaku sehari-hari yang mnuntun para penghayat dan penganut untuk *bersimbiose mutualistis* dengan lingkungan dan sesama hidupnya. Dalam kerangka “Negara kesatuan Republik Indonesia”, diharapkan para penghayat kepercayaan dan penganut kepercayaan komunitas adat dapat menyebarkan berbagai kearifan dimaksud kepada para anggota dan lingkungannya untuk dapat hidup penuh dengan kearifan.

Dengan ajaran, ritual, dan perilaku sehari-hari yang menampilkan kearifan tersebut secara khas akan menjadi jatidiri kita masing-masing sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia yang tetap tegak di tengah budaya global

Oleh karena itu melalui gelar budaya spiritual ini, baik dalam ujud dialog dan temu tokoh, pemaparan budaya spiritual dan pameran, saya mengajak seluruh hadirin untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan tuntutan jaman.

- Para hadirin yang kami hormati

Kita semua mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan melestarikan budaya bangsa termasuk di dalamnya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran, ritual dan perilaku sehari-hari penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

penganut Kepercayaan Komunitas Adat sebagai usaha menyempurnakan mozaik budaya Indonesia yang multikultur ini. Demikian melalui Gelar Budaya Spiritual ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terutama seluruh peserta dan dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata khususnya dalam mendorong dan memfasilitasi masyarakat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta penganut Kepercayaan Komunitas adat

- Wassalammu'alaikum Wr. Wb.
- Om Santi-santi Om

Denpasar, 30 Mei2006

Direktur Jenderal Nilai Budaya
Seni dan Film

Dr. Sri Hastanto, S.Kar

III

MAKALAH-MAKALAH

**AKTUALISASI DAN REVITALISASI
NILAI-NILAI BUDAYA SPIRITUAL UNTUK
PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER
BANGSA**

(Prof. DR. H. Damardjati Supadjar)

Inti pendidikan
Adalah keterhubungan
hal-hal tersembunyi
di antara gejala-gejala
(Frijov Capra)

A. Pengantar

Eropah mengalami zaman kegelapan, ketika mereka mengkafirkan Filsafat, dan buku-buku karya Yunani dilempar ke sungai Rheine, sampai warna airnya hitam kebiru-biruan atau biru kehitam-hiaman penuh tinta. Sementara dunia Islam tengah mulai dengan tradisi intelektualnya yang nampak pada ungkapan : “Darah syuhada itu mulia, tetapi tinta alim-ulama, lebih mulia” (Ali, s., 1962). Maka buku induk kefilosofan karya Aristoteles, yang

mengandung prinsip-prinsip umum kebenaran, beserta dengan metode deduktifnya, yakni ORGANON segera disusul oleh NOVUM ORGANUM, karya Francis Bacon, yang memandang Alam Semesta ini sebagai Laboratorium dari berbagai Eksperimen sebagai empiri buatan. Sementara itu di Timur muncul TERTUM ORGANUM yang mengingatkan bahwa hal-hal Spiritual itu lintas batas Ruang dan Waktu; Logika Ketuhanan itu mengatasi Logika Agama dan Ilmu Pengetahuan (Ouspensky, P.D., 1951)

Bagaimana dengan tradisi intelektual kita? Bukankah kita yang menyebut Surya itu Mata-Hari? Bukankah istilah “mata” itu dominan dalam bahasa kita, sebagaimana nampak pada kata-kata: “mata-pelajaran”, “mata-pencarian”, “mata-anggaran”, “mata-pena”, “mata-hati?” Bangsa kita punya potensi tersmbunyi unuk mencapai tingkatan Makrifat (yang illuminatif), dan tidak hanya berhenti pada Hakikat (yang konformatif), Tarekat (yang transformatif), apalagi Syariat (yang informatif).

Dibangunnya Borobudur, demikian pula Prambanan, oleh nenek-moyang kita itu bukannya untuk “dijual” seperti sekarang ini, melainkan agar kita menangkap pesan tersembunyi, bahwa “Pencerahan” Budha dan Hindu itu belum “membebaskan”. Kegagalan Bandung Bondowoso untuk menyamakan gelombang kesadaran bersama dengan Prajnya Paramita, serta terkurungnya 1000 ksatriya dalam “sangkar”, seharusnya membangunkan

kesadaran pada kita, bahwa tugas kosmologis kita ialah menggapai Pencerahan Yang membebaskan, yang terang benderangnya lebih dari 1000 Purnama-Sidhi. Bukankah Ruh itu makro-kosmis, sementara raga kita yang mikro-kosmis. Maka Anand Krishna mengajukan usulan agar cakrawala kesadaran KAMA-HARTA-DHARMA-MOKSWA di bentuk bujur sangkar. KAMA-MOKSWA, HARTA-DHARMA (Krishna, A., 2006)

Maka pada tempatnyalah manakala kita harus selalu waspada, setidaknya-tidaknya tidak lalai, katungkul, melainkan justru tumungkul amari kelu (seperti butir padi yang sarat isi), yakni tawadhlu, yakni dengan laku Nge-BYAR taddabbur menerobos Dunia Fenomenal, menggapai MATAHARI ABADI/MATAHARIABADI. Itulah Sang yang MANON, yang terus menerus ANON-TINON. Alam ini sekat, aling-aling, kelir tanpa batas, sehingga oleh karenanya lalu ditemukan akar “Filsafat” Korupsi, yakni Korupsi “Filsafat”. Para Koruptor itu bersekutu dengan Aling-aling, menjadi MALING; ungkapan: “Aku ambilnya, mumpung tidak ada orang”, membatalkan dirinya sebagai orang.

B. Candra-Jiwa

Berbicara tentang karakter Bangsa, itu berbicara tentang Candra-Jiwa. Prof. DR. Drs. Mr. Notonagoro mengajarkan,

bahwa Candra-Jiwa atau Bangun Kepribadian adalah resultante akhir gaya tarik menarik antara unsur-unsur kepribadiannya, mencakup Susunan-Kodrat (Raga-Jiwa), Sifat Kodrat (individual-Sosial) serta Kedudukan Kodrat (Pribadi mandiri-Makhluk Tuhan). Yang ideal, yakni yang selaras-serasi-seimbang, resultante itu lalu berada di titik pusat lingkaran kesadaran; kalau demikian bisa jadi lalu amorph; bukan ini; bukan itu; tetapi bukan itupun bukan. Kalau begitu maka satu-satunya acuan ialah transendensi diri (Damardjati S., 1993)

Kalau sementara orang berpendapat bahwa Pancasila kita itu bukan suatu Filsafat, atau setidaknya-tidaknya belum tersusun sebagai suatu Sistem ya silakan saja; namun bahwa Pancasila itu berintikan Tri-Sila (Sosio-Nasionalisma, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan YME), yang kalau disari-pati-kan menjadi Eka-Sila, yakni GOTONG-ROYONG, maka sungguh patut disyukuri bahwa Di Dunia ini telah tersusun rapi suatu Filsafat GOTONG-ROYONG, yakni Filsafat ORGANISME atau Filsafat PROSES:

Alam semesta ini Realitas yang berstruktur dan
Berproses. Strukturnya bertingkat (hirarkhis),
Yakni Lahir-BATIN. Prosesnya, kaitan fungsionalnya
Berdimensi Awal-Akhir
(Whitehead, A.N., 1929)

Sila-sila dalam Pancasila itu mengenai Struktur Realitas (Lahir-Batin). Karena Keadilan Sosial, apapun keadaannya harus diwujudkan Sudah sejak semula sejak kedatangan Islam, kita membuat suatu senyawa term ADIL (ajaran Islam) dengan Ambeg Parama-arta. Bahwa “tikar”nya itu bedhah dan kita tutup dengan jadah (baik dalam konotasi juadah atau sa-jadah), namun jejer-nya tetaplah segera mempersilakan tamu itu duduk, bukan lalu ganti adegan, karena jadahe mambu, pakakno asu, asune mati kelek na kali, kaline banjir, cemplungna pinggir, yakni bukannya among tamu, malah ngurusi anjing mati (Soedjonoredjo, R, 1937).

Dalam hal struktur realitas itu Spiritualitas Jawa mengenai ajaran Pamoring Kawulo-Gusti; sementara mengenai Prosesnya: Ajaran Sangkan-Paraning Dumadi.

Anda lahir dari mana? Kalau jawabannya : “dari rahim Ibu!”, maka itulah jawaban penggalan. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Kg. Ibu, rahim Ibu kita itu adalah “terminal”/”transformator” saja; bukan “generator”. Kita lahir dari BATIN. Hanya saja perlu disadari, bahwa baik kata “lahir, ataupun “Batin”, keduanya adalah bahasa Arab. Agar makna religiusitas tercapai, seharusnya kita cari kata asli, bahasa Ibu kita sebagai substrat bagi kedua kata itu. Lahir itu “babar”, babaran; gelar, gumelar, sehingga kata “batin” itu tentunya “Geleng”/gumeleng, “golong/

gumolong. Dengan demikian gerak kosmologis lahiriah itu, menemukan sumbu, porosnya, WUQUF-nya pada BATINNYA. Kalau demikian sungguh tepat laku spiritual: “LENGING CIPTA WUS GUMELENG”. (Kusumowicitro, 1917).

C. Transformasi Diri

Di pulau Jawa umumnya, Indonesia pada umumnya ini telah berlaku sedemikian lama ajaran tentang “Nafsu”, sistem kedirian, yang rancu, yakni paralelisme antara Filsafat Yunani dan Jawa, berkenaan dengan adonan-dasar, yang dalam bahasa Jawa dikenal sebagai Bakal, yang memberi petunjuk tentang Bakal, nantinya jadinya (Bakale-bakale). Itulah ajaran tentang “Sedulur papat, lima pancer”, yakni, mengenai unsur “tanah”, “air”, “api” dan “udara”, paralel dengan “ireng”, “putih”, “abang” dan “kuning”, namun yang rancu ketika halnya disampaikan dalam bahasa Arab, yakni Nafsu Lauwwamah, Amarah, Sufiah dan Muthmainnah. Mungkin halnya benar dilihat dari bahasa Arab, namun tidak demikian kalau acuannya Qur’ani, Dalam ajaran Islam, Nafsu, sistem ke-diri-an yang menjadi sumber masalah, bahkan yang kalimat ayatnya mengungkapkan masalah, adalah Nafsu Amarah, (Surat Yusuf, ayat 53), sementara kalau Diri sudah tahu Diri, menyesali Diri dan menghubungkannya dengan dimensi Awal-Akhir, dan bersumpah dengan hal itu, itulah Nafsu Lauwwamah

(QS 75). Adapun sistem ke-diri-an yang ke-aku-annya diakui-Nya, yang karena kepekaannya menangkap perintah-Nya, yang redhla atas segalanya, dan yang lurus arah tuju dinamika kehidupannya, yakni yang MULIH PULIH, diidzinkan-Nya masuk ke Surga-Nya yang tanpa batas, itulah Nafsu Muthmainnah (QS 89: 27-30) yakni pada Surat Fajar, yang justru diawali dengan “Sumpah”-Nya yang paling lengkap, yang menandai fenomena Lailatul Qodar, yakni: Demi fajar,

“malam yang sepuluh

“yang genap dan yang ganjil

“malam ketika telah berlalu.

Ketika mengajarkan hal Pendidikan Mental, Watak/ Karakter Bangsa, Prof. DR. Drs. Mr. Notonagoro memberikan tahapan transformasi diri itu sebagai berikut:

Taat

Semangat

Latihan

Potensi

Kecakapan

Tabiat

Kebiasaan

Mentalitas

Watak

Hati Nurani

Kalau halnya disinergikan berhubung dengan tingkatan Syariat, Tarekat, Hakikat dan Makrifat, maka yang mencakup Syariat ialah: Taat dan Semangat, Tarekat: Latihan, Potensi, Kecakapan, Hakikat: Tabiat, Kebiasaan, Mentalitas, sementara Makrifat: Watak, hati Nurani.

Yang demikian itulah yang diajarkan oleh para pujangga Jawa, berkenaan dengan Sembah Raga, Cipta, Jiwa dan Sembah RASA (Mangkunegara) IV/Soedjonoredjo, 1922). Demikian juga ketika Serat Centhini membandingkan struktur buah kelapa dengan “kepala” manusia, bahwa : Air Kelapa itu Budi, , Kelapanya Hati Sanubari, tempurungnya Nafsu sementara Sabutnya itu badan Wadaq kita.

D. Tanah Perdikan

Hari apakah sekarang ini? Kalau kita ikuti gaya mupusnya Khidir, a.s., maka hari ini adalah hari Kamis. Kalau demikian besok pagi apakah lalu hari Jum’at? Tidak/tetap Kamis; selama diperempatan jalan, pemuda yang mestinya bekerja, dan anak-

anak yang mestinya bersekolah, namun mereka malah “ngemis” seperti itulah hari-hari kita; selama kita “ngemis” ke IMF, CGL, IGGI, WB, maka selama itu pula kita gagal ber-jamaah islamiah yang sungguh-sungguh Islami.

Ketika pembicara menghadap Sinuwun HB IX, berkenaan dengan tradisi “jamasan” Kereta Kencana, lambang wahana kebersamaan termasuk “Negara”, agar tidak berkarat, atau jalan ditempat, dan mendapatkan kenyataan bahwa orang-orang berebut “air kotor” bekas cucian, sementara sisa air bersihnya malah dibiarkan, dan beliau mmberi tahu bahwa seperti itulah Indonesia dengan uang pinjaman selama ini, maka sadarlah kita seharusnya agar kita berebut air bersihnya, yakni Ilmu Ekonomi Global, syukur berlomba-lomba dengan gerakan Infaq, Shodaqoh, Zakat (Fitri, Mal, Profesi). Kalau saja 200 juta Muslim se-Indonesia itu infaq per bulan Rp 1000,- maka tiap bulan akan terkumpul dana Rp 200 milyar.

Itulah tanah Perdikan, ditangani oleh orang-orang mukhlis, yang telah “meninggalkan” dunia, sebelum “meninggal dunia”. Kalau saja Ketuhanan YME itu didudukkan secara benar, yakni Di atas segala Agama, sesuai dengan Logika $S > P$, sementara untuk Agama : $S = P$, dan Ilmu Pengetahuan $S < P$, maka Nilai-nilai Budaya Spiritual, akan dapat diaktualisi serta Direvitalisasi. Bagaimana langkah-langkahnya?

Pertama, ruwatan Murka Kandha, Murwa kala; bahwa bilangan berapapun kalau dikalikan 0 (=Nol), hasilnya 0(=Nol); atau ulangan, adalah lambang waktu. Itulah laku “Turu eling”, “Tidur Syahid” :

“Aja turu, turu lali

Badan turu ati tangi

Ruh madhep maring Allah”

(Film “Langitku, Rumahku”)

Kedua, Sumungkem ing pada, sujud total, bahwa bilangan berapa kalau dipangkatkan 0(=Nol), hasilnya SATU. Selama bahan dasar ke-aku-an itu “api”, maka mustahil kita sujud, Jihad itu bukannya menghunus pedang ngancam orang lain, melainkan transformasi kesadaran NAR, menjadi NUR.

Ketiga, Jumenengan : NENG-NING-NUNG-NANG

NENG-ing Solah bawa

NING-ing Ati manungku puja

NUNG (Dumunung)-ing Kasunyatan

NANG (Wenang) ing Jumenengan

Apakah QIYAMAT itu belum? Apakah Sangka kala itu belum dumeling? Apakah “Mata hari” itu tidak terus terang/terang terus. Apakah firman Tuhan itu disekat ruang dan waktu, sementara

anak yang mestinya bersekolah, namun mereka malah “ngemis” seperti itulah hari-hari kita; selama kita “ngemis” ke IMF, CGI, IGGI, WB, maka selama itu pula kita gagal ber-jamaah islamiah yang sungguh-sungguh Islami.

Ketika pembicara menghadap Sinuwun HB IX, berkenaan dengan tradisi “jamasan” Kereta Kencana, lambang wahana kebersamaan termasuk “Negara”, agar tidak berkarat, atau jalan ditempat, dan mendapatkan kenyataan bahwa orang-orang berebut “air kotor” bekas cucian, sementara sisa air bersihnya malah dibiarkan, dan beliau mmberi tahu bahwa seperti itulah Indonesia dengan uang pinjaman selama ini, maka sadarlah kita seharusnya agar kita berebut air bersihnya, yakni Ilmu Ekonomi Global, syukur berlomba-lomba dengan gerakan Infaq, Shodaqoh, Zakat (Fitri, Mal, Profesi). Kalau saja 200 juta Muslim se-Indonesia itu infaq per bulan Rp 1000,- maka tiap bulan akan terkumpul dana Rp 200 milyar.

Itulah tanah Perdikan, ditangani oleh orang-orang mukhlis, yang telah “meninggalkan” dunia, sebelum “meninggal dunia”. Kalau saja Ketuhanan YME itu didudukkan secara benar, yakni Di atas segala Agama, sesuai dengan Logika $S > P$, sementara untuk Agama : $S = P$, dan Ilmu Pengetahuan $S < P$, maka Nilai-nilai Budaya Spiritual, akan dapat diaktualisi serta Direvitalisasi. Bagaimana langkah-langkahnya?

Pertama, ruwatan Murka Kandha, Murwa kala; bahwa bilangan berapapun kalau dikalikan 0 (=No1), hasilnya 0(=No1); atau ulangan, adalah lambang waktu. Itulah laku “Turu eling”, “Tidur Syahid” :

“Aja turu, turu lali

Badan turu ati tangi

Ruh madhep maring Allah”

(Film “Langitku, Rumahku”)

Kedua, Sumungkem ing pada, sujud total, bahwa bilangan berapa kalau dipangkatkan 0(=No1), hasilnya SATU. Selama bahan dasar ke-aku-an itu “api”, maka mustahil kita sujud, Jihad itu bukannya menghunus pedang ngancam orang lain, melainkan transformasi kesadaran NAR, menjadi NUR.

Ketiga, Jumenengan : NENG-NING-NUNG-NANG

NENG-ing Solah bawa

NING-ing Ati manungku puja

NUNG (Dumunung)-ing Kasunyatan

NANG (Wenang) ing Jumenengan

Apakah QIYAMAT itu belum? Apakah Sangka kala itu belum dumeling? Apakah “Mata hari” itu tidak terus terang/terang terus. Apakah firman Tuhan itu disekat ruang dan waktu, sementara

adanya Ruang dan Waktu, dan segalanya itu karena FIRMAN-NYA? Kita yang belum mendengar, karena tersumbat, kopoken oleh “fungsi” yang menjauh dan struktur ke-api-an.

Bukankah “kala” sistem waktu yang merugi itu karena usulan “Iblis” yang menunda HARI-HARI-NYA. Dan bukankah penundaan itu tidak berlaku bagi hamba-hamba Allah yang mukhlis? Dan bukankah pada Surat Ikhlas itu tidak ada perkataan Ikhlas?

Beberapa Contoh :

1. Ungkapan “Sabem mendra saking wisma”, dalam Serat Wedhatama, bukannya setiap kali ke luar dari rumah, melainkan oncat dari raga, yakni “Raga-Suksma”.
2. “Tunggak jarak mrajak, Tunggak jati MATI. Mati (Jw) tidak sama dengan “mati” (Ind), karena akar katanya Ati, ng-ati ATI/ M-ATI. Jadi “Mati” (Jw) itu syahid. Sementara kalau orang Jawa bermaksud mengacu ke istilah Indonesia “mati, istilahnya justru “layu” (=alum), pra-laya.
3. Yang dinantikan adalah Raja tanpa mahkota, yakni Raja yang ngagem udheng, M-udheng, di dalamnya tersimpan “layang Kalimasada”; SAMI-AJI, darahnya putih bersih; nama lain istilah PERDIKAN adalah MUTIHAN.
4. ENENG-ENING, AWAS-ELING : Sajatosipun boten wonten

punapa = punapa, kajawi “Rang Kajawi”.

5. Jawa iku Jiwa kang Kajawi: “Warangka manjing Curiga”.

Bali, 30 Mei 2006

Prof. Dr. H. Damardjati Supajar

(0274)- 889345

565853

7929034

HP: 081328679177

Referensi:

Capra, P., 2002, The Hidden Connection Plamingo, GB

Whitehead. A.N., 1929, Process and Reality, MFC, USA

Soedjonoredjo, R., 1937, Serat Madu Rasa, TKS, Kediri

Kusumowicitro, 1917, Kawulo-Gusti, Panitia Konggres Thaosofi, Smg

Damardjati, 1993, Nawang-Sari, Fajar Pustaka baru, YK

MEMBANGUN BUDI PEKERTI LUHUR MENUJU INDONESIA ADIL MAKMUR

Oleh

KPH. Darudriyo Sumodiningrat

I. Pendahuluan

Kalau saja para pemimpin kita tidak menyalahgunakan 60 tahun merdeka dengan memberi bekal pada rakyat budi pekerti luhur barangkali krisis yang kita alami tidak akan separah dan segawat ini. Sebab budi pekerti luhur yang akan sanggup membentengi kita dalam bermasyarakat dan bernegara dari ancaman berbagai macam krisis. Dengan budi pekerti luhur setiap individu bukan hanya mampu memahami apa itu hak asasi manusia, apa itu toleransi, diskriminasi, demokrasi apa itu kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kebersamaan dan transparansi tapi sekaligus juga mampu mempraktekkan semuanya itu dengan kesadaran penuh tanpa paksaan, bujukan ataupun disuruh-suruh. Praktek selama ini kelemahan institusi pendidikan kita ialah kurangnya kebijakan yang memungkinkan aparat pendidikan sendiri sadar betapa pentingnya praktek.

Memang dalam upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah Orde Baru dengan BP –7 nya telah menggalakkan penataran P-4 ke seluruh pelosok-pelosok Tanah Air tapi karena tekanannya bukan pada kemampuan praktek maka hasilnya tidak mengakar di hati masyarakat, buktinya dalam sekejap disapu bersih oleh badai krisis sehingga tak ada lagi yang tersisa, kecuali puing-puing bangunan, rongsokan mobil bekas terbakar dan kerusakan yang terus merebak di mana-mana.

Ada sebuah ungkapan dari tembang Jawa yang bunyinya “*Ngelmu iku kelakone kanti laku*” artinya ilmu apapun, dari manapun asalnya, siapapun yang mempelajarinya, tanpa disertai praktek hasilnya akan sia-sia.

Demikian gagasan atau cita-cita (*Jongko*), betapun mulianya gagasan itu tanpa diikuti langkah-langkah yang konkret (*Jangkah*) tidak akan bisa menjadi gagasan yang sempurna (*Jangkep*). *Jongko Jangkah Jangkep*. Jadi pada dasarnya substansi pendidikan budi pekerti luhur ialah kemampuan praktek.

II. Wajah Kita Menjelang Tahun 2007

Memasuki tahun 2006 ini rupanya bangsa Indonesia masih harus prihatin akibat multi krisis berkepanjangan. Bahkan terasa

bobot krisis semakin berat dan mengkhawatirkan karena munculnya berbagai kepentingan yang saling berbenturan.

Di bidang politik partai-partai baru tumbuh bagaikan jamur di musim hujan sementara para politis saling curiga, saling tuding, salah menyalahkan, saling melempar pernyataan-pernyataan politik yang semakin membingungkan rakyat.

Di bidang ekonomi apalagi, biang keladi krisis ini menjadi sampai sekarang keadaannya masih runyam karena pertumbuhan ekonomi kurang begitu diharapkan, inflasi tetap tinggi, sektor usaha riil macet, perusahaan siap-siap gulung tikar karena tidak mampu lagi menanggung ongkos produksi yang semakin membengkak sedangkan sikap investor wait and see, bahkan menurut warta terakhir beberapa pemodal mengalihkan dan berpaling ke negara lain. Sementara itu harga kebutuhan pokok terus meroket, sedangkan daya beli masyarakat semakin lemah karena pengangguran semakin merajalela akibat pemutusan-pemutusan hubungan kerja.

Di bidang hukum sama saja, karena masyarakat menganggap aparat hukum masih berbau KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), terbukti masih adanya kasus peradilan. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar dihati masyarakat luas sehingga usaha apapun yang dilakukan untuk menegakkan

wibawa hukum akhirnya akan sia-sia karena orang tidak percaya lagi. Sementara itu, masyarakat sendiri masih sangat rentan terhadap gejolak sosial, politik maupun ekonomi, masih gampang digoncang isu-isu mengenai SARA (Suku, Agama, Ras antar golongan). Sehingga membuat suasana tambah kacau dan semrawut seperti benang kusut, tak tahu lagi mana ujung, mana pangkalnya, mana yang benar, mana yang salah.

Karena tidak tahan lagi memikul beban hidup yang semakin menghimpit sebagian kelompok masyarakat mulai nekad mengambil jalan pintas dengan mengibarkan bendera hukum rimba, street justice. Hukum jalanan dan terjadilah perampokan, penjarahan, pembakaran toko, penculikan, pembunuhan, perkosaan, tawuran massal dan segala macam bentuk kekerasan lainnya.

Kita lalu bertanya dalam hati ada apa sebenarnya dengan bangsa ini ? mengapa kita menjadi begitu egois sehingga susah memahami orang lain, menghargai hak dan pendapat orang lain ? Mengapa kita selalu ngotot memaksakan kehendak pada orang lain ? Mengapa kita gampang dihasut, gampang terpancing isu-isu yang belum tentu benar lalu menjadi beringas dan ngantuk membakar toko, menjarah harta orang, membantai sesama hidup seperti suku Babar yang belum pernah mengenal peradaban.

Jawaban paling sederhana, mungkin sudah klise, sudah sering diucapkan orang salah, karena kita tidak siap menghadapi era globalisasi yang sudah berdiri diambang pintu. Kita tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup handal dan memadai untuk mengantisipasi dan mengadopsi perubahan yang berlangsung secara cepat dan drastis.

Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih menantang dan kadangkala menakutkan kapan perekonomian akan membaik ? kapan krisis akan berlalu dan sampai kapan rakyat akan sanggup menahan lapar ? kapan para politis mencapai titik temu lalu membuat kesepakatan nasional dan menyelamatkan bangsa dan negara ? kapan kepercayaan rakyat pada pemerintah dan aparat keamanan akan pulih sehingga kerusuhan berhenti, tak ada lagi demonstrasi, masyarakat tenang dan kehidupan kembali berjalan normal ? Benarkah pendapat seorang pengamat yang mengatakan bahwa kondisi semakin memburuk bahkan sudah mulai nampak gejala-gejala ke arah revolusi sosial yang akan disusul disintegrasi total ?.

Kita tidak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tapi alangkah baiknya kalau kita segera menyingsingkan lengan baju untuk berbuat sesuatu. Itulah yang menjadi tekad kami para budayawan spiritual penghayat kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa. Dalam suasana krisis yang masih terus berkepanjangan kami ingin hadir di tengah-tengah masyarakat luas, memberi wejangan, menghibur mereka, membesarkan hati mereka, berdialog dalam konteks bahasa dan budaya mereka, sambil merenungkan kembali betapa pentingnya budi pekerti luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

III. Budi Pekerti Membentuk Karakter Bangsa

Orang hidup memang gampang-gampang susah persoalan hidup juga sangat kompleks dan tidak jarang kita keliru langkah atau salah mengambil keputusan. Tapi dengan bekal budi pekerti luhur, kita akan mampu melihat setiap persoalan dengan hati yang tenang dan pikiran yang bening sebening permukaan telaga. Budi pekerti luhur akan membentuk pribadi manusia yang berwatak dan berciri.

1 Spiritualis

Mestinya kita tahu dan sadar bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, jadi hanya Tuhan yang patut disembah. Segala puja-puji dan kemuliaan hanya untuk Tuhan semata.

Apapun ucapan dan tindakan kita harus dilandasi iman dan taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, percuma

mengaku umat beragama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau perbuatannya sewenang-wenang beringas, tak bermoral dan mengagungkan berhala modern seperti uang, harta benda, derajat dan pangkat, jabatan atau kedudukan empuk, kekuasaan, mendewa-dewakan pimpinan atau atasan atau dirinya sendiri.

2 Demokratis

Bahwa setiap sadar betul akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Di samping tahu apa yang menjadi haknya dia juga paham mengapa harus menghargai hak serta pendapat orang lain, mengapa harus menempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, mengapa harus sportif mengakui kekalahan dan kelemahan, mengapa harus konsekuen dan tidak boleh bermental KKN. Soal beda pendapat silahkan tapi tidak harus sampai bermusuhan, harmoni, keseimbangan, keselarasan, itulah hidup. Itulah demokrasi, Bhineka Tunggal Ika, contoh seni karawitan. Kita melihat gamelan ditabuh sesuai irama tembang atau kidung yang dimainkan, sehingga menghasilkan paduan bunyi yang indah, merdu dan menyejukan suasana.

3 Kritis

Bahwa setiap orang harus menggunakan akan sehatnya harus kaya penalaran tapi tidak sampai terjebak dalam kaidah-kaidah teori ngelimet dan muluk-muluk namun kering realitas kehidupan. Dengan demikian, dia mampu menyelaraskan kegiatan pikiran dan rasa, mampu menjadi orang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.

4 Produktif

Bahwa setiap orang harus mampu mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya, mampu memberdayakan dirinya secara maksimal sehingga melahirkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Aliran karya itu ibarat sungai yang akan menyuburkan daerah sekitarnya. Dan aliran sungai itu harus dijaga, dimonitor supaya tidak banjir atau kering sehingga menimbulkan bencana. Produktif di sini dalam arti positif, mau kerja keras tanpa harus kehilangan sifat-sifat manusianya, disiplin tanpa harus menjadi robot.

5 Kreatif dan Inovatif

Bahwa setiap orang harus mempunyai kemampuan menggugah cita rasa dan daya ciptanya untuk melahirkan karya-karya yang dijiwai semangat pembaruan. Apa yang bagi orang lain dibuang ke tempat sampah, di tangan manusia kreatif masih bisa disulap menjadi sesuatu yang baru, yang unik dan bermanfaat. Dan seringkali mempunyai nilai ekonomis.

6 Mandiri

Artinya sikap hidup yang tidak ingin atau tidak suka bergantung pada orang lain tapi bukan egois. Dasarnya, ialah tidak mau menyia-nyiakan seluruh potensi yang dimilikinya dan didasarnya sebagai karunia Tuhan. Insan mandiri tetap memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sadar lingkungan dan mampu menempatkan dirinya ditengah-tengah dinamika masyarakat secara arif dan bijak. Mandiri sama sekali bukan berarti menutup diri seperti katak dalam tempurung, tapi juga ingin menjadi benalu bagi orang lain, menyusahkan orang lain.

7 Kepedulian Sosial

Artinya sikap hidup yang mau menolong orang lain yang butuh pertolongan tidak egois, kebersamaan, gotong royong, didasari atas kesadaran bahwa hidup ini tidak sendiri perlu orang lain dan saling mengisi. Nilai-nilai ini sebenarnya sudah membudaya sejak leluhur kita zaman dahulu.

IV. Memahami Makna Hidup Berbangsa dan Bernegara

Yang dimaksud dengan memahami makna hidup berbangsa dan bernegara ialah pertama-tama, memahami makna hidup berbangsa ialah memahami falsafah hidup bangsa. Dalam falsafah hidup itulah kita akan menemukan cita-cita kehidupan yang luhur, tujuan-tujuan hidup berbangsa. Pedoman-pedoman bernegara, dan pengertian dasar mengenai hubungan manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan dunia sekelilingnya dan dengan penciptanya. Kedua, memahami makna hidup bangsa ialah memahami pedoman-pedoman berperilaku sebagai warga negara, yang diterapkan untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. Sekaligus pemahaman itu memungkinkan kita memenuhi patokan-patokan moral dan kaidah-kaidah sosial yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan bangsa.

Perhatikan baik-baik, kalimat-kalimat demi kalimat, kata demi kata, yang tercantum sebagai Pembukaan UUD kita, Undang-Undang dasar 1945. Cita-cita serta tujuan nasional kita, landasan serta arah pembangunan kita, tercermin secara padat dalam ungkapan-ungkapan kalimat yang sederhana.

Karena itu, tidak berlebihan apabila setiap kita yang sekarang mewarisi kemerdekaan bangsa ini, memanfaatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena, bangsa Indonesia telah mampu mengembangkan landasan Idiil yang sekaligus landasan konstitusional dari pandangan hidup tersebut.

V. Kebudayaan dan Perikehidupan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kebudayaan, adalah satu sumber kekayaan dan kekuatan manusia yang antara lain tumbuh dari suatu perjalanan sejarah yang sangat panjang. Kebudayaan bukan sesuatu yang terjadi dan yang dapat hilang dalam waktu sekejap. Kebudayaan, adalah kristalisasi kemanusiaan dan umat manusia. Sejarah jatuh banggunya manusia. Sejarah runtuh dan tumbuhnya manusia. Sejarah kemenangan dan kekalahan manusia adalah dalam melawan diri dan nafsu-nafsunya sendiri. Kebudayaan, bukan hanya akumulasi dari kemenangan manusia terhadap alam. Kebudayaan bukan hanya kumpulan ilmu

dan teknologi. Kebudayaan lebih dari itu.

Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu dan berhasil memanfaatkan segala daya yang disediakan oleh alam dan yang yang disediakan oleh Tuhan kepadanya untuk membuat kehidupan di dunia lebih alami, lebih manusiawi, bahkan lebih Tuhani. Esensi dari kebudayaan ialah lepasnya manusia dari belenggu negatif, belenggu kebodohan, belenggu kesengsaraan, belenggu perbudakan, belenggu penjajahan, belenggu keserakahan baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Kebudayaan bertujuan membawa manusia lebih anggun dan lebih mulia, kehidupan yang patut disebut kehidupan manusiawi dengan nafas Tuhani. Inilah arti kebudayaan bangsa berkembang secara terjalin dengan kehidupan keagamaan, baik agama, kebudayaan maupun interaksi antara keduanya sama-sama menuju kepada peningkatan hidup manusia yang bermartabat.

VI. Masyarakat Indonesia adalah Masyarakat Majemuk

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, yang terdiri dari kurang lebih 300 kelompok etnik yang memiliki identitas budayanya sendiri-sendiri, serta menggunakan kurang lebih 250 bahasa dalam pergaulan sehari-hari.

Di Indonesia juga terdapat berbagai macam-macam

agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh berjuta-juta umat manusia, yang memiliki kitab suci dan tradisi yang panjang dan ajaran-ajaran yang tersusun rapi, sampai kepada kepercayaan yang hanya dipeluk oleh sejumlah kecil penganutnya serta tidak mempunyai kitab suci atau ajaran-ajaran yang tertulis.

Sistem perekonomian tidak hanya satu macam saja. Disamping system perekonomian modern, seperti industri dan perdagangan yang mempunyai ruang lingkup nasional bahkan internasional, juga terdapat system perekonomian desa yang lebih sederhana, yang banyak tingkat dan macamnya di sector pertanian, peternakan dan perikanan. Dengan singkat pola budaya masyarakat Indonesia adalah sangat beraneka ragam.

Keanekaragaman kebudayaan Indonesia itu disebabkan pertama-tama oleh sifat kenusantaraan Negara Indonesia, yang memisahkan suku-suku bangsa secara geografis, sehingga mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda, dimana tiap suku bangsa kemudian membentuk identitas budayanya sendiri-sendiri.

Kedua, keanekaragaman kebudayaan Indonesia disebabkan pula oleh pengaruh kebudayaan dari luar yang secara bergelombang-gelombang memasuki Indonesia yang terletak di lalu lintas dunia yang sangat strategis.

Keanekaragaman budaya Indonesia tersebut pada satu pihak merupakan factor yang positif, yang mengandung kekayaan

dan potensi cultural serta dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa tetapi di lain pihak dapat menjadi factor yang menghambat pembangunan. Sistem komunikasi yang belum lengkap dan sempurna dan taraf pendidikan rakyat yang masih sederhana menyebabkan bahwa anggota-anggota kelompok etnik kurang memperoleh kontak dengan dunia luar dan bersikap “inward looking” mengembangkan sikap ethnocentrisme yang kuat dan bersikap secara stereotype dalam mengadakan interaksi social dengan anggota suku bangsa lain, yang sering mengandung prasangka dan menimbulkan kecurigaan dan pertentangan.

Tiap-tiap suku bangsa mengembangkan system nilai-nilainya sendiri dan ukuran-ukuran sosialnya sendiri, sehingga dalam masyarakat Indonesia yang besar ini terdapat ukuran social yang berbeda-beda. Walaupun terdapat unsure-unsur kebudayaan yang mempersatukan seperti pemerintah dan pendidikan, serta perekonomian modern yang mengintegrasikan segenap tata kehidupan dalam masyarakat namun sifat kesukuan masih tampak nyata dalam konfigurasi kebudayaan Indonesia.

Kesadaran akan sifat keaneka ragaman dari pada masyarakat Indonesia perlu kita miliki dalam rangka pembinaan dan pembangunan bangsa, oleh karena asas keanekaragaman inilah yang menjadi dasar pembentukan kesatuan bangsa (BHINEKA TUNGGAL IKA).

VII. Kerukunan Hidup Beragama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa salah satu Sarana Membangun bangsa

Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 ialah Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Perumusan pokok pikiran tersebut dalam UUD 1945 tercantum dalam pasal 29:

Ayat (1) : Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 UUD 1945 tersebut mengandung unsur-unsur :

1. Kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Dengan adanya kebebasan beragama berarti wajib saling hormat, menghormati, sehingga perlu adanya kerukunan hidup beragama. Kebebasan beragama yang bertanggung jawab, mengandung arti kewajiban untuk mencegah segala bentuk pertentangan dan perbentukan dengan pemeluk agama dan kepercayaan yang lain, dan bahkan perlu merintis jalan bekerja sama yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan Negara.
3. Perlu adanya pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu tujuan dari agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah mengendalikan tingkah laku dan perangai manusia dalam masyarakat agar tercipta kedamaian dan tata tertib dalam pergaulan hidup bangsa dan umat beragama.

Karena itu dalam pembangunan nasional fungsi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diikut sertakan. Ikut sertanya fungsi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan nasional telah dituangkan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dimana dinyatakan bahwa salah satu modal dasar pembangunan nasional ialah modal rohaniyah dan mental.

Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia terdiri dari beratus-ratus suku bangsa dengan bermacam-macam adat istiadat dan kepercayaan. Karena itu dalam masyarakat terdapat bermacam-macam agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh berjuta-juta umat Indonesia.. Karena ada perbedaan dalam mengamalkan ibadahnya sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, atau adanya salah pengertian tentang agama atau aliran kepercayaan itu sendiri, menyebabkan sering terjadinya ketegangan social yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional dan kelancaran pembinaan stabilitas nasional.

Masalah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan factor yang amat peka. Dalam sejarah terbukti bahwa gangguan dalam kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat membawa akibat yang sangat semua serta mengganggu ketentraman dan keselamatan bangsa. Indonesia yang sedang membangun sangat memerlukan suasana tentram dan damai agar pembangunan berjalan dengan baik.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengerjakan supaya saling menghormati dan menghargai penganut agama dan kepercayaan yang berbeda, karena pada dasarnya semua menyembah Tuhan Yang Maha Esa menurut ajaran

dan keyakinannya masing-masing yang memberikan pengarahannya kepada hidup yang baik, yang antara lain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ajaran dan kepercayaan mengajarkan supaya hidup rukun, hidup sejahtera materiil dan spiritual. Tidak ada satu agama dan kepercayaan yang berbeda itu binasa dan sengsara atau menghendaki manusia susah dan menderita.

Beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara berkebudayaan yang beradab, berarti melaksanakan ajaran-ajarannya secara baik dengan kesediaan mengendalikan diri untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan, melainkan sejauh mungkin senantiasa berusaha berbuat untuk kebaikan bagi diri dan golongan sendiri maupun kebaikan bagi orang dan golongan yang lain serta menghormati kemerdekaan orang lain untuk memilih agama dan kepercayaan mengamalkan.

AKTUALISASI DAN REVITALISASI NILAI-NILAI KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT UNTUK PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER BANGSA

Oleh : Ade Suherlin (Kampung Naga)

Pendahuluan

Kami merasa gembira terselenggaranya Mukhtamar Budaya diadakan oleh Departemen Kebudayaan dan pariwisata, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film. Kegiatan ini diharapkan membuka serta membangkitkan kembali wawasan bangsa tentang keberadaan nilai-nilai spiritual dan kearifan local tradisional yang dimiliki masyarakat (khususnya masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara).

Melalui makalah yang disusun sederhana ini, kami mencoba membahas judul yang diminta panitia yaitu “Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-nilai Kepercayaan Komunitas Adat untuk Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa”.

Memperhatikan judul makalah diatas, kiranya begitu banyak yang harus dipaparkan, tetapi kami mencoba membatasi dan

membahas judul makalah itu dari sudut pandang kami sebagai masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu-Tasikmalaya, Jawa Barat.

Saat ini, Ibu pertiwi mengalami berbagai cobaan, Banyak peristiwa dan kejadian yang memilukan, menakutkan malah mengerikan, menimpa kita. Banjir Bandang dan tanah longsor menimpa hamper semua daerah di tanah air. Busung lapar menimpa sebagian anak-anak kita, baik di kota maupun di desa.

Tumbuhnya berbagai penyakit: seperti wabah Malaria dan Diare, kekurangan pangan, sebagai akibat munculnya berbagai hama tanaman, sehingga mengakibatkan gagal panen di mana-mana, Peristiwa kerusuhan antara kelompok masa, dan lain-lain pokoknya berbagai bencana menimpa negeri ini, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Peristiwa demi peristiwa yang memilukan dan menyedihkan akhir-akhir ini, mungkin tidak semata-mata timbul begitu saja, tetapi ada akar masalahnya dibalik peristiwa tersebut, hanya kita belum mengetahuinya secara pasti atau jangan-jangan justru kitalah tidak tanggap menangkap sinyal dibalik peristiwa itu, sebagai teguran Tuhan terhadap umatnya.

Banyak orang menyebut, timbulnya berbagai bencana alam menimpa kita, disebabkan oleh krisis akhlak (hilangnya sikap suri

keteladanan) terutama dari para pemimpin bangsa itu sendiri yang sudah lupa akan jati dirinya sebagai manusia yang berbudaya dan beragama dalam mengemban amanah dimuka bumi.

Melalui gelar budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat ini, apa salahnya kita semua mencoba untuk merenungkan dan menghayati kembali akan peran dan tugas umat manusia dalam mengemban amanah untuk “ngarawat jeung ngarumat”. Bumi ini sebagai titipan dari Tuhan kepada kita.

Bangsa kita sebenarnya kaya berbagai falsafah, budaya, kearifan-kearifan local dan nilai-nilai kepercayaan tradisional yang bisa membimbing, mengoreksi dan menata diri akan peran dan fungsi kita masing-masing dalam menyelamatkan bumi sebagai titipan Tuhan.

Dalam kesempatan langka ini, dimana banyak orang berkumpul dari pelosok negeri, yang terdiri dari berbagai lapisan, berbagai level kedudukan, berbagai predikat yang disandang masing-masing kedatangannya ke arena ini tidak semata-mata untuk hura-hura, melainkan mempunyai satu tujuan, yaitu: Berpikir bersama dan mencari pemecahannya atas berbagai ketimpangan dan permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini menimpa bangsa Indonesia.

Berbagai peristiwa, kejadian dan permasalahan yang akhir-akhir ini menimpa bangsa kita, teringat akan pesan moral nenek moyang kami tentang 3 (tiga) “*Tri Tangtu di bumi*” yang tidak bisa dipisahkan,

antara lain: “*Tata Wilayah*” (lingkungan). “*Tata Wayah*” (waktu, era/jaman) dan “*Tata Lampah*” (Perilaku/moralitas).

Nenek moyang telah mengisaratkan bakal datangnya suatu “wayah” atau Jaman/Era/Saat/Masa” dimana pada “Wayah” itu, budaya kiriman, lebih dihargai daripada budaya warisan. Ucapan nenek moyang kami telah mengatakan, “Engke isuk jaganing geto bakal aya angina Barat”.

Nenek moyang kami memberikan wejangan, bahwa masyarakat adat harus tetap komitmen mempertahankan adat istiadat/kearifan local/nilai-nilai tradisional sebagai warisan budaya. Walaupun badai sekalipun datang, merontokkan semua tatanan kehidupan, masyarakat adat tetap berpegang pada falsafah sebagai pedoman.

Sekarang ini, kita berada dalam “wayah” menghadapi era globalisasi, dengan segala aspek negative maupun positifnya. Era/jaman “wayah” tidak bisa di hindari, cepat atau lambat pasti mempunyai pengaruh dan menimbulkan berbagai perubahan kehidupan social ummat manusia, tidak terkecuali di pelosok desa terpencilpun.

Masalahnya sekarang, bagaimana nilai-nilai baru (berupa budaya kiriman, yang datang dari luar itu) di amati secara bijak dan arif, kemudian diselaraskan dengan nilai-nilai tradisional (kearifan local yang sudah diwariskan nenek moyang kita dahulu, berupa *falsafah* ada di “*Masyarakat Adat*” *Agama* ada pada “*Umatnya*” Budaya

untuk seluruh “*Bangsa*”).

Yang penting bagaimana nilai-nilai tradisional/kearifan local itu dikaji lebih tepat dan seksama sesuai tuntutan dan tantangan jaman “wayah itu sendiri” sehingga bermanfaat bagi perkembangan budaya dan pembentukan nilai-nilai social yang baru yang lebih bermanfaat.

Kita sekarang berada pada persimpangan budaya, antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern, dengan membanjirnya budaya-budaya kiriman yang tidak sesuai dengan pribadi dan jati diri bangsa kita. Kami melihat proses kebudayaan yang berupa kearifan local dan nilai-nilai seni tradisional yang dimiliki dan diwariskan oleh nenek moyang kita, sudah hamper kehilangan makna dan kepercayaannya karena telah ditinggalkan oleh sebagian masyarakat kita, disebabkan masyarakat sekarang lebih mengagungkan budaya kiriman dibanding budaya warisan.

Pengkajian adat istiadat/kebudayaan yang adiluhung dengan nilai-nilai tradisional yang bisa meningkatkan ketahanan budaya dan ketahanan mental spiritual bangsa sebagai bagian dari pendidikan budi pekerti dan pembentukan karakter bangsa, telah mengalami kemandegan (tidak dicintai/tak berkembang), ini yang sangat dikhawatirkan sekali.

Aneka ragam budaya kiriman, saat ini mencoba menggempur disekeliling kita, merasuk di berbagai perikehidupan umat manusia.

Pada saat kebimbangan dan keputusan, akhirnya masyarakat : kadang menyerah, tak kuasa untuk menangkalnya.

Bagi masyarakat adat, budaya kiriman yang datang dari luar, tetap diamini, tidak bisa dihalangi, sebagai bagian dari proses perubahan “wayah” (jaman) yang dinamis “ *saur elingkeun, jaman kawulaan*”. Demikian falsafah nenek moyang kami, tentang era globalisasi.

Bagi masyarakat hal-hal yang akan terjadi berkaitan dengan datang dari budaya asing (iriman) sudah diawasi dengan berbagai filter dan tindakan kreatif untuk menangkalnya dengan tetap berpegang teguh pada tali/budaya (adat istiadat).

Era globalisasi pada dasarnya membawa perubahan “wayah” secara cepat sekali, dengan jaringan yang cukup kuat, berupa media elektronik, dll. Ketertutupan yang tadinya berupa tabu (pamali) dikalangan masyarakat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Informasi, barang dan jasa yang berupa budaya kiriman membanjiri berbagai komunitas social. Dengan demikian budaya asing (budaya kiriman) sudah mengepung kesadaran masyarakat itu. Akibatnya terjadi kebimbangan, kepanikan dan muncul kekhawatiran yang berlebihan.

Dalam keadaan tertekan, kebimbangan, rasa gamang, frustrasi seperti itu, kadang timbul berbagai “*Lampah*” perilaku manusia yang menjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya

dan nilai-nilai agama. Lebih parah lagi, kalau masyarakat sudah tergoda, terbius dengan gempuran nilai-nilai asing itu menyerah, tanpa keinginan mengendalikan diri, akibatnya seluruh ummat manusia menjadi manusia yang terpaksa terhadap ***“wayah” era globalisasi***.

Sebagai manusia yang menyerah pada “Wayah” dan menelan mentah-mentah pengaruh budaya kiriman, akhirnya seseorang hanya peka dan menurut pada nilai-nilai kebutuhan dasar saja, yaitu Materi dan Sek (Kepuasan sesaat saja).

Efek “Wayah” ini menjerumuskan manusia pada proses pendangkalan nilai-nilai spiritual. Manusia cenderung boros, terbawa dan terarah pada hidup gaya pamer, hidup gaya boros dan serakah (materialisme) dan hanya mengejar kenikmatan sesaat. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, terjadi konflik horizontal antar komunitas-komunitas lain, karena sudah kehilangan rasa ***“asih, asuh dan asah”*** antar sesame.

Perkembangan “wayah” yang begitu cepat dan pengaruh budaya kiriman yang datang dari luar, Manusia sekarang cenderung berpikir sesaat, karena hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya. Biar orang lain rusak, celaka dan sengsara, yang penting diri sendiri dan kelompoknya maju/berhasil. Padahal nilai kemuliaan dan kehormatan seseorang diukur dari ***“tekad, ucap dan lampah”*** yang dilakukannya.

Saat ini kelihatannya sudah jarang di temukan para pimpinan formal maupun pimpinan non formal yang “Tekad”, “Ucap”, “lampahnya” selaras, di tengah-tengah masyarakatnya, akibatnya wibawa dan kehormatan dirinya kadang dilecehkan (“ucapan” dan “Lampahnya”) tidak di turuti dan dipatuhi. Harga dirinya secara tak langsung di injak-injak oleh masyarakat. Akhirnya secara fisik, dia hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi *ruh/jiwanya* tidak berada di tengah-tengah masyarakat.

Akibat perkembangan “Tata Wayah” dan “Tata Lampah” yang tak terkendali diluar nilai-nilai spiritual (agama) dan kearifan local/nilai-nilai tradisional, maka timbul berbagai sisi negative terutama pada “*Wilayah*”. Wilayah dalam arti yang lebih luas adalah “*Alam dan Lingkungan sekitar*”, sebagai tempat tinggal seluruh makhluk (makhluk nyata yang terlihat secara kasat mata dan makhluk yang tak terlihat oleh mata/makhluk gaib).

Menurut falsafah yang kami anut antara lain “*Alam jeung lingkungan lain raksakeun, tapi rawateun jeung rumateun*” (Alam dan lingkungan bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat dan dimuliakan).

Pada prinsipnya masyarakat adat mempunyai konsep dan sikap yang hidup tidak bisa ditawar lagi tentang “Ngarawat, Ngarumat Alam Jeung Lingkungan” Sikap hidup “bersama” alam, dan bukan

hidup di “alam” seperti konsep hidup yang dimiliki masyarakat modern. Dimana alam harus ditaklukkan, dikuras habis-habisan, tanpa menghiraukan sisi ekosistem alam. Oleh karena itu masyarakat adat memiliki solidaritas dan simpati yang tinggi dengan alam. Alam bukan suatu “objek” melainkan sebagai “subjek” yang seharusnya dilindungi/dilestarikan dan dimuliakan. Karena dari sanalah (“alam dan lingkungannya”) sebagai sumber hidup dan kehidupan. Alam dan lingkungan dengan segala keberadaan didalamnya berupa Flora (tumbuhan) maupun Fauna (binatang) pada hakekatnya diciptakan oleh Tuhan mempunyai makna dan tugas (pancen) yang mulia di bumi ini, sama halnya seperti manusia.

Masyarakat kini, baik di pedesaan maupun di perkotaan sudah mulai tercabut dari akar budaya, dan jati dirinya sendiri. Mereka lebih tertarik, mencoba melaksanakan budaya kiriman yang datang dari luar, bukan sebaliknya dan seharusnya memelihara budaya warisan dari nenek moyang.

Menurut hemat kami, kiranya ada tiga pendekatan dalam mengaktualisasi dan merevitalisasikan nilai-nilai kepercayaan dan komunitas adat sebagai bagian dari pembentukan budi pekerti dan karakter bangsa

1. membangun, merajut, menumbuhkan ikatan batin/tali silaturahmi secara terus menerus secara sukarela antar kelompok masyarakat,

antar golongan, antar SARA (suku, agama, ras, adat) sesuai falsafah Sunda *silih asah, silih asih, dan silih asuh* ("*tata Lampah*")

2. Saat ini masyarakat kita sudah mengarah kepada masyarakat yang individualistic (aing-aingan), budaya gotong royong yang diwariskan nenek moyang, sudah hamper punah di tengah-tengah masyarakat. Sebagian masyarakat kita kadang hanya mementingkan dan membela golongan dan kelompoknya, karena pengaruh "wayah"/era globalisasi yang begitu kuat. Masalahnya sekarang bagaimana jaman/wayah itu di sikapi secara arif dan bijaksana oleh manusia itu sendiri (*Tata Wayah*).
3. Menata kembali hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitar (wilayah). Perkembangan "wayah" era globalisasi yang begitu cepat, telah menghantarkan manusia lupa akan jati dirinya sebagai manusia yang punya ketergantungan dengan alam dan lingkungannya (wilayah). Alam harus di posisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek yang harus dikuras seluruh isinya (*Nata Wilayah*).

Rekomendasi

- A. Melalui gelar budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat, kami ingin mengusulkan kepada panitia untuk menindak lanjuti pertemuan ini melalui “*Pembentukan forum masyarakat adat Indonesia*” dalam agenda kedepan, forum diharapkan mampu menyusun sebuah buku yang berisi nilai-nilai kepercayaan komunitas adat sebagai dasar/pijakan untuk pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa.

Melalui penyusunan sebuah buku tersebut, diharapkan dapat memberikan pelajaran dan pembentukan wawasan kebangsaan bagi generasi di masa yang akan datang, yang cinta dan menghormati budaya sendiri sebagai warisan dari nenek moyang.

- B. Terciptanya satu percontohan pembentukan/penjelmaan nilai-nilai kearifan local melalui pembangunan situs budaya local yang berbasis alam dan lingkungan di wilayah tertentu. Dengan istilah kami yaitu terciptanya “Desa Hutan” yang berbasis pada alam, dimana semua komunitas didalamnya mengembangkan nilai-nilai sumber daya alam sebagai kehidupan masyarakatnya.

Demikian, terima kasih

Kampung Naga, 21 Mei 2006

TRI TANGTU DI BUMI
TATA WILAYAH, TATA WAYAH, TATA LAMPAH

TATA WILAYAH

*Alam jeung lingkungan lain ruksakeun tapi rawateun jeung
rumateun*

Gunung – Kaian,

Gawir-Awian,

Pasir-Talunan

Datar-Sawahan

Legok-Balongan

Cinyusu-Rumateun

Situ-Uruseun

Telaga Rawateun

Segara-Piaraeun

TATA WAYAH

WANCI

1. Sandekala : Wates antara bereung jeung peuting (itungan poe dimimitian);

2. Sareupna : Waktu panon poe surup. Leu oge waktuna sakeudeung pisan. Waktu pindah tibeurang
3. Hareeum Beungeut : Waktu panon geus teu tembong ngan kari caangna di langit. Tatangkalan
4. Malem : Mimiti poek, biasana dipake nyebut poe seperti “malem Jumaah”,
5. Peuting : Waktu sapanjang euweuh caangna panon poe, rek keur caang bulan atawa poek bulan;
6. Tengah peuting : Nyae ta tengah-tengahna peuting
7. Janari Leutik : Antara tengah peuting jeung janari
8. janari : Wayah antara tengah peuting nepika rek meletek panonpoe anu diteruskan ku kongkorok hayam.
9. Corengcang Tihang : Mun caangna langit oge geus bias katempo ti jero imah, nimbus kana bilik atawa lamun di luar imah geus katingali rajegna tatangkalan ngelemeng hideung;
10. Balebat : Mun di langit geus mimit tembong aya mega kucaangna kusorotna panon poe anu rek meletek
11. Meletek panon poe : Lamun panon poe geus katembong semu bereum
12. Isuk-isuk : Lamun panon poe geus mimiti katembong di belah wetan
13. Haneut Moyan : Nyae ta dina waktu mimiti karasa haneut sorotna panon poe

14. Beurang : Nyaeta salita aya panon poe atawa caangna panonpoe
15. Pecat sawed : Nyaeta mun waktu digawe di sawah make munding sok ngeureunkeun gawena, kalayan sawedna dipecat/ dilesotkeun tina munding.
16. Tengah poe : Waktu panon pope ayana diluhureun urang atawa euweuh kalangkang anu kawetan atawa kalulon.
17. Lingsir : Mun panon poe geus ngeser ka kulon titengah poe.
Karasa panon poe keur papanasna:
18. Sore : Waktu antara lingsir jeung sariak laung
19. Sariak Layung : Waktu mega geus ganti warna, langit geus semu koneng maju ka beureum
20. Burit : Waktu mega geus beureum maju kahideung.
Tatangkalan ngan kari kelemengna harideung

Sanggeus Agama Islam nepi ka urang rajol ngaran alanyar : saur, Imsak, Subuh, Duha, Lohor, Asar, Magrib Isa jeung Tahajud

TATA LAMPAH

Tata lampah the hiji pancen keur makhluk nu dibere akan dina ngurus lembur, akur jeung dulur bari panceng dina galur. Ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara.

Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-nilai Adat Bikomi Untuk Pendidikan Budi pekerti dan karakter Bangsa.

Oleh : Yohanes Sanek

I. Pengantar

Tema yang disodorkan panitia ini sangat relevan dengan kondisi yang dialami oleh bangsa kita saat ini. Ketika negeri kita dilanda krisis multidimensi sejak tahun 1998 yang akhirnya melumpuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa, banyak pakar yang berpandangan bahwa factor utama yang menjadi penyebab adalah lunturnya moral bangsa yang bermuara pada krisis budaya. Dengan argumentasi yang demikian, dapat dipahami bahwa aspek moral sebagai “anak kandung” dari budaya (adat-istiadat) yang kian melemah telah memberikan kontribusinya secara signifikan dalam krisis dimaksud. Budaya ketimuran kita yang bervariasi – dari Sabang sampai Merauke termasuk Timor – sejak dahulu kala telah menyumbangkan warnanya tersendiri dalam membangun fondasi bangsa kita, namun dalam perkembangannya justru kita kalah oleh budaya luar yang menamakan dirinya globalisasi, kapitalisme dan lain sejenisnya.

Saya berpikir bahwa adat istiadat kita yang beragam tidak hanya dilestarikan dan dikembangkan sebatas wacana tetapi lebih dari itu aktualisasi dan revitalisasi nilai adat perlu digalang untuk menemukan dan menempatkan kembali cara berpikir, cara bertindak dan bertutur kata, serta cara berkarya bangsa kita secara benar dan tepat. Pada tataran yang paling umum dapat dipahami bahwa kelahiran dan perjalanan adat istiadat suatu komunitas tidak terlepas dari 3 (tiga) dimensi waktu yakni hari kemarin (*afi unu*), hari ini (*nenò ì*) dan hari esok (*meo nsine*). Pengalaman yang dialami *afi unu* merupakan referensi untuk merenung dan merefleksikan kehidupan di hari ini dan hari esok secara lebih baik. Cara berpikir, bertindak dan berkarya berdasarkan perpaduan ketiga dimensi waktu tersebut akan melahirkan sebuah nilai adat yang hidup, berkembang dan dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi orang Bikomi, masa lampau merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka sebab pelbagai hal yang diwariskan oleh leluhurnya menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan ritus. Ritus merupakan rutinitas yang senantiasa mewarnai kehidupan, sebab intervensi Sang Pencipta sangat menentukan setiap langkah hidup kita. Siklus hidup seperti lahir, kawin dan mati selalu diawali dengan doa/ritus adat. Demikian pula dalam segi-segi hidup lainnya, bercocok tanam, ucapan

syukur, memohon kekuatan dan kenyamanan, meminta hujan dan cuaca yang kondusif dan lain sebagainya selalu diadakan ritus.

Saya yakin, kita semua yang hadir pada saat ini sebagai representasi dari sekian banyak komunitas adat yang beragam, menginginkan masa depan bangsa kita yang lebih baik, lebih bermoral, tampil penuh etika dan lebih prospektif. Untuk itu, peran dari komunitas adat terutama para pemangku adat menjadi sangat urgen dalam membangun moral masyarakat sesuai nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sekilas Tentang Komunitas Adat Bikomi

Bikomi sebagai salah satu bekas wilayah kerajaan di Pulau Timor, secara geografis terletak di Kabupaten Timor Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur – berbatasan dengan distrik Ambeno Republik Demokratik Timor Leste. Kerajaan Bikomi adalah bagian dari suku Atoni yang sebagaimana besar penduduknya memiliki tipe negrito dengan cirri-ciri antara lain berkulit hitam dan berambut keriting. Nama kerajaan Bikomi diambil dari nama seorang putri raja yakni Komi Sanak. Dalam bahasa dawan, Bi merupakan panggilan kehormatan yang familiar bagi seorang perempuan sekaligus menunjukkan jenis kelamin kaum hawa. Menurut cerita/tutur lisan (*Nu'an*) Komi Sanak berubah wujud menjadi seekor buaya ketika ia sedang mandi di sebuah kolam. Dari kolam tersebut

terdengar suara sang putri menyebutkan bahwa rakyat dan wilayah kerajaan telah menemukan jati dirinya, karenanya nama Komi diabadikan sebagai nama kerajaan

Orang Bikomi telah mengenal dan tunduk pada Tuhan pencipta, jauh sebelum kedatangan agama-agama formal. Tuhan yang mereka sembah disebut *Apinat Aklahat, Amo 'et Apakaaet* (*Apinat* = yang bercahaya, *Aklahat* = Yang membara, *Amo 'e* = Yang menciptakan, *Apakaaet* = Yang menjadi indah, Yang mengukir). Dalam tradisi orang bikomi, hamper semua rangkaian kegiatannya didahului dengan upacara ritual adat. Berbagai Ritus yang dijalankan, diyakini dapat memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menapaki hidup sehari-hari.

II. Pandangan Orang Bikomi Tentang Alam Sekitar

Perpaduan antara makro kosmos dan mikro kosmos yang selaras diyakini akan menciptakan keseimbangan dan keharmonisan hidup yang nampak dalam tiga dimensi hubungan yakni keseimbangan hidup antara manusia dengan Tuhan pencipta, antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan antara manusia dan Tuhannya terjalin melalui berbagai ritus sedangkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam terwujud melalui berbagai kearifan tradisonal untuk melestarikan alam seperti hutan (*naes le 'u*) dan sumber air (Oe

le'u). Hubungan antar manusia diwujudkan dalam tata cara pergaulan social baik tingkah laku, tutur kata maupun cara memandang sesame sebagai aok bian (Aok = Badan, Bian = sebelah). Bagi orang Bikomi, setiap orang dijumpai siapapun dia, adalah bagian dari tubuhnya sendiri yang harus dipelihara, disayangi dan dihormati. Sesama manusia, sekalipun tidak saling mengenal ia dianggap sebagian sahabat, saudara dan menjadi bagian dari tubuh kita.

Fenomena alam yang dijumpai oleh masyarakat Bikomi dalam kehidupan sehari-hari mengandung arti dan makna tersendiri. Sebagai contoh, dua buah bangunan sonaf (rumah adat) yang posisinya menghadap bagian timur dan barat, mengandung makna filosofis bahwa setiap manusia akan datang dan pergi pada saatnya. Ada saatnya kita lahir yang ditandai dengan terbitnya matahari di ufuk timur (manse Saen), ada pula saat kita akan kembali ke tempat asal yang gelap (mis okan) dimaknai dengan terbenamnya matahari ditelan kegelapan malam di bagian barat (Manse mofon). Fenomena seperti ini mengajarkan kepada kita untuk mengisi setiap ruang hidup dengan hal-hal yang bermanfaat.

III. Nilai-nilai Adat Bikomi Untuk Membangun Budi Pekerti dan Karakter Bangsa.

Berangkat dari pola dan cara pandang orang Bikomi

terhadap alam sekitar serta tri relasi yang telah dikemukakan, pada kesempatan ini dapat saya paparkan beberapa nilai adat yang dianut oleh komunitas Bikomi yang cukup relevan dalam upaya penguatan dan pendidikan budi pekerti serta karakter bangsa. Sesungguhnya nilai-nilai hidup seperti kebaikan, kebenaran, kejujuran, kesopanan, rasa hormat dan lain sejenisnya adalah nilai adat yang berlaku universal. Setiap komunitas adat termasuk kita semua yang hadir di sini tentu memiliki nilai adat yang hamper sama, hanya saja cara pandangnya yang sedikit berbeda.

Dalam tataran hubungan antara manusia dengan *Apinat Aklahat Amo'et Apakaet* (Tuhan pencipta sumber kekuatan), orang Bikomi berupaya menjalin hubungan yang harmonis agar jauh dari bahaya dan malapetaka. Oleh karenanya, tempat-tempat melakukan ritual adat tetap lestari karena diyakini memiliki kekuatan nan sacral – suci (*Le'u*). Hubungan ini menjadi dasar pijakan bagi manusia untuk melangsungkan hubungannya dengan sesame dan alam. *Apinat Aklahat – Amo'et Apakaet* menciptakan semua manusia sama tiada perbedaan (kecuali perbedaan fisik), menciptakan alam sebagai teman yang saling membutuhkan dan saling tergantung.

Hubungan antara manusia dengan alam terjalin dalam kearifan-kearifan tradisional seperti *tal Oe le'u* (pelestarian sumber

air keramat) dan *naes le'u* (hutan keramat). Oe le'u merupakan salah satu sumber kebutuhan manusia yang paling vital untuk kebutuhan hidup manusia, ternak dan juga untuk kepentingan pertanian. Biasanya, dilakukan ritual di Oe le'u untuk meminta kekuatan dan berkat agar usaha peternakan sukses, jauh dari penyakit dan bahaya lainnya. Mungkin kepercayaan adat seperti ini yang telah mengantarkan Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi gudang ternak di NTT dan di Indonesia. Harian Kompas awal Mei 2006, menyentil Provinsi NTT sebagai gudang ternak pada era 1970-an, yang sentralnya berada di wilayah TTU. Namun kondisi tersebut semakin surut karena persaingan yang tidak sehat dan kurang ditunjang dengan manajemen pemerintah yang memadai.

Hubungan antar manusia terjalin lewat pola pergaulan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai adat yang dianut. Cara pandang orang Bikomi terhadap sesamanya sebagai *aok bian* adalah cermin bagi setiap manusia untuk selalu hidup berdampingan secara damai, rukun dan saling menghargai satu sama lain. Sesama bukan sekedar sebagai sahabat dan saudara tetapi merupakan bagian dari darah dan dagingnya sendiri. Makna *Aok bian* sungguh mendalam untuk memberi arti bagi seorang manusia. Eksistensi sesama manusia sebagai *aok bian* senantiasa ditempatkan sederajat dengan pihak yang memandangnya.

Salah satu tradisi suku atoni pada umumnya yang masih berlangsung hingga kini dalam kerangka saling menghormati adalah *Tmaloe*, Tmaloe adalah ekspresi saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain dengan saling memberikan sirih-pinang-kapur lalu malam bersama. Apabila secara kebetulan dua individu berpapasan atau bertemu di suatu tempat, kedua pihak tersebut akan saling memberi dan menerima sirih pinang. Tradisi *take and give* yang demikian menjadi salah satu pilar utama dalam penguatan dan pendidikan budi pekerti. Saling memberi dan menerima sirih pinang adalah symbol yang sangat sederhana untuk memaknai sesame manusia sebagai bagian dari hidup kita. Dia adalah bagian dari hidup saya dan sebaliknya, saya adalah bagian dari dia. Sikap saling menerima satu sama lain sebagai manusia yang sama merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya penguatan budi pekerti dan karakter bangsa yang bermuara pada perdamaian.

Bila kita hendak mengundang orang untuk menghadiri sebuah pesta, undangan tersebut akan menjadi terhormat bila pihak yang mengundang datang membawa kabi (tempat sirih pinang yang terbuat dari anyaman daun lontar). Pihak yang diundang merasa mendapat tempat terhormat melalui sirih pinang yang disodorkan, sebab sirih pinang merupakan symbol persahabatan dan persaudaraan yang mengutamakan kasih sayang dan

penghormatan. Sebaliknya jika mengundang dengan memberikan kartu undangan, pihak yang diundang akan beranggapan dirinya bukan sebagai sahabat dan saudara tetapi sebagai orang asing yang diundang.

Beberapa nilai adat yang menopang pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa dalam rangka menegakkan perdamaian antara lain:

1. *Laes nekaf mese ansaof mese* yaitu kesadaran manusia untuk menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan antar umat manusia. Dengan persatuan, tidak ada beban yang terasa berat, karena persatuan mengandung makna kekuatan yang tidak tercerai-beraikan. Nilai adat ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya hidup bersatu dan selalu berada dalam kebersamaan. Secara harafiah, *ansaof mese* berarti satu hati, sedangkan *nekaf mese* berarti satu perasaan.
2. *Laes manekat ma tmamnaun tukam tuk* artinya kesadaran manusia untuk saling mengasihi dan saling membantu satu sama lain mengingat eksistensi manusia yang penuh dengan keterbatasan. Manusia tidak hidup sendiri, tetapi sebagai makhluk social ia sangat membutuhkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya.

3. *Lasi mtaus neo amnasit* yaitu ajaran bagi seorang anak untuk selalu menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Orang tua diyakini sebagai utusan Tuhan di dunia bagi anak. Di samping itu pula, ajaran ini menekankan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, siapa pun dia.
4. *Laes helak bata* yakni tradisi yang mengajarkan pentingnya perdamaian dan mengakhiri konflik atau permusuhan yang diwariskan oleh para leluhur. Dengan adanya bata, keturunan dari kedua yang betikai tidak boleh saling berinteraksi, apalagi menjalin hubungan perkawinan, sebab para leluhur telah bersumpah untuk tidak mengakhiri permusuhan. Untuk itu, generasi selanjutnya menyadari bahwa permusuhan yang ditinggalkan oleh nenek moyang sama sekali tidak membawa faedah, sehingga perlu diakhiri dengan upacara adat *helak bata*. Helak bata mengakhiri permusuhan tanpa mencari tau titik-titik simpul penyebab perselisihan. Siapa yang memulai permusuhan, siapa yang salah tidak penting bahkan tidak boleh dibahas, yang penting adalah berdamai satu sama lain lalu saling menerima sebagai saudara.
5. *Laes Makisot* yaitu kesadaran sebagai makhluk social untuk saling mengunjungi satu sama lain. Dengan saling berkunjung

kita dapat mengetahui kondisi bahkan permasalahan yang dihadapi oleh sesama yang kita kunjungi.

Nilai-nilai adat tersebut adalah bagian dari tatanan nilai adat Bikomi yang relevan dalam upaya penguatan pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa kita. Bagi komunitas adat Bikomi, melakukan perbuatan yang tidak baik atau tercela (*Laes amleof*) adalah perbuatan yang melanggar adat. Diyakini orang yang bersikap tidak baik seperti merusak hutan, berzina, mencuri dan lain sejenisnya akan mendapat hukuman dari *Uis neon, uis pah*. Perbuatan-perbuatan tercela dimaksud adalah *le'u* (dapat berarti pamali, keramat) yang harus dihindari. Karenanya, setiap orang Bikomi dituntut untuk sedapat mungkin menjunjung tinggi nilai-nilai social masyarakat, menghormati alam sebagai tempat mencari nafkah, dan tunduk pada Uis neon sebagai Pencipta-sumber kekuatan. Aktualisasi dan revitalisasi nilai adat dimaksud sangat penting dalam upaya membangun perdamaian manusia dengan sikap saling menerima dan saling memberi.

IV. Penutup

Demikian beberapa hal yang dapat kami paparkan, mudah-mudahan materi ini dapat memberikan manfaat bagi perdamaian umat manusia terutama bangsa Indonesia. Diharapkan pula, dapat membawa manfaat bagi aneka komunitas adat nusantara yang berbeda-beda cara dan jalan tapi satu dalam misi dan tujuan. Akhirnya saya ucapkan limpah terima kasih atas perhatian bapak/ibu sekaligus permohonan maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan.

**NILAI-NILAI ASAS JATIDIRI MELAYU
SEBAGAI PEREKAT KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Oleh: Tenas Effendy

I. PENDAHULUAN

Ungkapan adat Melayu mengatakan: “*hidup serumah beramah tamah, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sekampung tolong menolong, hidup senegeri beri memberi, hidup sebangsa bertenggangrasa*”. Ungkapan ini mencerminkan nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu yang mengutamakan kehidupan yang rukun dan damai, aman dan sejahtera, saling hormat menghormati, tolong menolong dan bertenggangrasa. Ungkapan lain menegaskan: “*adat sedusun bersopan santun, adat sedesa rasa merasa, adat senegeri bertanam budi, adat sebangsa seiya sekata*”, yang intinya mengajarkan kehidupan yang santun, berbudi pekerti terpuji dan menjunjung tinggi asas kebersamaan yang adil dan merata.

Pemuka-pemuka adat Melayu selalu mengingatkan, bahwa tegaknya tuah dan marwah, harkat dan martabat sesuatu kaum dan bangsa berpunca dari asas kebersamaan yang disebut:

“senasib sepenanggungan, seaib dan semalu” serta kesadaran semua pihak untuk mengekalkan musyawarah dan mufakat. Di dalam ungkapan adat dikatakan: *“mulia kerja karena bersama, mulia niat karena mufakat”* atau dikatakan: *“elok kerja karena bersama, elok niat karena mufakat”*. Asas inilah yang menyebabkan kebersamaan melalui musyawarah dan mufakat menjadi landasan dalam mengambil keputusan, merancang dan melaksanakan kegiatan dalam kehidupan berumahtangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, adat Melayu mengajarkan sifat terbuka dan berbaik sangka kepada sesama makhluk. Asas ini dituangkan kedalam ungkapan adat yang mengatakan: *“apabila hidup hendak terpuji, buka kulit tampaklah isi, kalau hidup hendak sejahtera, sesama makhluk berbaik sangka”*. Ungkapan lain menegaskan: *“apabila hati selalu terbuka, hilanglah segala sak dan sangka”* atau dikatakan: *“apabila selalu bersangka baik, tuah tegak marwah pun naik”*. Selanjutnya dikatakan: *“adat hidup berbilang suku, jauhkan sifat seteru berseteru; adat hidup berbilang bangsa jauhkan sifat berburuk sangka”*, yang intinya mengingatkan untuk selalu berbaik sangka dan menjauhkan perilaku yang tidak terpuji.

Ungkapan-ungkapan di atas hakikatnya adalah cerminan dari adat dan budaya Melayu yang terbuka, santun dan penuh

tenggangrasa. Nilai-nilai inilah yang menjadi jatidiri Melayu, yang disimpai dan dilandasi oleh agama Islam yang dianut oleh orang-orang Melayu.

Sejarah Riau membuktikan, dengan nilai-nilai asas di atas, terwujudlah masyarakat Melayu yang majemuk dengan latar belakang adat dan budaya yang majemuk pula. Kemajemukan ini menjadi kekuatan Melayu dalam menghadapi cabaran zaman, menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis, aman, damai dan sejahtera.

Sejarah juga membuktikan sejak berbilang abad yang silam, telah terjadi perbauran tali darah antar suku dan puak di Riau. Mereka hidup dalam kebersamaan, berpadu melalui tali perkawinan, serta melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki darah campuran dari berbagai suku dan puak. Bahkan, pahlawan nasional dari Riau seperti Raja Haji Syahid Fi Sabilillah, adalah putera Melayu percampuran Bugis dan Melayu Riau. Sultan Syarif Kasim II adalah percampuran Arab dengan Melayu Riau dan sebagainya. Bahkan berjayanya kerajaan-kerajaan Melayu di Riau hakikatnya adalah atas bantuan dari berbagai suku dan puak. Misalnya, kerajaan Siak Sri Indrapura berjaya karena awalnya dibantu oleh Minangkabau, kemudian oleh Sayed Osman al Shahab dari Arab. Kerajaan Indragiri, Pelalawan, Rokan berjaya dengan bantuan Sultan Melaka, kerajaan Riau Lingga berjaya

dengan bantuan Bugis. Kerajaan-kerajaan Melayu ini umumnya mempunyai hubungan yang serasi dengan raja-raja di luar Riau, seperti kesultanan Pontianak, Jambi, Palembang, Solo dan Yogyakarta, termasuk kerajaan-kerajaan Melayu di Tanah Semenanjung (Malaysia) seperti Johor, Perak, Kedah, Negeri Sembilan dan sebagainya.

Dan sejarah menunjukkan hubungan itu tetap kekal hingga kerajaan itu berakhir, dan kesultanan di Riau dengan ikhlas dan penuh kesadaran menyatakan meleburkan dirinya kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpaduan dan persebatian antar kelompok suku dan puak di Riau tercermin pula dari perjuangan rakyat Riau untuk membentuk Provinsi Riau melalui Kongres Rakyat Riau I yang dilaksanakan Desember 1954 sampai Januari 1955 yang didukung oleh semua komponen masyarakat Riau yang ada pada waktu itu. Dan sejak itu, di Riau semakin banyak pendatang dari berbagai suku dan puak dari seluruh penjuru tanah air. Mereka hidup secara rukun dan damai.

Sekarang, di Riau terdapat sekitar 33 Paguyuban dari berbagai suku dan puak di tanah air, mulai dari Persatuan Masyarakat Aceh sampai kepada Persatuan masyarakat dari Papua dan Ambon. Semua paguyuban itu berpadu satu dalam

organisasi yang dinamakan Forum Kesatuan Masyarakat Riau (FORKESMAR). Dengan adanya forum ini, berbagai permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, sehingga tidak terjadi benturan antar suku dan puak di Riau. Kalaupun ada benturan-benturan kecil, secara arif diselesaikan melalui musyawarah mufakat kekeluargaan dari pimpinan paguyuban dimaksud.

Pengalaman ini memberi petunjuk, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dapat dibina, dirajut dan dikekalkan melalaui nilai-nilai asas adat dan budaya daerah yang sarat dengan kearifan dan kebijakan. Dengan demikian, falsafah Bhinneka Tunggal Ika akan wujud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang zaman. Perbedaan suku dan puak, akan menjadi kekayaan bersama, dan menjadikan kebudayaan bangsa sebagai budaya pelangi yang warna warni, atau bagaikan taman bunga budaya yang kemilau dengan corak raginya. Melalui keberagaman yang dilandasi oleh kebersamaan itulah, ke depan, permasalahan bangsa ini dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana, sehingga keberagaman suku dan puak, budaya dan adat istiadat itu menjadi rahmat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masa kini, kita hidup dalam kemajemukan yang lebih luas, hidup dalam alam yang lebih bervariasi dengan berbilang puak

dan sukubangsa, dengan beragam nilai budaya dan agama, baik sama sebangsa maupun dengan bangsa-bangsa asing. Kondisi ini tentulah membuka peluang terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai adat dan budaya, atau bahkan dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang meretakkan hubungan antara sesama sebangsa atau bahkan tidak mustahil akan dapat “mengancam” keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cabaran ini tentulah perlu disimak dengan arif, disikapi dengan dada lapang dan fikiran luas, agar dapat menghadapinya secara arif dan bijak pula. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian semua pihak untuk tetap dan terus menerus memelihara nilai-nilai asas jatidiri bangsa yang hakikatnya adalah nilai-nilai luhur adat dan budaya sebagai perekat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dimiliki oleh semua suku dan puak yang ada di bumi tercinta ini.

II. NILAI-NILAI ASAS JATIDIRI MELAYU YANG DAPAT DIJADIKAN PEREKAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.

Diantara nilai-nilai asas budaya Melayu yang menjadi jatidiri kemelayuan orang Melayu sejak turun temurun adalah:

1. Nilai Keterbukaan

Budaya Melayu adalah budaya “bahari”, yang juga disebut sebagai budaya “maritime”. Kehidupan kelautan yang berabad-abad mereka tempuh, menyebabkan kebudayaan ini menjadi sangat terbuka. Beragam puak dan sukubangsa mendatangi daerah Melayu, kemudian berbaur dan berintegrasi turun temurun, sehingga melahirkan masyarakat Melayu yang majemuk. Dari keberagaman sukubangsa dan puak itu serta beragam kontak-kontak budaya dengan berbilang bangsa, lambat laun membentuk kebudayaan Melayu yang majemuk pula.

Kemajemukan ini menyebabkan masyarakat Melayu selalu terbuka kepada semua pihak yang datang, yang kemudian berbaur dan melebur dalam alam Melayu. Melalui keterbukaan itulah orang-orang Melayu selalu menerima siapa saja yang datang kedaerahnya, yang mereka sambut dengan “muka yang jernih” dan “hati yang lapang”, kemudian

mempersilakannya untuk hidup dan berusaha, serta memberikan peluang untuk menetap dan berketurunan. Jalinan hubungan mesra inilah yang selalu bermuara kepada ikatan perkawinan sehingga wujudlah kekerabatan yang kekal. Selain itu, adat Melayu memberi peluang kepada siapa saja yang ikhlas untuk mengikat tali persaudaraan melalui upacara adat yang disebut “begito”, yakni mengaku bersaudara dunia akhirat.

Sejarah Riau mencatat, dari keterbukaan itu pula wujudnya pemimpin pemimpin Melayu yang berasal dari luar. Misalnya, Sultan Siak sejak abad ke 18 bercampur dengan Arab, sehingga membentuk dinasti Sultan-sultan keturunan Arab sampai kepada sultan terakhir, yakni Sultan Syarif Kasim II yang kemudian diangkat sebagai pahlawan Nasional.

Selanjutnya, Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dari kerajaan Riau Johor mengangkat bangsawan Bugis Daeng Marewah menjadi Yang Dipertuan Riau I (1722 M) di Bintan. Keturunan beliau ini melahirkan Raja Haji Syahid Fi Sabilillah yang juga diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Dan salah seorang keturunannya adalah Raja Ali Haji, pujangga Melayu yang handal, yang menulis berbagai buku tentang khasanah budaya Melayu, diantaranya “Gurindam Dua Belas”, dan “Kitab Tatabahasa Melayu”, sehingga kemudian bahasa

Melayu diajadian bahasa persatuan Indonesia.

Prilaku keterbukaan ini pula yang menyebabkan raja-raja dari kerajaan Rokan (Tambusai, Dalu-dalu, Kepenuhan, Rambah, Rokan IV Koto) secara ikhlas menerima masyarakat dari Tapanuli (Mandailing dan Batak) untuk bermukim di wilayah kerajaannya, serta diberikan kawasan pemukiman dan usaha turun temurun hingga saat ini.

Perlakuan yang sama diberlakukan terhadap pendatang dari Jawa, Minangkabau, dan sebagainya, sehingga lambat laun masyarakat Melayu Riau menjadi semakin majemuk, namun hidup dalam kerukunan yang nyaman.

Pembauran suku yang terjadi pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura, dapat dibuktikan dari naskah kuno “Bab Al-Qawaid” (Pintu segala Pegangan), yakni kitab Undang-Undang Kerajaan Siak Sri Inderapura, khususnya Bab yang Kedua Puluh, disebutkan :

Alib : Suku Tanah Datar dari anak bumipun ada sukunya dari orang Minangkabu yang mana luwak Tanah Datar di Minangkabau yang datang ke Siak Sri Indrapura serta jajahan takluknya jadi suku Tanah Datar.

Ba : Suku Lima Puluh dari anak bumipun ada sukunya dari orang Minangkabaupun ada, yang mana luwak Lima

Puluh di Minangkabau yang datang ke Siak Sri Indrapura serta jajahan takluknya jadi suku Lima Puluh.

Ta : Suku Pesisir dari anak bumipun ada sukunya dari orang Minangkabau yang mana luwak Agam Pesisir di Minangkabau yang datang ke Siak Sri Indrapura serta jajahan takluknya jadi suku Pesisir.

Sa : Suku Kampar dari anak bumipun ada sukunya dan mana negeri kampar yang tiada bekerja yaitu orang besar sahaja kepala negeri itu yakni orang lima Koto dan orang Koto Baru yang mana datang ke Siak Sri Indrapura serta jajahan takluknya jadi suku Kampar.

Jim : Suku Hamba Raja Dalam dari anak bumipun ada sukunya dari orang dagang dari mana-mana negeri yang ada beraja dari negeri kampar Kiri, negeri Kampar Kanan, negeri Rokan Kiri, negeri Rokan Kanan, negeri Kota Intan, Negeri Tambusai, negeri Kepenuhan, negeri Rambah, dan dari Jawa dan Siam dan Keling dan Batak datang ke Siak Sri Indrapura serta jajahan taluknya jadi suku Hamba Raja Dalam.

Dan lagi adalah yang dinamakan Hamba Raja Dalam itu ada, asalnya datang dari empat suku dan ada asalnya

datang dari Hamba Raja Empat Suku dan adakalanya datang dari lain suku. Maka apabila sudah terang masanya menjadi Hamba Raja Dalam juga sampai turun temurun jadi Hamba Raja Dalam sebelah ibunya.

.....

.....

(dikutip dari buku “Bab Al-Qawa’id” (1901 M); transliterasi dan Analisis, OK Nizami Jamil dkk, Bappeda Kabupaten Siak 2002, hal. 74-75).

Terjadinya persebatian antar masyarakat pendatang dengan penduduk tempatan tentu saja tidak terlepas dari perilaku semua pihak. Yang datang tahu diri demikian pula yang tempatan. Asas hidup “*dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung, dimana air disauk disana rantijng dipatah*” dahulu memang ditaati oleh semua orang. Asas ini sebagai perwujudan tahu diri menyebabkan jarak antara pendatang dengan penduduk tempatan semakin mengecil, dan akhirnya melebur dalam satu kesatuan yang utuh dan kental.

Keterbukaan budaya Melayu selalu dikawal dengan asas kearifan semua pihak. Petuah orangtua-tua yang mengatakan “*pantang mengorang-orang di kampong*

orang; pantang menghulu-hulu dikampung penghulu; pantang meraja-raja di kampung raja” merupakan maklumat yang ditaati. Demikian pula dengan asas :*”mengambil hak awak berunding sesama awak; mengambil hak orang berunding dengan orang”*, mewujudkan rasa kearifan untuk saling menjaga hak masing-masing.

Terhadap masyarakat tempatan, adat mengingatkan untuk menjaga pelihara diri dan kampung halamannya secara seksama, agar dapat meunjukkan kepada pihak lain tentang hak dan tanggungjawabnya. Ungkapan data mengatakan : *rumah dijaga dengan amanah, kampung dijaga dengan marwah, dusun dijaga dengan kaidah, negeri dijaga dengan petuah”*. Petuah ini dianggap penting agar orang tidak berbuat semena-mena dan tidak menganggap kawasan itu sebagai kawasan *“tidak bertuan”*. Ungkapan adat mengatakan : *“bila halaman tidak berpagar, bila rumah tidak berinding, angin lalu tempias lalu, aib terdedah malu tersimbah”*.

2. Nilai keislaman

Budaya Melayu adalah budaya yang menyatu dengan

ajaran agama Islam. Nilai keislaman menjadi acuan dasar budaya Melayu. Karenanya, budaya Melayu tidak dapat dipisahkan dari Islam, sebagaimana tercermin dari ungkapan adat : *“Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah”*, *syarak mengata adat memakai”*, *syah kata syarak, benar kata adat”*, *bila bertikai adat dengan syarak, tegakkan syarak”*, dan sebagainya.

Namun demikian, tidaklah bermakna bahwa budaya Melayu menolak masyarakat yang tidak satu akidah, bahkan sebaliknya menganjurkan untuk hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling bertenggang rasa, tolong menolong dan seterusnya. Nilai inilah yang sejak dahulu mampu mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di bumi Melayu.

Ungkapan adat mengatakan : *“adat hidup berbilang bangsa, pantang sekali hina menghina, pantang pula cerca mencerca”* Selanjutnya dikatakan *“adat hidup berlain akidah, sama bijak menjaga lidah, sama arif memelihara langkah, sama bijak mengatur tingkah”* yang intinya mengingatkan agar perbedaan agama haruslah disikapi dengan arif dan bijak, serta dengan perilaku yang saling hormat menghormati.

3. Nilai “*Senenek dan semoyang*”

Nilai ini mengajarkan orang untuk merasa seasal dan seketurunan, yakni sama-sama anak cucu Adam. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, menyadarkan orang akan kesamaan nenek moyangnya yakni berasal dari Rumpun Melayu yang satu (baik Proto Melayu maupun Deutro Melayu). Nilai ini mampu menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam arti luas, sebagai simpai pengikat persebatian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ungkapan pantun adat mengatakan : “*ketuku batang ketakal, kedua batang keladi muyang, sesuku kita seasal, senenek kita semoyang*” Selanjutnya dijelaskan : “*tanda merasa senenek semoyang, duduk bersama berkasih sayang, tegak beramai tenggang menenggang*”, Orangtua-tua memberi petuah : “*tanda Melayu sama serumpun, dalam bercakap bersopan santun, dalam susah tuntun menuntun, dalam senang santun menyantun*”, Petuah lain mengatakan “*tanda orang sama seasal, sakit senang kenal mengenal; jauh dekat ingat mengingat; elok buruk jenguk menjenguk; sempit lapang jelang menjelang; tua muda jaga menjaga*”.

4. *Nilai “Seaib dan semalu”.*

Nilai saling memelihara hubungan antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Nilai ini mengajarkan dan menyadarkan orang agar hidup saling menjaga pelihara hubungan baik, saling menjaga marwah, saling menjaga agar tidak melanggar “*pantang larang*,” yang terdapat di dalam setiap suku dan puak, saling menjaga agar tidak ada perilaku hujat menghujat, maki memaki, caci mencaci, fitnah memfitnah dan sebagainya yang dapat menimbulkan aib malu bagi orang maupun dirinya sendiri, atau dapat menimbulkan pertikaian dan perpecahan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ungkapan adat mengatakan :”*tanda hidup seaib semalu, yang buruk sama dibuang, yang keruh sama dijernihkan, yang kusut sama diselesaikan; salah besar diperkecil, salah kecil dihabisi*”. Selanjutnya dikatakan :”*aib jangan dibendangkan, malu jangan diperagakan*”. Ungkapan lain menyebutkan : “*aib jangan didedahkan, malu jangan disingkapkan*” atau dikatakan: “*aib orang jangan dibilang, aib diri yang kita kaji*”.

5. *Nilai “Senasib sepenanggungan”.*

Nilai menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial untuk saling tolong menolong, bantu membantu, ingat mengingat dalam

kehidupan sehari-hari. Dari sisi lain, nilai ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan menjauhkan perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan. Dengan demikian, nilai ini dapat meredam tumbuhnya kesenjangan sosial, dapat menjauhkan kecemburuan sosial baik antar sesama anggota masyarakat maupun antar suku dan etnis dan dapat pula mengikis sifat dengki dan iri mengiri, sifat mau menang sendiri, sehingga dapat mewujudkan tali persaudaraan yang kental.

Ungkapan adat mengatakan :”*tanda senasib sepenananggungan, bila ke laut sama basah, bila ke darat sama berkereng, bila berezki sama berbagi, bila malang sama berhutang*” atau dikatakan: “*adat senasib sepenanggungan dalam sempit sama berhimpit, dalam lapang sama melenggang*” Orangtua-tua mengingatkan pula :”*bertuah bangsa seiya sekata, bertuah negeri bersatu hati*”.

6. Nilai “*Seanak sekemanakan*”

Nilai ini mengajarkan orang untuk merasa bertanggungjawab terhadap setiap anggota masyarakat tanpa memandang asal suku, keturunan dan sebagainya. Asas “*seanak ssekemanakan*” menganjurkan orang untuk peduli terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya, agar saling

nasehat menasehati, tegur menegur untuk kebaikan dan kebajikan bersama. Nilai ini dapat menumbuhkan rasa keadilan, serta dapat memberikan perlindungan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat.

Di dalam ungkapan adat dikatakan :” *adat seanak sekemenakan, yang anak sama dipinak, yang kemenakan sama dibela, yang jauh diperdekat, menyalah diberi ingat, yang terlanjur sama ditegur, yang bengkok sama diluruskan*”.Orangtua-tua memberi petuah : “*tanda seanak sekemenakan, seayun langkah seiring jalan*”

7. Nilai “Seinduk dan sebahasa, senenek dan semamak”

Nilai ini mengajarkan agar setiap orang saling menghormati para pemimpin, tokoh dan tetua-tetua dari setiap kelompok masyarakat. Kebersamaan pandangan ini dapat mewujudkan kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan, dapat melakukan musyawarah mencari mufakat, dan dapat menghilangkan rasa kesukuan yang sempit.

Ungkapan adat mengatakan :”*tanda seinduk dan sebahasa, menyanggah tidak mencerca, bercakap tidak menista*” atau dikatakan: “*tanda orang senenek semamak, petuah diingat amanah disimak, seiya sekata duduk dan*

tegak". Ungkapan lain mengatakan :"*yang tua sama dipercaya, yang muda sama dipelihara*" atau dikatakan :"*yang sudah dituakan orang, cakupnya sama dipegang, petuahnya sama dikenang*". Ungkapan ini memberi petunjuk bahwa siapapun orang yang sudah "*dituakan*" (dijadikan pemimpin) oleh masing-masing suku dan puak cakupnya harus didengar dan dihormati, serta dihormati menurut alur dan patutnya

8. Nilai "*Seadat sepusaka, sepucuk setali darah*"

Nilai ini mengajarkan untuk saling mengkaji asas-asas nilai adat dan budaya yang memiliki *kesamaan*, kemudian menjadikannya sebagai simpai pengikat, dijadikan benang penghubung, dijadikan acuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui kesamaan nilai-nilai luhur adat dan budaya itulah ditumbuhkan rasa persaudaraan yang kekal, yang dapat mewujudkan terjalinnya hubungan tali darah atau tali persaudaraan yang kental

Ungkapan adat mengatakan :"*Walaupun lain padang lain belalang. lain lubuk lain ikannya, namun yang belalang tetaplah belalang, yang ikan tetaplah ikan, dalam berbeda banyak samanya*" Selanjutnya dikatakan :"*Yang belalang sama ketiingnya, yang ikan sama insangnya*" Orangtua tua

mengingatkan :” *Walaupun corak kain beragam, yang benangnya sama juga*” atau dikatakan:” *berguna kain bukan karena raginya, tetapi karena benang yang sama*”

Orang tua-tua Melayu memberi petuah :”*untuk menyelesaikan masalah cari puncanya; untuk menyelesaikan sengketa, cari simpulnya; untuk menyatukan orang, cari kesamaannya; untuk mengekalkan persaudaraan, cari simpai pengikatnya*” Selanjutnya dikatakan : “*Apabila kusut hendak selesai, keruh hendak dijernihkan, cari tempat tegak yang sama, jangan cari perbedaannya; atau dikatakan “untuk memelihara silaturahmi, mana yang sama dijadikan tali, perbedaan pendapat kita hormati*” Para tetua masa silam memahami benar bagaimana mencari kesamaan antar suku dan bangsa. Mereka mengatakan unsur-unsur kesamaan itu terdapat pada hati nurani, pada nilai-nilai asas kemanusiaan yang universal. Misalnya. “*pantang ikan kekeringan, pantang manusia kehinaan*”; atau dikatakan :”*pantang tua dilangkahi, pantang muda dipelesi*’, atau dikatakan “*pantang jantan dipermalukan, pantang perempuan dihinakan*” atau dikatakan : “*pantang mamak diperbudak, pantang kemenakan disia-siakan*”

9. Nilai “Sesampan dan sehaluan”

Nilai ini menyadarkan orang tentang kehidupan berbangsa

dan bernegara, agar mereka turut menyelamatkan, memelihara, bangsa dan negaranya, kemudian menyatukan visi dan misinya dalam pembangunan hari depannya. Nilai ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi, menyuburkan rasa kesetiakawanan sosial, mengekalkan rasa patriotisme serta menjauhkan orang dari perilaku yang dapat memecah belah bangsa dan negaranya. Budaya Melayu selalu mengibaratkan kerajaan, negara bagaikan sebuah sampan, perahu atau bahtera yang besar yang didalamnya hidup rakyat dengan nakhoda sebagai pemimpinnya. Sampan, bahtera atau perahu, atau lancang itu akan berlayar dengan selamat apabila seluruh awaknya dapat menjalin kebersamaan, menyatukan tujuan dan cita-citanya. Selanjutnya sang nakhoda sebagai pemimpin haruslah mampu mengendalikan arahnya secara baik dan benar agar tujuan bersama dapat wujud dengan sebaik-baiknya.

Ungkapan adat mengatakan :*"Adat sesampan satu haluan, adat berlayar satu kemudi, adat memerintah satu titah, adat memimpin satu petuah"*. Selanjutnya dikatakan :*"elok berkayuh sama merengkuh, elok berdayung sama sealun, elok berjalan sama pedoman, elok berlayar sama tujuan"*.

10. Nilai "*Mendapat sama berlaba, hilang sama merugi*".

Nilai ini mengajarkan orang agar menjunjung tinggi keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, atau dalam

memanfaatkan SDA dan sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan ekonomi dan sebagainya, hendaklah mengacu kepada asas keadilan dan pemerataan, serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyatnya. Nilai ini mengajar orang untuk tidak bersifat serakah, untuk tidak mencari keuntungan bagi diri atau kelompok sendiri saja, tetapi mengutamakan kebersamaan dan pemerataan yang adil. Dari sisi lain, nilai ini menyiratkan agar menjauhkan monopoli, menjauhkan kebijakan dan usaha yang dapat merusak ekonomi bangsa dan negara, Nilai ini juga memberi petunjuk, agar apapun peluang yang ada, apapun kebijakan yang dibuat, hendaklah memberikan sebesar-besar manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan apapun permasalahan yang timbul, haruslah menjadi tanggungjawab bersama untuk mengatasi dan menyelesaikannya.

Ungkapan adat mengatakan: *“makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan”*. Orangtua-tua mengingatkan: *“makan jangan kenyang seorang”* atau dikatakan: *“mencari laba berhingga hingga, mencari untung berhitung-hitung”* atau dikatakan: *“harta jangan membawa buta, pangkat jangan membawa sesat, kerja jangan membawa bencana”* Selanjutnya diingatkan lagi: *“adat makan jangan menyetan, adat berusaha jangan aniaya, adat berniaga janganlah loba”*

11. Nilai “Menegakkan marwah dalam musyawarah, menegakkan daulat dalam mufakat”

Nilai mengajarkan orang agar mengutamakan musyawarah dan mufakat, baik merancang sesuatu maupun menyelesaikan permasalahan yang timbul. Nilai ini mengingatkan pula bahwa marwah dan tuah, harkat dan martabat, daulat dan harga diri akan terpancar di dalam mewujudkan musyawarah dan mufakat. Asas musyawarah dan mufakat sebagai asas utama dalam adat hendaklah dijadikan acuan dan landasan dalam kehidupan sehari-hari, agar rasa kebersamaan, saling hormat menghormati, saling isi mengisi, saling menunjuk ajari dapat berlansung dengan sebaik-baiknya.

Ungkapan adat mengatakan :”*Di dalam musyawarah banyak faedah; di dalam mufakat banyak manfaat; atau dikatakan :”Duduk musyawarah membawa berkah, duduk mufakat membawa rahmat”*. Ungkapan lain mengatakn :” *Di dalam musyawarah dan mufakat itulah yang kusut diselesaikan, yang keruh dijernihkan, yang berbongkol sama ditarah, yang kesat sama diampelas, yang bengkok diluruskan, yang menyalah dibetulkan”*, Orangtua-tua mengingatkan:” *Sempurna kerja karena bersama, sempurna helat karena mufakat”* atau dikatakan: “*Berdiri marwah karena*

musyawarah, tegak adat karena mufakat”.

Didalam tunjuk ajar Melayu dikatakan : “Tanda orang bermarwah, menghormati musyawarah; tanda orang beradat, duduk tegak dalam mufakat”, Orangtua-tua juga mengajarkan untuk menghargai silang pendapat, terutama dalam melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Silang pendapat boleh saja terjadi, dan memang wajar terjadi, namun jangan sampai memecah belah kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ungkapan adat mengatakan : “Didalam musyawarah, tentu banyak bersilang lidah”, atau dikatakan : “adat duduk bermusyawarah, banyaklah silang pendapat”.

Yang perlu diarifi ialah agar silang pendapat jangan merusak kerukunan hidup atau membawa kepada pertelikaian dan perpecahan. Adat mengatakan : “bila terjadi silang pendapat, jangan memecah umat”, atau dikatakan : “bila terjadi selisih faham, jangan sampai menjadi dendam”; atau dikatakan: “bila pendapat tidak sejalan, jangan menjadi pertelikaian”; atau dikatakan : “bila pendapat tidak sesuai, jangan membawa telikai”; atau dikatakan : “bila pendapat tidak sejudu, jangan menjadi seteru”.

Selanjutnya orangtua-tua mengingatkan pula : “adat berunding mencari mufakat, jauhkan sifat hujat menghujat”,

atau dikatakan : “*adat berunding orang terpuji, jauhkan sifat keji mengeji*”, atau dikatakan : “ *adat berunding orang berilmu, pantang memberi aib dan malu*” ; atau dikaitkan : “*adat berunding orang beriman, pantang mencerca mencari lawan*” ; atau dikatakan : “*adat duduk bermusyawarah , pantang sekali memfitnah*” *dst.*

Budaya Melayu amatlah sarat dengan tunjuk ajar mengenai musyawarah untuk mufakat, karena musyawarah dan mufakat adalah sendi dalam kehidupan mereka turun temurun. Keutamaan musyawarah dan mufakat serta tatacara melaksanakannya diatur dlam ketentuan adat yang mereka warisi turun temurun.

12. Nilai “*Bercakap bersetinah, berunding bersetabik*”

Nilai ini mengajarkan orang untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan, berperilaku sopan, tertib dan berbudi pekerti mulia. Nilai ini juga mengajarkan agar memelihara lidah, menjaga tingkah laku, menjauhkan sifat kasar langgar, memantangkan mencaci orang, berlagak kuasa dan sombong merendahkan orang lain, mau menang sendiri, besar kepala, sombong dan angkuh dan sebagainya. Nilai ini tentulah sangat bermanfaat dalam membentuk kehidupan yang tertib, aman dan damai, amat berfaedah dalam

mewujudkan masyarakat yang saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling tahu diri dan saling memelihara diri.

Ungkapan adat mengatakan : *“tanda orang beradat, elok perangai sempurna sifat; atau dikaakan : “ tanda orang terpandang, bercakap tidak menyilang, berbicara tidak mencerca, berbual tidak menjual”* Ungkapan lain menyebutkan : *“tanda orang beriman, perangainya elok berbicaranya sopan’*; atau dikatakan : *“tanda orang terpuji, bercakap tidak mengeji, berbicara tidak menfitnah, menyanggah tidak menyumpah”*.

Di dalam tunjuk ajar dikatakan pula : *“apabila hendak rukun dan damai, elokkan laku baikkan perangai; ; atau dikatakan : “apabila perilaku bersopan santun, negeri aman hiduppun rukun”*. Atau dikatakan : *“ apabila hidup tahukan diri marwah tegak tuah berdiri”*. Selanjutnya disebutkan : *“apabila negeri hendak sentosa, elokkan dulu budi bahasa dst.*

Budaya Melayu, dan kita yakini pula semua budaya suku, puak dan etnis lainnya tentulah menjunjung tinggi nilai-nilai etika, nilai kesantunan baik dalam berbicara bergaul dan sebagainya. Kesantunan itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, dan sangat diutamakan dalam ajaran agama-agama di muka bumi ini.

III. SARAN

Menyimak keadaan masyarakat, bangsa dan negara kita sekarang nyaris kehilangan jatidiri karena banyak kehilangan nilai-nilai luhur adat budaya, menurunnya rasa nasionalis sebagai bangsa karena menonjolnya rasa kedaerahan yang sempit, serta terjadinya beragam krisis, mulai krisis ekonomi, politik, kepemimpinan dan yang terparah adalah krisis moral (akhlak), disarankan untuk:

1. Meningkatkan upaya penggalian, pembinaan, pengembangan dan pemahaman nilai-nilai luhur adat dan budaya oleh masing-masing suku dan puak yang menjadi jatidirinya. Upaya ini dapat disebut: *“memelayukam orang Melayu, menjawabkan orang Jawa, membatakan orang Batak, membugiskan orang Bugis, menyundakan orang Sunda, mengacehkan orang Aceh*, dan seterusnya, yang intinya mengembalikan mereka kepada nilai-nilai luhur yang mereka warisi turun temurun.
2. Meningkatkan upaya pewarisan nilai-nilai luhur adat dan budaya masing-masing suku dan puak kepada generasi mudanya, agar mereka menjadi generasi yang berjatidiri, beradat dan berbudaya luhur pula.
3. Melakukan pertukaran informasi antar suku dan puak tentang adat dan budaya untuk memudahkan mencari benang merah

kesamaan yang dapat dijadikan sebagai perekat pemersatu bangsa, antara lain dengan cara membentuk forum-forum adat dan budaya lintas suku dan puak sebagai wadah bersama untuk membangun dan mengekalkan adat dan budaya bangsa sebagai jatidiri bangsa Indonesia yang majemuk

4. Memfungsikan secara optimal para pemangku dan pemuka adat dan budayawan dari setiap suku dan puak serta melibatkan mereka di dalam merancang dan melaksanakan pembangunan di kawasan masing-masing, agar pembangunan dapat wujud menjadi pembangunan yang mencerminkan budaya tempatan.
5. Melibatkan secara langsung para tokoh adat dan budayawan dalam upaya memberantas kemaksiatan, atau memberantas hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan tatanan nilai adat dan budaya tempatan.
6. Meningkatkan pembelajaran budaya tempatan melalui muatan local di sekolah-sekolah mulai dari peringkat terendah sampai keperguruan tinggi.

IV. PENUTUP

Kita meyakini bahwa setiap suku dan puak bangsa Indonesia pastilah memiliki nilai-nilai asas budaya dan adat istiadatnya, yang turun temurun mereka jadikan acuan dan jatidirinya. Dan kita yakin, nilai-nilai dimaksud mengandung tunjuk ajar dan petuah amanah yang dapat dijadikan simpai pemersatu bangsa, serta mampu mewujudkan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Karenanya, dengan beranjak dari nilai-nilai luhur dan kearifan yang piawai itu bangsa kita akan menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang bertamaddun tinggi, yang mampu mengekalkan kehidupan sejahtera lahiriah dan batiniahnya.

Dari sisi lain, pembangunan yang berlandaskan budaya sendiri, akan dapat mewujudkan pembangunan yang berjatidiri nasional, yang mencerminkan keberagaman budaya bangsa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi selauruh rakyat. Dari sanalah kita memperlihatkan kepada dunia luar, bahwa perbedaan suku, puak, agama dan kepercayaan tidaklah menyebabkan perpecahan, tetapi sebaliknya menjadi modal utama dalam membangun kehidupan yang bermartabat.

KERAGAMAN BUDAYA SPIRITUAL SEBAGAI PEMERSTU BANGSA

Oleh: Bismar Siregar

PENGANTAR

Adalah merupakan kebahagiaan tersendiri sebagai seorang muslim berasal dari keturunan Batak yang ingin dalam setiap gerak-gerik (identitasnya) tercermin ke-musliman dan *habatahon* sekaligus (kebatakan) secara utuh dalam kehidupan komunitas bangsa Indonesia. Patut diakui identitas komunitas adat demikian semakin sirna dari lingkaran masyarakat bangsa dalam wawasan Nusantara. Khusus dilingkungan masyarakat Batak, setidaknya-tidaknya masih ada rasa kebanggaan menyandang marga keturunannya.

Alhamdulillah! Mauliate!

Dua istilah yang sebenarnya maknanya tidak asing satu sama lain sama perwujudan terima kasih. Yang pertama langsung berhadapan dengan Tuhannya. Yang kedua dihadapan sesama manusia tetapi selalu terkait dengan nilai-nilai spiritual yang mencerminkan keakraban. Benar

perkembangan hidup manusia selalu mengundang perubahan. Di antara komunitas adat terhitung paling cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan ialah masyarakat Batak terutama yang beragama Islam. Sungguh nyata perbandingan itu di antara budaya spiritual masyarakat Batak Tapanuli Utara, pada umumnya sudah beragama Kristiani, sebaliknya lingkungan masyarakat Batak Tapanuli Selatan lebih senang menyebut dirinya *puak Mandailing* beragama Islam.

Di komunitas batak Utara nilai spiritual itu sangat kental sebagai pemersatu suku/puak, sebaliknya di masyarakat Batak Mandailing budaya spiritual berdasarkan adat pada umumnya sudah meluntur dipengaruhi nilai “spiritual” Islam.

Terbukti dari ucapan, Alhamdulillah pengganti ungkapan Mauliate sesuai pesan agamanya bertahmid, sebaliknya ucap Mauliate tetap mantap di kalangan Batak Tapanuli Utara mengikuti semangat/spiritual nenek leluhur dikenal *Ompu ni ompu nahinan*. Bukan tidak ada istilah penggantinya, ada yakni : “Halleluya!” ! Aneh atau bukan sampai sekarang ini bagi umat Kristiani belum menjadi ucap doa kebahagiaan. Demikian pula bersalam silaturahmi di komunitas Islam baik saat upacara resmi adat selalu didahului ucapan Assalamu’alaikum. Di tengah komunitas Batak Kristiani bukan SALOOM diucapkan tetapi HORAS-HORAS-HORAS.

Oleh sebab itu saat pembahasan tentang “KERAGAMAN

BUDAYA SPIRITUAL SEBAGAI PEMERSATU BANGSA”
mohon maaf setulus maaf lebih membatasi makna budaya spiritual di lingkungan komunitas muslim Mandailing Alhamdulillah, tidak mengalami kesulitan mengalihkan budaya adat animisme ke “adat” Islami.

POKOK MASALAH

Alhamdulillah ! Indonesia sangat terkenal denan penduduk mayoritas beragama Islam tidak ingin mengutarakan dalam pembicaraan antar komunitas adat ini, bahwa beragama itulah yang terbaik, tidak!. Sungguh menurut jiwa serta semangat beragama tidak dibenarkan bersikap menonjolkan agamanya yang paling baik. Jangan!. Jelas dipesankan:

1. “Hai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu,
Yang menciptakan kamu dari seorang,
Dan menciptakan daripadanya pasangannya,
Dan dari keduanya Ia kembang-biakkan,
Banyak laki-laki dan perempuan,
Dan bertaqwalah kepada Allah,
Dengan nama siapa kamu selalu meminta,
Dan jagalah hubungan keluarga,

Sungguh Allah selalu mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa:1)

2. “Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan

Kami ciptakan kamu dari berbagai bangsa dan berbagai puak,
Supaya kamu saling mengenal,

Sungguh yang paling mulia di antara kamu bagi Allah

ialah yang paling taqwa “. (Q.S. Al-Hujurat 49 : 13)

Mohon maaf sekali lagi, bila pemakalah lebih menitik beratkan pembicaraan dari lingkungan masyarakat Mandailing walau masih banyak keragaman budaya spiritual lainnya di lingkungan komunitas adat Tapanuli Selatan itu sendiri seperti komunitas adat Angkola, Sipirok dan Padangbolak serta lainnya. Keragaman Budaya Spiritual di antara komunitas ini selalu mencari persamaan dalam perbedaan. Tidak salah bila masyarakat Tapanuli Selatan berkat budaya spiritual warisan nenek leluhur bersatu dalam budaya disebut adat Batak.

Seperti dikemukakan di atas, sebagai seorang Muslim yang baik ajaran agamanya selalu melihat hubungan antar sesama

bukan dari segi iman semata, tetapi lebih hakiki dari SAMA KETURUNAN dari ADAM dan HAWA. Diingatkan untuk saling berkenalan bukan sebaliknya saling bermusuhan, cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu. Sungguh sangat bahagia bertasakkur atas dua jati diri tersebut wa anaa awwalul muslimin dan sebagai anak Batak bermarga Siregar dari luhat Sipirok dalam lingkaran berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia.

TEORI RESEPSI TEORI IBLIS : EXIT!

Pemakalah yakin dan percaya setiap produk budaya masyarakat tertentu ada nilai budaya spiritualnya. Juga masyarakat Batak Mandailing yang mempersatukan komunitas itu dalam sebutan Batak tentu ada nilai-nilai spiritualnya. Sebutlah dalam hukum adat ada teori dikenal dengan teori resepsi. Maknanya hukum Islam baru dapat diberlakukan bila telah diserap oleh hukum adat. Sebebarnya berpendapat demikian bukan membawa persatuan, malahan sebaliknya perpecahan.

Pernah terjadi akibat masuknya nilai-nilai agama aliran “baru” dikenal Islam kolot dan Islam baru berakibat perpecahan, permusuhan.

Bukan hal yang aneh antar bersaudara sendiripun sudah menjadi “budaya” putusnya silaturrahim. Alhamdulillah, berkat perjalanan sejarah pertentangan/permusuhan demikian sudah semakin tidak lagi menjadi budaya.

Patut dicatat ada pakar hukum pernah mengadakan penelitian atas adat budaya Batak Tapanuli Selatan Prof. Mr.Dr. Hazairin, mungkin berdasar penelitian serta pengalaman sendiri di Tapanuli Selatan merasakan akibat Teori Resepsi ini bukan persatuan yang diwujudkan tetapi perpecahan, sehingga “memberontak” atas teori ini. Beliau menyatakan Teori Resepsi ini teori iblis harus exit dari bumi persada. Benar juga, masa diakui hukum Allah baru diterima berlaku sebagai hukum kalau sudah meresap dalam hukum adat, Pengkhianatan atau bukan ?

Juga dalam situasi sekarang ini muncul peristiwa mirip-mirip dengan asas hukum demikian, yakni syariat Islam baru berlaku di tengah komunitas Islam bila sudah dinyatakan secara syah berdasar undang-undang. Ajakan, mari hindari prasangka tidak baik atas syariat Islam itu. Mari menerimanya penuh keikhlasan bukan berdasarkan perintah undang-undang tetapi berdasar keimanan. Segera seorang berikrar dua kalimah syahadat wajib baginya menundukkan diri kepada syariat agamanya yakni Islam.

KERAGAMAN BUDAYA SPIRITUAL SEBAGAI PEMERSATU BANGSA :

Kembali kepada judul makalah janganlah karena keragaman budaya spiritual bangsa ini tidak bersatu. Mari jadikan nilai-nilai budaya spiritual yang ada di mana-mana dalam komunitas kecil, menengah, besar mari mulai memahaminya dari nilai spiritual yang ada. Kalau tidak pandai-pandai lebih tepat bijaksana memperlakukan masyarakat pendukung budaya spiritual yang ada, bukan hal yang mustahil terjadi perpecahan dan yang demikian itu mengancam keberadaan negara kita sekarang ini. Tidak perlu disangkal peristiwa-peristiwa terjadi di Aceh dikenal dengan GAM-nya, bukan mustahil karena Pemerintah kurang menghayati nilai spiritual yang ada pada masyarakat Aceh. Juga terjadi di beberapa bagian Timur Nusantara ini, mudah-mudahan sama dipahami adanya sikap pandang yang kurang serasi antar yang sudah beradab dengan kurang beradab. Mohonlah pengertian yang mendalam agar Keragaman Budaya Spiritual menjadi Pemersatu Bangsa.

Seharusnya disadari makna rahmat Tuhan bagi bangsa yang terdiri dari aneka suku/puak dengan adat yang berbeda satu sama lain demikian budaya seyogyanya sekali lagi dipahami mereka-mereka komunitas adat yang aneka itu seperti mereka dan jangan diperlakukan mereka seperti diri kita. Kalau benar-benar ada yang disebut

keragaman Budaya Spiritual Pemersatu Bangsa terwujud pola sikap terhadap mereka yang disebut “Terbelakang” dilakukan pendekatan yang sangat munusiawi. Hormati mereka walau busananya sangat sederhana hanya sepotong cawat, atau koteka jangan ada dalam hati kita menganggap budaya mereka tidak sopan dan perlu disopankan. Salah perlakuan inilah menyebabkan sebagian dari saudara kita yang terbelakang hidupnya masih dalam zaman batu kita terima mereka sebagai mereka, hormati jangan sepelekan nilai-nilai spiritual mereka.

Marilah melihat manusia seperti dipesankan dalam Firman Tuhan di kedua ayat surat tersebut di atas untuk saling berkenalan tanpa harus menonjolkan kelebihannya. Kelebihan disebut hanya mengenai TAQWAlah dan tentang taqwa itu urusan Allah. Oleh sebab itu setelah memahami nilai spiritual dalam komunitas adat tidakkah kita ingin menjadikan apa yang disebut budaya spiritual itu jadi unsur Pemersatu Bangsa?

BUDAYA SPIRITUAL DALAM KANDUNGAN ADAT.

Telah diakui ada nilai-nilai spiritual dan kepercayaan komunitas adat tentu sesuai budaya komunitas itu sendiri. Mengingat beragamnya budaya spiritual dan kepercayaan, karena hubungan satu sama lain kecuali sangat terbatas, tertutup juga komunikasi yang tidak lancar terjadilah kereagaman budaya itu. Akankah kita paksakan menyatukan

budaya yang beragam itu ? Jangan ! Sekali lagi jangan ! Patut diakui kecuali perbedaan ada persamaan, yakni percaya kepada kekuasaan diluar dirinya. Tentu menurut tingkat peradaban masing-masing.

Tidak salah hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebutlah di Mandaling yang disebut macan sangat dihormati, sehingga pantang benar bersebut macan. Takut dimurkai dan akibatnya keamanan desa terganggu. Menghadapi hewan sekalipun ada nilai-nilai spiritualnya. Dipilih sebutannya: “Ompu I” (Nenek kita).

Juga dalam kejadian-kejadian tertentu dicoba menghindarinya, takut nanti disebut: “kualat”. Memasuki rumah tanpa upacara adat takut membawa kesialan. Anak sebelum lahir masih dalam kandungan, setelah lahir setiap perkembangan jiwa dan raga si anak disertai upacara adat. Memasuki hutan apalagi menebang pohon pengaruh spiritual itu melekat. Semua upacara adat itu dilakukan untuk menghindari “*Manincal na so diida*” (Marah yang tidak terlihat). Simbol-simbol demikian tidak/jangan dilarang. Kalau tidak bertentangan benar mengandung syirik biarkanlah, secara berangsur akan mengalami perubahan.

Terapkan prinsip, semua perbuatan itu boleh kecuali yang secara tegas dilarang. Kalau tidak dilarang “agamakan”. Caranya sebalik dari teori resepsi, adat masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan hukum agama. Kalau bertentangan secara bertahap dihilangkan.

Patut dicatat di antara adat yang mengandung nilai spiritual sesuai ajaran agama ialah adat/budaya MALU. Teringat pesan nenek tercinta: “Bukan sakitnya itu cucuku yang tidak tertahankan, tetapi malunya itu, cucuku !” Dalam nilai dengan pesan: “Malu adalah sebagian dari iman?”

Masih banyak contoh lain yakni *MANGUPA* membuktikan rasa syukur kepada Tuhan. Boleh pula disebut dalam budaya Jawa nasi Tumpeng. Penyediaan makanan terdiri dari aneka jenis lauk pauk bernilai spiritual. Tidak perlu dilarang tetapi sesuaikan dengan nilai spiritual agama. Penentunya NIAT.

FATWA-FATWA DALAM KEHIDUPAN:

Masih dalam ruang lingkup budaya adat batak sering ada sajak-sajak yang mempunyai nilai spiritual. Sebutlah di antaranya:

1. “Met-met bulung ni jior metmetan bulung ni bane-bane,
Uli hata natigor, ulian hata nadame:
(Kecil-kecil daun johar, lebih kecil lagi daun bane-bane, Sungguh baik kata yang jujur tetapi lebih baik lagi kata yang damai)
2. “Marurus mada lasiak namarurus tu bonana;

Muruk pe da damang dohot dainang, muruk harani holong ni raohana”

(Berjatuhlah buah cabe, jatuhnya ke pohonnya juga, Marahnya bapak dan ibu tiada lain karena kasih sayangnya)

3. “Madabu ma suhul ni lading, na madabu di topi ni parsamean, Mago ma uhum dohot ugari, patunda ni sidangolon”
(Jatuhlah pegangan parang, kejatuhannya itu ditepi persamaian, hilanglah hukum serta nilai-nilai yang baik akibat kemiskinan)

Tidakkah kita membaca ada pesan nilai spiritual dalam sajak demikian yang dijadikan sebagai komunikasi membina persatuan keluarga sekaligus bangsa?

Masih ada yang perlu dikemukakan dalam budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat batak yakni “*Dalihan na tolu*” (Tiga tungku). Makna tiga tungku itu sungguh luar biasa dalam membina watak berdemokrasi di tanah batak/ Dalihan na tolu merupakan perekat komunikasi kampung, kuria, luhat. Tanpa diajar sudah terbiasa masing-masing mengetahui siapa dia dan apa kedudukannya. Dalam upacara adat ia menempatkan diri sebagai Mora, Kahanggi, Anakboru. Ia tidak mengandalkan kedudukan formal (pejabat) tetapi lebih mematuhi apa yang terkandung dalam nilai budaya spiritual komunitas adatnya. Sebagai anakboru walau berpangkat apapun dia

rela melakukan tugas keanakboruan. Agama juga sangat memujikan yang demikian.

SIMPUL:

Demikianlah disampaikan sekelumit dari nilai-nilai spiritual sebagai pemersatu bangsa. Marilah dengan penuh rasa kebersamaan melihat serta menerima aneka komunitas adat di tanah air kita. Merupakan takdir yang harus disyukuri, kita bukan bangsa berasal dari satu keturunan melayu tetapi akibat penjajahan dari yang seketurunan menjadi sebangsa (Malaysia dan Brunai) sebaliknya dari yang bukan seketurunan dan budaya spiritualitasnya sangat berbeda sebangsa, mari diterima yang demikian mengandung hikmat Tuhan oleh karena itu secara arif dan bijak menanamkan saling pengertian hormat menghormati tanpa harus memaksakan budaya spiritual kalau karena itulah persatuan bangsa terancam.

Bagi yang sudah tinggi nilai budaya spiritualnya, sekali-kali jangan lecehkan saudara yang masih hidup di zaman batu. Mari kita adakan pendekatan persuasive menerima mereka sebagai mereka, jangan sebaliknya. Ada nilai spiritual yang patut dijadikan budaya mengangkat mereka menjadi duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, yakni KASIH SAYANG. Pesan spiritual: “Cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu.!”

Mari.....! Budayakan: Keragaman Budaya Spiritual menjadi
Budaya Pemersatu Bangsa!

Bisman Siregar

Jalan Cilandak I/25 A

Jakarta 12430

Tel/Faks 7657416

Keragaman Budaya Spritual sebagai Pemersatu Bangsa

Andri Hernandi

Dipaparkan dalam rangka :

Gelar Budaya Spritual

yang diselenggarakan oleh

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Denpasar, 30 Mei - 1 Juni 2006

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku bangsa dan memiliki budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya ini merupakan suatu karunia atas kebesaran Tuhan yang patut disukuri, karena telah memberikan bermacam-macam ilmu, pengetahuan, adat-istiadat, seni, dll. sehingga dapat memperkaya budaya bangsa kita sendiri. Salah satu kekayaan budaya bangsa kita adalah budaya spritual. Budaya spritual adalah budaya yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dimana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini telah lama dihayati secara turun temurun oleh

sebagian bangsa Indonesia.

Pada umumnya, dalam budaya spiritual terkandung nilai-nilai luhur yang universal dan sangat mendasar seperti budi pekerti dan tata krama yang luhur dalam mengatur hubungan antara manusia dan pencipta-Nya serta antara manusia dan setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Oleh karena itu budaya spiritual dapat dijadikan pegangan manusia dalam melampahi atau menjalani kehidupan dan penghidupannya di alam dunia ini.

Nilai-nilai budaya spiritual tersebut mempunyai arti dan makna yang positif bagi pengemangan sikap kerukunan antar sesama makhluk Tuhan. Sikap kerukunan merupakan sesuatu yang “mutlak” harus dilakukan karena bahwasannya kita itu bukan makhluk yang berdiri sendiri (individual) melainkan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya harus saling berinteraksi antara sesama makhluk Tuhan. Hal ini disadari bahwasannya masing-masing makhluk Tuhan merupakan makhluk yang unik yaitu antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain pasti berbeda. Namun perbedaan tersebut hendaknya bukan merupakan pertentangan namun melainkan saling melengkapi (complementary) atas dasar kesadaran yang tinggi. Dengan demikian maka akan timbul suatu kesepakatan baru dalam perbedaan tersebut untuk landasan bersama dalam suasana penuh toleransi.

2. Indahkah Pelangi itu ? Wacana keanekaragaman budaya spiritual

Berawal dari pertanyaan diatas, sepertinya kebanyakan orang setuju bahwa pelangi itu indah. Seperti dalam lagu mengatakan.... pelangi, pelangi, alangkah indahmu...pelangi,pelangi, ciptaan Tuhan. Pada dasarnya untuk menyatakan “setuju” dapat dilihat atas dasar kesamaan makna dan kepentingan (need). Dasar kesamaan ini yang akan membentuk suatu kesepakatan bersama antara individu-individu yang nantinya akan membentuk suatu nilai / norma yang sama. Tapi apakah pelangi itu indah ?

Apabila kita menjawab bahwa “Betapa indah pelangi itu” adalah merupakan suatu transformasi informasi yang terekam oleh pancaindra mata kita kemudian disalurkan dalam memori otak dan akhirnya mendapatkan kesimpulan kognitif bahwa “Pelangi itu indah”. Tapi kenapa berbeda-beda warna itu menjadi indah ? Terbenak dalam pikiran kita bahwa kita “merasakan” adanya keharmonisan dan keselarasan antara warna-warna tersebut sebagai suatu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu harmonisasi tersebut dapat menjadi salah satu alat untuk mencapai “keindahan”.

Warna-warna dalam pelangi tersebut mensyiratkan adanya perbedaan masing-masing peran dalam memberikan rasa

kepada kita akan adanya sifat “keindahan” tersebut. Apabila peranan dari warna-warna tersebut membentuk suatu kesatuan yang saling melengkapi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh maka akan terwujud suatu perasaan “indah”. Oleh karena itu “indah” itu merupakan suatu ekspresi perasaan yang positif dalam menuju kesepakatan pemahaman sebagai perekat menuju keharmonisan dan keselarasan.

Begitu pula dengan keanekaragaman budaya spiritual yang merupakan anugrah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Secara filosofi bahwasannya budaya spritual mempunyai makna yang luhur dan positif. Kata budaya spiritual terdiri dari kata “budaya” dan “spiritual” yang artinya : budaya berasal dari kata budi dan daya, yang berarti budi adalah gerak halus (bathin) yang menjadi pangkal/ dasar kesadaran akal pikiran dan daya adalah gerak kasar (lahir) yang atas dorongan kesadaran akal pikiran tersebut (batin) menjadi tindakan (laku) sehingga dapat disaksikan oleh panca indera. (Kartawinata, 1985). Sedangkan spiritual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (DPDK, 1994) mempunyai pengertian berhubungan dengan masalah kejiwaan, kerohanian atau kebatinan. Dapat disimpulkan bahwa budaya spiritual adalah merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilaksanakan secara lahiriah (laku) berdasarkan kesadaran akal dan pikiran yang bersumber pada kejiwaan, kerohanian dan kebatinan.

Sedangkan definisi dari keanekaragaman (diversity) adalah merupakan suatu keadaan/kondisi dimana terdapat perbedaan antara baik itu entitas kecil maupun besar (kelompok). Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan dalam ras, etnik, bahasa, kebangsaan, kepercayaan, atau agama antar berbagai kelompok di dalam suatu masyarakat, organisasi, atau bangsa. Bahkan menurut Deklarasi UNESCO (Paris, 2 November 2001) mengenai Universal Declaration on Cultural Diversity menyatakan bahwa keanekaragaman budaya merupakan sifat dasar dari manusia dan merupakan pertama kalinya terjadinya pluralisasi budaya (UNESCO, 2001).

Artinya bahwa keragaman tersebut merupakan suatu yang hakiki atas dasar kodrat yang diberikan oleh Tuhan.

Lalu, apa yang dapat menjadi perekat bagi individu, komunitas, maupun bangsa agar tetap bersatu dalam keragaman budaya spiritual ? Pada dasarnya filosofi budaya spiritual bersifat universal bagi setiap individu, kelompok, maupun bangsa. Hal ini disebabkan budaya spiritual melingkupi masalah kebatinan. Umumnya masalah kebatinan menyangkut masalah “kasunyatan” atau masalah dalam (“RASA”). Baik itu mulai dari Rasa Gusti, Sari Rasa Alam, dan Rasa Dunia

kesemuannya ini dalam satu kesatuan ketunggalan Tuhan

Yang Maha Esa dan mahluknya (Manunggaling Gusti dan Kawula)(Kartawinata, 1985). Oleh karena itu “RASA” bersifat tunggal sehingga dapat dijadikan alat harmonisasi (selaras dan serasi) dari keanekaragaman budaya spiritual. Hal ini juga disinggung oleh Bung Hata yang menyatakan bahwa sebagai perekat dalam upaya harmonisasi keanekaragaman budaya adalah melalui pembinaan budaya, dalam hal ini dapat berupa pembinaan budaya spiritual(Mustari, 2005).

3. Diversitas Yes, Disparitas No, menuju upaya pemersatu bangsa

Pada dasarnya dalam keragaman budaya ada proses saling berinteraksi antara satu entitas budaya dengan entitas budaya yang lainnya. Konsep interaksi telah lama dijelaskan oleh beberapa teori dasar, sebagai contoh aplikasi dari teori Gravitasi Newton dalam interaksi sosial. Dimana entitas budaya yang mempunyai kekuatan yang besar akan mempunyai daya tarik yang tinggi terhadap entitas budaya yang mempunyai kekuatan yang lebih kecil. Sayangnya, teori gravitasi ini tidak menjelaskan mengenai bentuk hubungan dari interaksi tersebut, apakah hubungan tersebut bersifat kompetitif atau akomodatif.

Hubungan kompetitif adalah suatu interaksi yang

mempunyai sikap untuk bersaing dan mendominasi suatu budaya tertentu. Sedangkan hubungan akomodatif yaitu interaksi yang bersifat menerima prinsip-prinsip budaya spiritual yang satu diatas budaya spiritual yang lain. Adapun tujuan dalam proses interaksi ini adalah adanya penyebaran (diseminasi) daya tarik antar entitas budaya tersebut.

Apabila interaksi antar budaya spiritual tidak terkendali dapat mengakibatkan pengurasan (backwash efect) salah satu entitas budaya spiritual. Hal ini yang dapat mengakibatkan kesenjangan (disparitas) antar budaya spritual tersebut. Oleh karena itu perlu adanya tindakan intervensi terhadap proses interkasi tersebut sehingga kesenjangannya dapat di perkecil (dieliminir).

Upaya yang dapat dilakukan dalam intervensi interaksi tersebut, dapat dilakukan dengan cara “kompromi” atas dasar “RASA”. Kompromi dilakukan pada masing-masing entitas budaya atas dasar “RASA” ini melalui sikap penghormatan yaitu :

- Tidak adanya sikap Egoistis, yaitu mengutamakan kepentingan budaya spiritual sendiri diatas kepentingan budaya spiritual yang lain.

- Tidak adanya sikap Individualistis, yaitu tidak memperhatikan atau memberikan apresiasi terhadap budaya spiritual yang lainnya.
- Tidak adanya sikap Kekanak-kanakan, yaitu tidak dewasa (senang disanjung dan dipuji) dalam menempatkan prinsip-prinsip budaya spiritual.
- Tidak adanya sikap Ketua-tuaan, yaitu merasa lebih baik dari pada budaya spiritual yang lainnya.

Sehingga kompromi tersebut dapat memposisikan diri tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dengan demikian cara kompromi ini dapat menghasilkan suatu kesepakatan dan persetujuan bersama dalam hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

Tentunya, dalam konteks pemersatu bangsa, kompromi tersebut bisa dijadikan sebagai perekat keanekaragaman budaya spiritual. Dimana dalam kompromi antara budaya spiritual yang satu dengan yang lainnya perlu adanya pengembangan sifat hidup dengan cara :

- memandang diri orang lain seperti terhadap dirinya sendiri (Manusia)

- mewujudkan hidup gotong royong, saling tolong menolong dan bantu Membantu untuk kesejahteraan hidup bersama (Wali)
- silih asih, silih asuh, silih asah dalam meningkatkan kesadaran/kecerdasan dan derajat hidup yang layak bagi kemanusiaan (Guru jati)
- meningkatkan rasa manunggal antara sesama umat karena hakekat manusia itu tunggal/sama (Rasa Jati)

Selain itu pula, pengembangan sifat hidup tersebut diatas tertuang dalam jiwa dan semangat Pancasila. Hal ini disebabkan Pancasila mengandung unsure religius-sosialisme, sehingga dalam tubuh Pancasila terdapat peri kehidupan kebatinan (religi) sebagai jiwa tatanan social (masyarakat) dalam rangka mewujudkan kerukunan bersama (persatuan). Uraian pancasila dari segi religi dimulai dari (Kartawinata, 1985);

- Yang hidup berketuhanan Yang Maha Esa ialah manusia yang adil dan beradab. Hakekat manusia sebagai makhluk yang unik.
- Yang hidup berperikemanusiaan yang adil dan beradab itu bangsa yang bersatu (persatuan Indonesia) secara lahiriah dan batiniah.

- Bangsa yang hidup bersatu secara lahiriah dan batiniah itu tentunya hidup kerakyatan
- Hidup kerakyatan itu adalah hidup yang melaksanakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat
- Keadilan social bagi seluruh Indonesia merupakan perwujudan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian Pancasila dapat dikatakan juga sebagai sumber nasionalisme dan patriotisme yang berdasar pada keanekaragaman yang satu (Bhineka Tunggal Ika) dengan cara mengutamakan kerukunan dan menentang perpecahan (Abdulgani, 1988). Oleh karena itu Pancasila merupakan dasar moral dalam upaya kompromi atas dasar ketunggalan rasa (kebatinan).

Selain Pancasila, semangat persatuan dalam perbedaan diwujudkan dengan adanya sumpah Pemuda yang berbunyi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu nusa dapat berarti adanya suatu pernyataan tentang satu tanah air. Dimana nusa ini merupakan tempat/sumber kehidupan dan penghidupan yang menjadi asal kegiatan badan sekujur. Satu bangsa merupakan suatu pernyataan tentang adanya kesepakatan untuk menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan Negara sebagai suatu kodrati.

Selanjutnya, satu bahasa merupakan kesepakatan dalam bahasa yang sama untuk memahami isi kandungan batin dan pikiran sebagai alat komunikasi yang utama dalam pergaulan hidup yang menunjukkan “adanya” dan “sifat” pribadi bangsa.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa interaksi didalam keanekaragaman budaya spiritual dapat dikendalikan dengan cara “kompromi” atas dasar “RASA”. Kompromi ini secara nasional harus dilandaskan pada tatanan nasional, yaitu dengan adanya semangat Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Sumpah Pemuda (lihat pada Gambar 1). Oleh karena itu sebenarnya “kompromi” atas dasar “rasa” dalam keanekaragaman itu sendiri merupakan suatu kekuatan dalam membina hubungan yang harmonis (“indah) guna menyatukan entitas-entitas budaya spiritual yang merupakan bagian terintegrasi dalam kebudayaan nasional.

gambar



4. Penutup

Demikianlah penyampaian singkat mengenai pokok-pokok pemikiran tentang keanekaragaman budaya spritual sebagai pemersatu bangsa. Penulis menyadari akan keterbatasan wawasan mengenai pemahaman tema tersebut. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan tugas kita bersama.

Pustaka

DPDK. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua ed. Balai Pustaka.

Kartawinata, I.R. 1985. Budaya Spirtual. Aliran Kebatinan "PERJALANAN".

Mustari, M. K. 2005. Kedudukan dan Peranan Kepercayaan dalam Pembangunan

Bangsa. In Seminar tentang Kepercayaan Masyarakat. Direktorat Kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

UNESCO. 2001. Universal Declaration on Cultural Diversity, Paris, 2 November 2001.

KERAGAMAN BUDAYA SPIRITUAL SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

**Dikontribusikan oleh:
Chandra Setiawan *)**

II. Pembuka

Indonesia mungkin merupakan salah satu negara di dunia yang paling majemuk, dihuni oleh ratusan kelompok etnik dan kaya akan bahasa serta kebudayaan daerah. Keragaman Indonesia terlihat dengan jelas pada aspek-aspek geografis, etnis, sosio-kultural dan agama serta kepercayaan.

Jika dirangkum secara keseluruhan, kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh kemajemukan suku bangsa dan bahasa (sekitar 250 dialek), agama (Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Khonghucu, Protestan dll), kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (sekitar 400 aliran), sistem hukum (nasional, agama, adat), sistem kekerabatan, dan sistem perkawinan (monogami dan poligami).¹

¹ H.A. Prajitno, Trubus, "Etika Kemajemukan", Universitas Trisakti, 2003, p.100

Jumlah pulau yang amat banyak, suku-suku dengan bahasa, budaya (termasuk di dalamnya budaya spiritual), adat-istiadat dan agama-agama serta kepercayaan yang berbeda-beda seperti dilukiskan di atas, menampilkan kekayaan Indonesia yang sesungguhnya tidak ternilai harganya. Namun harus diakui dalam kehidupan politik, masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama, terdiri atas elemen-elemen yang terpisah satu sama lain. Orang-orang Belanda, Tionghoa, dan ‘Pribumi’, melalui agama, kebudayaan dan bahasa mereka masing-masing, mempertahankan atau memelihara pola pikiran dan cara-cara hidup mereka masing-masing. Hasilnya, ialah berupa masyarakat Indonesia yang sebagai keseluruhan tidak memiliki kehendak bersama. Sejarah masyarakat Indonesia menunjukkan jauh sebelum kedatangan Belanda sekali pun, budaya konflik, kekerasan sosial, intrik dan perpecahan sering terjadi di kalangan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa dan di luar Jawa. Setelah mengalami penindasan yang bertubi-tubi, akhirnya oleh kesamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah terutama oleh pemerintah Kolonial Belanda dalam kurun waktu yang cukup panjang, kita bersepakat bersatu ditandai momentum Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 yang puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945.

Lalu *founding fathers* kita memilih “Bhinneka Tunggal

Ika” sebagai semboyan Nasional yang berarti,”berbeda-beda, tetapi tetap satu” sebagai perekat dari keberagaman di atas. Semboyan ini lahir sebagai refleksi atas realitas kemajemukan bangsa, sekaligus sebagai jawaban agar kemajemukan itu tidak memicu disintegrasi, tapi justru menjadi tiang-tiang penyangga bagi hadirnya sebuah bangsa yang kukuh. Disadari betul oleh para pendiri negara ini tidak mungkin Indonesia sebagai bangsa adalah homegen. Dalam nafas Bhinneka Tunggal Ika itu keragaman dipahami sebagai asset yang berharga, sehingga menjadi bagian-bagian indah dalam mosaik keindonesiaan. Para pendiri negara ini mengadopsi “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai salah satu upaya untuk memayungi keanekaragaman yang ada serta strategi untuk mempersatukan berbagai kelompok etnik yang ada dalam suatu ikatan yang berorientasi ke masa depan.

Keragaman budaya spiritual yang hingga kini masih bertahan hidup adalah sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dan puncak-puncak kebudayaan itu hendaklah diartikan sebagai unsur-unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang antara lain dapat dilihat dari naskah kuno yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh sebagian bangsa Indonesia yang sekarang ini terhimpun dalam wadah organisasi atau paguyuban,

yang masing-masing menghayati ajarannya sendiri-sendiri. Sebagai sistem budaya jelaslah keberadaan wadah-wadah tersebut merupakan sesuatu yang hidup di dalam masyarakat dan secara langsung dan tidak langsung memperkaya khasanah kebudayaan kita. Adanya beratus-ratus organisasi yang menghimpun para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tersebar di 25 provinsi menunjukkan bahwa para penghayat telah memahami dan menghayati dengan baik makna dari kemajemukan/keragaman, yang pada hakikatnya adalah sikap yang mau mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, dan mengembangkan atau memperkaya suatu keadaan yang bersifat jamak, banyak atau plural.

III. Tantangan Globalisasi

Sejak awal tahun 1980-an, kebudayaan dan masyarakat majemuk Indonesia menghadapi tantangan baru. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan perubahan kehidupan bermasyarakat berlangsung dengan cepat. Serbuan kapitalis global melalui berbagai media elektronik, cetak telah membuat sebagian bangsa Indonesia ‘terjajah’ dan larut menerima faham materialisme, atau faham serba materi. Informasi yang mendorong masyarakat menjadi konsumtif sedemikian banyaknya sehingga berlebihan, mengakibatkan sebagian

masyarakat Indonesia telah ‘salah pilih’. Hidup kita tidak dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan agama. Hal ini terbukti uang telah menjadi ‘panglima’ di negeri ini. Lebih 90% orang Indonesia mengaku beragama, tetapi Indonesia merupakan bangsa yang tingkat korupsinya berada di deretan atas, yang pasti masuk dalam “top ten” dan jauh tertinggal di bandingkan negara yang 100% sekuler seperti Singapura misalnya. Bahkan perebutan sumber daya dan ujung-ujungnya masalah pembagian harta antara pemerintah pusat dan daerah, beberapa daerah yang kaya akan sumber alam seperti Provinsi Daerah Istimewa Aceh (NAD), dan Irian Jaya (Papua) yang dirasakan tidak adil, telah mendorong masyarakat setempat bergejolak dan menghendaki pisah serta ingin merdeka. Konflik kekerasan antara etnis Dayak dan migran Madura di Kalimantan. Kejahatan meningkat, kerusakan lingkungan yang meluas, masalah penderitaan yang berkepanjangan di berbagai pelosok tanah air, seperti di Ambon, Poso, Papua, Aceh, dan lain-lain. Kehilangan kepercayaan diri sebagai bangsa telah pula memunculkan perilaku anarkhis, dan budaya kekerasan pada sebagian kelompok masyarakat kita. Hal ini menunjukkan apabila kita mengabaikan jati diri sebagai bangsa Indonesia untuk hidup bersama, mengabaikan kearifan budaya spiritual dan kita secara sadar atau pun tidak memutuskan untuk memilih dikuasai budaya yang serba materi, maka integritas, kohesi nasional kita

dapat terancam.

III. Kontribusi Budaya Spiritual bagi Persatuan Bangsa

Budaya spiritual diyakini mempunyai kekuatan dalam menghadapi gelombang dan paham materialisme, kapitalisme, anarkisme, radikalisme, dan eksekutif demokrasi yang dimaknakan sebagai “bebas berbuat apa saja”. Karena di dalam budaya spiritual terkandung ajaran-ajaran yang sangat mendasar dan bernilai luhur yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan, seperti budi pekerti luhur dan tata krama luhur yang mengatur keharmonisan hubungan antara manusia dan manusia; antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa; Ajaran agar manusia selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa; ajaran untuk saling mengasihi; ajaran untuk berbakti, takut dan hormat kepada orang tua; ajaran untuk tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan yang dibuat negara.

Dari perspektif spiritual, masyarakat Indonesia untuk memperkuat jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, haruslah merujuk pada pengembangan potensi-potensi internal dirinya dalam aktualisasi yang selaras dengan hukum non materi, dan penghayatan serta pengembangan nilai-nilai kemanusiaan untuk membangun seluruh kehidupan yang menyenangkan baik secara

individual maupun kolektif. Dalam konteks perubahan sosial sekarang ini, masyarakat Indonesia dalam sekat pluralisme terakomodasi secara otomatis dalam *civics responsibilities*, *social economics responsibility*, dan *personal responsibility*. Sistem sosial budaya Indonesia sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam Sistem Sosial Budaya Indonesia dapat terwujud apabila Pancasila sudah menjadi nilai pendorong, penggerak dan pembatas tingkah laku dan tindakan manusia Indonesia. Sekaligus merupakan tolok ukur nasional yang dapat memadukan nilai-nilai nasional/ tradisional dengan nilai-nilai modern yang positif, sehingga mendukung proses terwujudnya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tentram dan sejahtera lahir batin, dalam tata hidup dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila. Dalam suasana hidup bangsa Indonesia serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan dengan sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

IV. Penutup

Keragaman budaya spiritual sebagai pemersatu bangsa secara historis mewujudkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Seperti diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan asas-asas penting dalam keragaman budaya spiritual, sehingga berkontribusi bagi persatuan bangsa Indonesia, antara lain:²

1. **Asas Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

Asas ini memberi pemahaman tentang ketidaksempurnaan manusia, dan ketergantungan manusia pada Tuhan Yang Maha Esa.

2. **Asas Merdeka**

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu kita semua mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi kemerdekaan itu.

3. **Asas Persatuan dan Kesatuan**

Bangsa Indonesia terdiri atas aneka ragam suku, budaya, adat istiadat daerah dan sebagainya telah membentuk negara

2 Jacobus Ranjabar, "Sistem Sosial Budaya Indonesia", Ghalia Indonesia, 2006, pp. 169-170

Republik Indonesia yang meletakkan persatuan dan kesatuan sebagai asas sosial budayanya. Itulah sebabnya kita menjunjung konsensus nasional, "Bhinneka Tunggal Ika".

4. Asas Kedaulatan Rakyat

Kehidupan pribadi dan keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam rangka mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan/ perorangan yang didorong oleh keinginan luhur sehingga cita-cita moral rakyat yang luhur dapat dipegang teguh dan terpelihara.

5. Asas Adil Makmur

Setiap pribadi/ keluarga dalam kehidupan harus mempunyai kehidupan yang layak dan adil sehingga pekerjaan, pendidikan, profesi, kesehatan, pangan, pakaian, perumahan, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi hak yang dipertanggung jawabkan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

6. Budi Pekerti

Setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memelihara budi pekerti

kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya atau menghayati kepercayaannya masing-masing harus dijamin, di mana pendidikan dan pengajaran menjadi hak warga negara yang membutuhkan melalui suatu sistem pendidikan nasional. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi dan rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk budaya spiritual yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan terdapat di dalam puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Dengan demikian eksistensi budaya spiritual yang beragam di Indonesia harus dipelihara dan terus dikembangkan, terutama yang jelas-jelas positif dan berkontribusi bagi pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter, sehingga persatuan bangsa Indonesia dapat dijaga lestari. Oleh karena ajaran luhur yang terkandung dalam budaya spiritual yang senantiasa mengingatkan manusia untuk melakukan introspeksi, mawas diri, untuk tidak egois dan menonjolkan diri sendiri, tetapi selalu ingin saling membantu, terutama kepada kaum kerabat dalam masa kesusahan, adalah landasan yang kokoh bagi rasa kehidupan bersama, dan kemauan untuk bekerja keras, mandiri guna memerangi

kemiskinan.

Organisasi masyarakat penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus dikelola secara baik sehingga dapat ikut membangun masyarakat yang mengikuti aturan, norma dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi bersama. Sebaliknya pemerintah terutama pemerintah lokal harus menyadari kondisi daerahnya, baik itu yang menyangkut struktur sosial masyarakat, kepemilikan tanah, situasi kekuasaan, adat istiadat, budaya, sejarah, agama, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan memahami secara baik, dan melakukan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat yang paling bawah, maka pemerintah akan mendapat kepercayaan masyarakat, sehingga pemerintah dapat secara bersama-sama dengan masyarakat melakukan pengendalian sosial di daerahnya.

—————//—————

Chandra Setiawan adalah anggota Komnas HAM RI, periode 2002- 2007, sehari-harinya bertanggung jawab atas hak-hak kebebasan pribadi di Sub Komisi Hak-Hak Sipil dan Politik. Tulisan ini dikontribusikan pada acara Gelar Budaya Spiritual dan kepercayaan Komunitas Adat di Bali, tgl. 20 Mei s.d. 1 Juni 2006.

**AMANDEMEN UUD '45 tentang
KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT ADAT**

(Prof. H. KMA M. Usop, M.A.)

Pasal 32 UUD 45 menyebutkan : *“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, yang penjelasannya berbunyi : “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”*

Pasal 32 tersebut diamandemen menjadi : 1] Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; 2] Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Menurut DR. H. Abdurahman,SH,MH : “Ketentuan tsb. memberikan

arahan tentang strategi kebudayaan baru tentang kewajiban negara untuk :

- a] ... memajukan kebudayaan nasional di tengah kebudayaan yang bersifat global dan dalam suasana globalisasi; ... mempertahankan dan melindungi kebudayaan nasional bangsa Indonesia agar tidak menjadi tersingkir dalam pertarungan peradaban ["*clash of civilization*" Samuel Huntington]; —
———
- b] ... memberikan "kewenangan" kepada masyarakat sendiri baik masyarakat bangsa [nasional] maupun masyarakat lokal [daerah] untuk mengembangkan dan memelihara kebudayaannya masing-masing;
- c] ... menghormati dan memelihara bahasa daerah, yang sekarang dipertahankan berbagai kelompok etnik ... sebagai salah satu *identitas dalam kerangka nasional*, diakui sebagai kekayaan budaya. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan **Pasal 36 UUD 1945** ... yang menyatakan "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Dengan adanya Pasal 32 baru terdapat jaminan konstitusional untuk menggunakan bahasa daerah dalam berbagai forum resmi."

Selanjutnya Abdurahman mencatat :

- a. Adanya ketentuan baru berupa **Pasal 18 B ayat [2]** ...: 'Negara mengakui dan menghormati *kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya* sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang'. Ketentuan ini termaktub di dalam bab mengenai 'Pemerintah Daerah' sehingga ia merupakan *pengakuan hak otonomi* dari berbagai masyarakat hukum adat yang ada di berbagai wilayah Indonesia termasuk hak untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaannya masing-masing dalam kerangka kebudayaan daerah.
- b. Adanya penambahan pasal baru berupa **Pasal 28 I ayat [3]** ...: '*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*' Ketentuan ini termasuk dalam bab baru tentang **Hak Asasi Manusia**...yang mengakui *identitas budaya masyarakat tradisional sebagai salah satu hak asasi manusia yang hartus dihormati..., hak asasi setiap msyarakat tradisional ... untuk mempertahankan identitas budayanya masing-masing...* Ketentuan yang mirip dengan pasal ini adalah ketentuan **Pasal 41 Piagam Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998** ...: '*Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat*

dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman’. Hal ini juga dapat dibandingkan dengan salah satu prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam yang disebutkan dalam **Pasal 4 Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001** yang menyatakan ‘mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atau sumberdaya agraria/sumber daya alam.’

- c. Adanya penambahan ketentuan berupa **Pasal 36 A** berkenaan dengan “**Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika**” ... mengandung konsekuensi pengakuan terhadap keberagaman budaya dari berbagai kelompok etnis namun ia masih berada dalam bingkai budaya nasional sebagai lambang adanya integrasi nasional.” Selanjutnya Abdurahman menyatakan bahwa ketegasan-ketegasan tersebut di atas akan memperkuat kebudayaan nasional dalam artian kukuhnya *integrasi nasional*, tetapi bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan disintegrasi. Sehubungan dengan itu, pakar hukum adat ini mengingatkan tentang *Kebangkitan Masyarakat Adat* yang dicanangkan oleh *Kongres Masyarakat Adat Nusantara [17-22 Maret 1999] di Jakarta*, yang melahirkan *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [AMAN]* dan menggugat negara : posisi masyarakat adat terhadap negara harus ditata-ulang “Pengingkaran terhadap kedaulatan masyarakat adat

dengan sendirinya melemahkan kekuasaan negara”, demikian Abdurahman.

Dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan :

- 1] Amandemen tersebut mengakui eksistensi identitas budaya lokal/ daerah dalam bingkai identitas budaya nasional dalam proses interaksi dan integrasi dengan budaya global.
- 2] Amandemen tersebut merupakan upaya penataan ulang hubungan antara negara dan masyarakat adat di dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 3] Peredaman berbagai konflik sosial selama Orde Baru untuk mengukuhkan integrasi nasional dengan cara penekanan keseragaman dan sentralisme merupakan bumerang yang melengserkan Orde Baru dan memunculkan pemerintahan Era Reformasi yang menjalankan kebijakan desentralisasi, memberikan otonomi daerah dan mengamandemen UUD 1945 untuk memberikan kebebasan/ otonomi kepada masyarakat/ daerah termasuk masyarakat adat untuk membina dan mengembangkan diri dalam bingkai NKRI/ Bhinneka Tunggal Ika.
- 4] Apa yang dideklarasikan oleh Aliansi Masyarakat Adat [AMAN] tertanggal 17 Maret 1999 sudah terakomodasi oleh beberapa reformasi pokok yang telah dilakukan.

- 5] Temu-temu Budaya daerah yang bermuara ke Kongres Kebudayaan V 2003 pada satu sisi merupakan tolok ukur :
- a] apakah amandemen-amandemen yang dilakukan telah mampu mengakomodasi aspirasi-aspirasi kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia,
 - b] apakah konsep kebudayaan Indonesia sebagaimana tersirat dan tersurat di dalam ketentuan-ketentuan baru UUD 1945 itu telah memadai secara nasional dan secara daerah/ masyarakat/ komunitas?
- 6] Menurut penilaian saya — berdasarkan pendapat dan aspirasi yang berkembang dalam empat Temu Budaya di Kalimantan — alam pemikiran Panitia Pengarah Kebudayaan V telah berhasil dalam artian cukup mengakomodasi aspirasi-aspirasi kebudayaan yang berkembang.
- 7] Dengan amandemen-amandemen yang dikemukakan di atas, sebenarnya UUD 1945 dengan perubahan-perubahan tersebut telah secara konstitusional menyatakan bahwa Pancasila/ Bhinneka Tunggal Ika/UUD 1945 sebagai “dasar kebudayaan Indonesia” yang Bhinneka Tunggal Ika, dasar “Kebudayaan daerah”, dasar Adat/Peradaban Indonesia Baru..

Dengan amandemen tersebut, Pancasila/ UUD '45

mengukuhkan diri sebagai “dasar budaya” selain sebagai dasar/ falsafah negara, ideologi negara dan sumber hukum.

Dengan amandemen tersebut, masyarakat/ kelembagaan adat, dalam hal ini, kedamangan, dapat dibina, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan publik serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan umumnya.

Kelembagaan yang perlu dikembangkan ialah adanya Kerapatan Adat di desa-desa, Majelis Adat Kecamatan [perwakilan damang-damang dari desa-desa], Majelis Adat Kabupaten/Kota [perwakilan damang-damang dari kecamatan-kecamatan], dan Dewan Adat Kalteng [perwakilan damang-damang dari kabupaten-kabupaten] di tingkat propinsi.

KERAGAMAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

(Prof. H. KMA M. Usop, M.A.)

PENDAHULUAN

1. Dalam kurun waktu lebih setengah abad dalam situasi kondisi global dewasa ini, Indonesia terus dilanda oleh **pengaruh budaya Barat dan budaya-budaya Timur** lainnya sementara dalam kurun waktu yang bersamaan membina “kebudayaan nasional yang bersifat multi-kultur”. Dalam suasana demikian, penyerapan budaya berkembang kadang sangat dangkal dan bersifat permukaan saja sehingga memberi kesan kurang kreatif, meniru, kurang tercerna, kurang tersaring. Ideologi nasional Pancasila belum cukup mampu dikembangkan sebagai saringan yang dapat diandalkan. Upaya di Era Orde Lama bercirikan demokrasi liberal, multi partai, demokrasi terpimpin yang kemudian cenderung ke sosialistik/komunistik. Upaya menerapkan ideologi tersebut di zaman Orde Baru tidak cukup berhasil malah menampilkan **wujud sentralistik dengan tiga partai dengan dominasi satu partai tunggal/kapitalistik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila itu sendiri**. Dalam upaya memilih jalan alternatif, maka tampilah

pemerintahan baru yang berlandaskan demokrasi sebagaimana yang berkembang dewasa ini dengan penekanan pada ekonomi rakyat dan otonomi/ desentralisasi. Dalam pada itu berkembang pula alternatif **pemberdayaan budaya lokal yang bersifat bhinneka** sebagaimana tertuang di dalam amandemen UUD 45 berkenaan dengan adat dan kebudayaan.

2. **Kongres Kebudayaan V di Denpasar dan Bukit Tinggi** belakangan ini membahas masalah-masalah multi-budaya ini, ada dua pendapat : 1] tetap **bineka budaya** dalam bingkai ketunggalan bangsa Indonesia atau **Bhinneka Tunggal Ika** dalam mengembangkan budaya Indonesia sebagai pemersatu bangsa melalui proses integrasi nasional, integrasi lokal, integrasi global, 2] **budaya Indonesia adalah budaya-budaya lokal** [tidak disebut-sebut tentang “puncak-puncak kebudayaan”].
3. Kedua perkembangan tersebut [konstitusional dan kultural] merupakan kenyataan yang menyadarkan kita kembali tentang keberadaan kita yang multi-etnik dan multi-budaya [termasuk keragaman kepercayaan komunitas adat]. **Pemberdayaan budaya lokal menjadi perhatian seiring dengan otonomi daerah dalam bingkai perkembangan demokrasi Indonesia.** Pendekatan reformis ini seakan menjadi paradigma baru.

4. **Krisis moral dan krisis-krisis lainnya** di bidang politik [demokrasi, kekuasaan partai, politik uang], ekonomi [ekonomi rakyat versus ekonomi kapitalistik, sosial [kerukunan dan kekerasan/ terorisme] dan budaya [etnosentrisme dan nasionalisme] terus bergejolak seakan-akan merupakan suatu kawah candradimuka.
5. Sementara itu dalam proses interaksi dan integrasi ini, gelombang budaya global terus melanda kita dengan segala dampak negatif dan posositifnya.

BEBERAPA KARAKTERISTIK UTAMA

1. Di bidang sosial politik nampak sekali upaya kita untuk menegakkan demokrasi dan aturan-aturannya, sementara dalam pelaksanaannya kita mengalami kekerasan, kecurangan, politik uang dalam suasana masyarakat yang sakit, mengalami anomali. Moralitas bangsa masih sangat lemah untuk dapat membebaskan diri dari pengaruh KKN. Ada juga dilemma antara menyerap aspirasi masyarakat dan menyerah pada kekerasan massa/ parlemen jalanan. Kalau alternatif ini yang dikembangkan maka kita tidak akan bisa lepas dari cengkeraman pemaksaan kehendak. Itu berarti mengembangkan suasana kacau [*chaos*] yang bersifat

anti demokrasi. Yang tampil di permukaan nasional ialah kekerasan, KKN, supremasi hukum yang lemah.

2. Dalam pada itu, kehadiran sejumlah elit yang berakhlak kuat di berbagai bidang dan lapisan masyarakat termasuk di bidang pemerintahan/ eksekutif, legislatif dan yudikatif serta di kalangan pimpinan masyarakat seakan-akan belum cukup berdaya menegakkan moralitas yang tinggi.
3. Sementara itu dalam suasana demokrasi dan otonomi nampak upaya kita untuk mendesentralisasikan kekuasaan kepada daerah-daerah, termasuk mendelegasikannya kepada elit lokal untuk melakukan upaya-upaya reformasi berdasarkan budaya lokal agar kegiatan reformasi itu menjadi lebih relevan dan efektif.
4. Dalam suasana itu, kita masih tetap teguh memiliki **harapan [hope]** untuk memperbaiki kehidupan sosial politik dan menggantungkannya pada tokoh-tokoh masyarakat yang peduli yang dapat dipercaya **[trust]**. Pada tahap ini rakyat sangat merindukan kehadiran orang-orang/ tokoh-tokoh kuat. Ada ucapan masyarakat yang bernuansa demikian : *kita memilih orang-orang yang sudah kaya saja, karena mereka tidak akan korupsi*. Kita sedang menghadapi suasana yang sangat dilematis. Seakan-akan kita terjerat oleh suatu kondisi KKN yang sangat kuat yang berdasarkan **nafsu kepentingan golongan dan pribadi**.

II. SOSIAL EKONOMI

- ♦ Situasi kondisi di bidang sosial politik tersebut di atas berjalan juga di bidang sosial ekonomi.

III. SOSIAL BUDAYA

1. Situasi kondisi sosial budaya Indonesia diwarnai oleh suatu **benturan budya/ clash of civilization [Huttington]** yang sedang mencari suatu bentuk dalam suasana keterbukaan [inklisivisme] yang dinamik dan kreatif. Sikon ini tidak hanya berlaku global, tetapi juga nasional dan lokal.
2. Salah satu wujud dari benturan tersebut nampak pada **“dialog antara sesuatu sistem budaya/ kepercayaan lokal dengan yang nasional dan global”** yang merupakan suatu proses panjang kebudayaan umat manusia. Manusia modern berdialog dengan Saocrates, dengan Shakespeare, dengan Konghochu, dengan Romawi, dengan Yunani, India, Cina, dsbnya dari masa ke masa.
3. Pada dasarnya apa yang disebut **“budaya spiritual dan kepercayaan komunitas adat/ tradisional/ lokal”** bertolak dari upaya pemikiran **penjelasan awal tentang alam semesta dan tentang Sang Pencipta**. Karena itulah, apa yang disebut

“adat” itu merupakan suatu filsafat yang meliputi suatu sistem hubungan dengan 1] Sang Pencipta, dengan roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib, 2] dengan masyarakat/ manusia-manusia lain, 3] bangsa-bangsa lain, 4] dengan diri sendiri dan dengan 5] alam. Di sini sudah tersirat adanya pemikiran tentang agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hubungan sosial, ekonomi, politik dan budaya pada umumnya. Karena itulah, kita masih dapat menyaksikan berbagai ritual hubungan dengan TYME/ kekuatan gaib/ roh-roh, dengan tanda-tanda alam [Merapi, misalnya], ramalan-ramalan “orang-orang pintar” mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk yang pribadi, tentang ekonomi, dsb. Tradisi-tradisi tersebut berkembang menjadi upacara-upacara kebudayaan/ kesenian yang tetap menarik untuk dilestarikan, walaupun sudah ketinggalan zaman. Nilai-nilainya perlu direlevankan dengan perkembangan IPTEK modern.

4. Generasi muda mengetahui tentang **“adat” tradisional itu melalui warisan [heritage]** dan tidak mereka pelajari di lembaga-lembaga pendidikan, sehingga alam pemikiran mereka diisi dengan **“adat baru” yang disebut IPTEK + SEN atau IMTAQ, dll.** Walaupun demikian warisan itu tetap hadir dan berproses dalam interaksi/ integrasi dengan yang baru, sehingga dapat menampilkan suatu **identitas/ jatidiri.**

Produk dari proses tersebut selalu berkembang dan berubah, demikian pula wujudnya, baik dalam makna dan kualitasnya. Ideologi, agama dan sikap yang terbuka menjadikan kita lebih berbudaya dalam mengikuti perkembangan. Ketertutupan akan membuat kita termarginalisasi.

5. Dengan mengikuti ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta UUD yang terbuka, kita telah memberikan suatu bingkai jatidiri di mana perkembangan pemutakhiran nilai-nilai budaya lokal termasuk nilai-nilai kepercayaan komunitas masyarakat adat dapat berkembang dan berintegrasi dengan nilai-nilai modern. Dalam pengertian itulah **“pemberdayaan budaya spiritual dan kepercayaan komunitas masyarakat adat dalam memperkokoh jatidiri dan integritas bangsa” berdaya untuk dikembangkan.** *Studi-studi, penelitian, seminar-seminar, penerbitan, muatan lokal, dapat dikembangkan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dan ini dapat terjadi bila ada suatu Departemen Kebudayaan untuk mengarahkan dan mempercepat proses interaksi dan integrasi. Dengan diposisikannya kebudayaan di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, terjadilah kerancuan dalam pengelolaan kebudayaan di daerah-daerah : lembaga-lembaga kebudayaan dan adat kurang mendapat*

perhatian. Sebagai akibatnya, penampilan budaya lokal dalam wujud kemasan-kemasan pariwisata menjadi kurang integratif dan berbobot.

6. **Betapa pun juga, kebudayaan itu dapat berkembang dengan sendirinya secara alamiah**, karena ia tak terpisahkan dari pelaku-pelaku dan pemangku-pemangku budaya itu sendiri — termasuk juga tokoh-tokoh informal dan formal. Adanya budaya-budaya lokal yang berbeda-beda di negara kita mengondisikan kita untuk mengelola dan mengembangkannya sehingga relevan dengan keperluan modern di berbagai bidang kehidupan termasuk politik, pariwisata dan kebudayaan. Studi-studi/ penelitian-penelitian kebudayaan, sosial dan antropologi sudah juga dilakukan oleh para ilmuwan dalam dan luar negeri, dan hasil-hasilnya perlu dikembangkan, dikelola dan disosialisasikan/ dipublikasikan secara luas ke masyarakat. Ini menjadi kewajiban formal dan informal.
7. *Kasus yang telah saya upaya-wujud-kan di Kalteng selama puluhan tahun ini berkenaan dengan interaksi dan integrasi budaya berkaitan dengan budaya local dan khasanah Agama Kaharingan, antara lain :*
 - ♦ *Nyaring Hatala Langit* [Tuhan Langit Maha Kuasa, yang

saya analisa/ telusuri secara budaya/ bahasa bahwa *hatala* itu berasal dari sebutan integratif/ serapan dari Lillahi Ta'ala]. Ini dimaksudkan untuk kerukunan antara umat beragama.

- ♦ *Iii...Nyaho hai mamparuguh tungkupah, Kilat panjang mamparinjet ruang* [Iii...Guntur agung membuka kuanya, Kilat panjang membelah-belah angkasa]. Ini sepasang mantra penciptaan alam semesta yang ber-integrasi semantik/ ber-pararel semantik, yang konsisten dalam sastra suci/ *Sangen/ Sangiang* dan berpengaruh pada sastra Dayak Ngaju/ Kalteng]
- ♦ *Batang Garing/ Haring* [Pohon Kehidupan yang bermotifkan pohon berbatang, berdaun/berbuah, berbuah, berpucuk tombak, berakar gong, berlandas/ dasar ularnaga, ber-khewan, ber-bulan-bintang, berdiri di atas belanga berisi air kehidupan abadi/ *nyalong kaharingan beloem*, yang menjelma menjadi dua makhluk manusia lelaki dan perempuan pertama] Ini saya sosialisasikan secara budaya sebagai Kalpataru Dayak [Kalteng] dan saya jadikan salah satu motif *benang bintik* [batik] dan wujud-wujud seni rupa lainnya.
- ♦ *Keleh itah mamalihara petak danoem; pahewan;*

sepan; kaleka/ eka balampah [lebih baik kita memelihara tanah air; hutan lindung/ konservasi; hutang lindung marga satwa; tempat/ tempat bertapa, — yang sering saya sebutkan dalam makalah-makalah pelestarian lingkungan hidup]

- ♦ *Palangka* [plangka, rumah-rumah/ wadah sajian atau kendaraan manusia pertama turun ke dunia, saya sosialisasi dan aktualisasikan sebagai bangunan plang-plang nama kantor/desa/kota/ gerbang dipadukan dengan motif-motif lain, dan keterkaitannya dengan ibukota Kalteng ‘Palangka Raya’ yang diambil konsep ini ‘*palangka bulaw*’/ palangka emas memberikan suatu karisma pada kota]
- ♦ *Beloem Bahadat* [hidup beradat/ di mana kita bertempat di situ kita beradat, yang sejajarkan dengan nilai-nilai : ‘*di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung*’ [lokal/ nasional], dengan ‘*berbeda-beda itu berhikmah*’ [agamis], dengan ‘*hidup berdampingan secara damai*’ [global ‘*peaceful co-existence*’], dengan ‘*damai di bumi*’, ‘*salam/ saloem*’ atau dengan ‘*oem shanti, shanti, shanti, oem*’, atau ‘*kita orang semua bersaudara*’ [lokal Madura/ Ambon] — padanan-

padanan seperti ini saya sosialisasikan dalam pengantar makalah-makalah kerukunan lokal/ nasional terutama di masa konflik dan pasca-konflik etnik di Sampit/ Kalteng]

KESIMPULAN

- ♦ Khasanah warisan budaya spiritual dan kepercayaan adat/ lokal itu tidak hanya khusus spiritual, tetapi juga terkait dengan natural [alam], sosial, ekonomi dan aspek-aspek kehidupan lainnya.
- ♦ Nilai-nilainya dapat dikembangkan sehingga relevan dengan kehidupan modern, sehingga kearifan lokal dapat menjembatani hubungan kebudayaan di antara berbagai komunitas dalam proses interaksi dan integrasi [daerah, nasional dan global].
- ♦ Gelar budaya seperti ini perlu diselenggarakan setiap tahun secara bergiliran di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Prosidingnya dibukukan, diterbitkan, diinternetkan. Hasil Kongres Kebudayaan V yang lalu tentunya demikian juga — perlu anggaran lebih banyak untuk ini, untuk kebudayaan.

Jakarta, 17 Mei 2006

***] Catatan :**

- Anggota DPD RI dari Kalteng No. 82 [Lahir 5 Juli 1936 di Belawang, Kalteng] 2005-2009

- Koordinator pakat Kaukus Kalimantan DPD RI [2005 -]
- Anggota Panitia Pengarah Kongres Kebudayaan V [2003], Koordinator Kalimantan
- Pensiunan Rektor/ Gurubesar Universitas Palangka Raya [UNPAR], 1981-89/ 2004
- Ketua Presidium Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah [LMMDD-KT], 1984 -
- Ketua Kongres Rakyat Kalteng I/1995, II/1989, III/2001 [KRKT]
- Ketua Musyawarah I Damang Kepala Adat Kalteng [MDKA-KT], 1998
- Ketua Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing [YPK-BG] Kalteng
- Anggota [penerus] Angkatan 45 Kalteng/ Tim Penyelesaian Konflik Angkatan 45 [Pusat], 1994
- Mantan : Wartawan/ Editor Times of Indonesia, Jakarta Times, Kantor Berita PIA/Antara, Associated Press Jakarta, Staff Artist All India Radio New Delhi, Staf Kedutaan Besar RI India, [1955—1970]

- *Alamat : Jl. Damang Salilah C-I-1, Kampus Tunjung Nyaho, **Palangka Raya**; Telp./Fax. 0536 3221484, HP/Fax. 0815 2817819; Bintaro Sektor IX, Jl. Maleo XV No. 5/7, Tangerang, **Jakarta Selatan**, Telp./ Fax. 021 7455343; Gedung MPR [DPR, DPD] RI, Gedung DPD Lt. IV , Sanayan, Jakarta Pusat*

UPACARA ADAT KARATON SURAKARTA SEBAGAI PERWUJUDAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT

Oleh

GRAY Koes Raspiyah, S.S. (GKR Madu Retno)

A. Pendahuluan

Berbicara tentang upacara adat dan tradisi yang hidup di lingkungan Karaton Surakarta tanpa lebih dahulu mengerti tentang konsep kerajawian Jawa, maka akan timbul sebuah penafsiran yang kurang tepat terhadap dunia Karaton yang penuh dengan simbol yang salah satunya adalah upacara adat. Terlaksananya adat istiadat dan upacara menunjukkan keberadaan raja sekaligus merupakan manifestasi keragaman kepercayaan yang dapat memperkokoh jati diri dan integritas bangsa. Hal tersebut merupakan suatu komponen yang tak dapat dipisahkan.

Konsep kerajawian Jawa khususnya Mataram merupakan sebuah organisasi yang berkepentingan mewujudkan *mamayu hayuning jagad* (terwujudnya dunia yang penuh kedamaian) dalam melestarikan *tata tentrem* yang bersifat harmonis. Artinya pelestarian yang didasarkan pada kaidah-kaidah atau pranata yang menuju ke arah ketenteraman. Oleh karena itu harmonisasi merupakan dasar

pijakan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan perjalanan dinamika jaman.

Pelestarian harmonisasi dalam konteks yang dinamik diilhami oleh keteraturan makrokosmos yang sering disebut *jagad gedhe*. Dalam makrokosmos itulah manusia dapat melihat tatanan jagad raya menjadi serasi dan harmonis. Berdasarkan keharmonisan dan keserasian itulah, manusia merasa perlu menyesuaikan dirinya kedalam norma keharmonisan tersebut.

Pandangan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Jawa tidak hanya sebatas perpaduan antara *jagad gedhe* dengan *jagad cilik*, melainkan diterapkan pula dalam keserasian lingkungan hidup batiniah yang dalam bahasa Jawa disebut *tata tentrem* . artinya kehidupan batiniah yang serba tenteram tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi badai kehidupan.

Untuk menciptakan kondisi *tata tentrem* dalam pandangan tatanan Jawa, keberadaan raja mempunyai peranan yang sangat penting. Keberadaan raja selain sebagai kepala pemerintahan juga sebagai pimpinan keagamaan (*panatagama*) yang secara praktis menjalankan praktek keagamaan dengan semua aturan dan upacaranya, perlengkapan materi yang diperlukan, serta struktur keagamaan. Dengan cara itulah raja mempunyai beban moral mempertahankan harmoni dalam lingkungan hidup terhadap

kemungkinan gangguan tata sosial, dan alam semesta yang saling bergantung. Oleh karena itu peranan raja sebagai pelindung sekaligus pembangun mempunyai arti penting dalam menciptakan situasi dan kondisi yang *tata tentrem*.

Pemahaman raja sebagai pelindung dan pembangun dapat dilihat dari konsep tradisi kerajawian Jawa yang bersifat spiritual maupun teknis administrative dalam masyarakat Jawa. Melalui konsep tersebut kondisi *tata tentrem* menempatkan posisi raja sebagai pusat kekuatan spiritual untuk mewujudkan kondisi *tata tentrem*. Salah satu perwujudannya ialah upacara ritual keagamaan, *wilujengan* (selamatan), *garebeg*, *labuhan*, dan upacara lainnya.

B. Upacara Dalam Pandangan Karaton Surakarta

Menurut pandangan Karaton Surakarta, upacara mempunyai makna sebagai tingkatan kehidupan spiritual yang tinggi. Artinya lahirnya upacara berdasarkan ilham pada waktu mengalami perjalanan relegiositas dalam kondisi *Manunggaling Kawula Gusti* (menyatunya hamba dengan Tuhan). Pada tingkatan ini manusia bebas dari kemelekatan dunia dan dapat menguasai seluruh kehendak yang dikehendaki. Manusia yang demikian telah memasuki dalam tiga hal yaitu :

1. *Waseso* (kuasa) artinya kondisi manusia yang dapat menerima

semua keadaan tanpa dipaksakan dan tidak pernah bimbang. Kondisi seperti ini diumpamakan berhembusnya angin yang menyentuh seluruh benda tanpa memilih besar kecil, dan harum atau busuk. Dengan demikian kondisi *waseso* merupakan perwujudan hukum yang bersifat adil (Jawa: adil *dhawahing ukum*).

2. *Hamiseso* (menguasai) artinya kondisi manusia yang telah mencapai posisi lebih. Kondisi ini diumpamakan sebagai air yang berada di lautan bebas, meski dibelah sebilah pedang tajam sesaat kelihatan terpisah, namun akan pulih kembali menyatu tanpa bekas. Manusia pada tingkatan ini mempunyai wewenang memberi dengan kekuatan spiritual. Dengan kata lain *ampuh tanpa tanding* ibarat manusia setengah dewa.
3. *Wicaksono* (bijaksana) artinya kondisi manusia mencapai pada tingkat akhir kesempurnaan yang dipenuhi oleh kebijaksanaan Nur Illahi. Kondisi yang demikian ibaratnya seperti sang surya memancarkan cahaya terang di seluruh alam jagad raya. Ia mempunyai kekuatan menghidupi semua insan di dunia tanpa memandang status dan golongan. Keberadaan selalu memberikan sesuatu yang dibutuhkan manusia dan memberi tuntunan menuju ke arah kedamaian dan keselamatan.

Dengan demikian makna upacara dalam pandangan Karaton

Surakarta merupakan sumber kekuatan spiritual tinggi yang diaplikasikan dalam bentuk seluruh tatacara adat sebagai produk spiritual.

C. Berbagai Macam Upacara Adat Karaton Surakarta

Upacara adat yang berlangsung dan dilaksanakan dalam karaton dilakukan secara semarak antara raja, putra-putrinya, para *sentana* (kerabat atau keluarga), dan para *abdi dalem* (pegawai kerajaan). Pelaksanaan upacara adat tersebut disertai dengan *pisowanan*. *Pisowanan* mempunyai tiga jenis yaitu : *Pisowanan Ageng* (pertemuan bersifat formal), *Pisowanan Tengah* (pertemuan semi formal), dan *Pisowanan Alit* (pertemuan informal). *Pisowanan Ageng* antara lain : *Tingalan Jumenengan Dalem*, *Garebeg Mulud*, *Garebeg Mulud Tahun Dal*, *Garebeg Pasa*, *Garebeg Besar*, Peringatan Tahun Jawa 1 Sura yang disertai dengan *Kirab Pusaka* dan *Labuhan*.

Pisowanan Tengahan terdiri dari *Tingalan Dalem Pawukon* dan Tradisi *Khol Dalem*

Pisowanan Alit meliputi pertemuan rutin menghadap raja pada hari yang ditentukan seperti setiap malam Jumat dan malam Anggara Kasih (Selasa Kliwon).

Pisowanan Pisowanan tersebut dalam komunitas adat karaton mempunyai makna sosiologis dan filosofis. Makna yang bersifat sosiologis misalnya :

1. *Upacara Garebeg* yang dilaksanakan pada setiap peringatan keagamaan merupakan bentuk kontrol pemerintah pusat terhadap kesuburan tanah yang menghasilkan bebarapa tumbuh-tumbuhan yang dipakai sebagai pelengkap pembuat *gunungan*.
2. *Upacara Wisudan* merupakan tali silaturahmi antar suku bangsa yang diwujudkan dalam pemberian gelar kebangsawanan bagi *abdi dalem* dan *sentana dalem* tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan.
3. *Upacara Peringatan 1 Sura* merupakan wujud toleransi karaton terhadap semua kepercayaan dan agama. Bentuk toleransi terlihat dalam prosesi 1 Sura yang meliputi *kirab pusaka*, *samadi* dan salat kaja (sholat tahajud).

Sedangkan makna yang bersifat filosofis misalnya

1. *Upacara Garebeg* yang merupakan sinkretisme antar agama yaitu Hindu dan Islam. Sinkretisme dapat dilihat dalam bentuk *gunungan* yang melambangkan Lingga dan Yoni atau dalam kepercayaan Jawa simbol keberadaan *bapa biyung*. Pelaksanaan *garebeg* selalu jatuh pada hari besar agama Islam.

2. Bentuk kesenian tari yang berupa *Bedhaya Ketawang* dalam Upacara Ulang Tahun Penobatan Raja mempunyai makna menyatunya dunia nyata dan dunia maya yang mana tarian tersebut didalam syairnya menceritakan tentang pertemuan antara pendiri Kerajaan Mataram dan penguasa Laut Selatan
3. Upacara Labuhan yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yaitu : Pantai Selatan, Gunung Lawu, Gunung Merapi dan Hutan Krendhawahana merupakan wujud simbol dari *kiblat papat lima pancer* yang bertujuan mengucapkan rasa terima kasih terhadap alam semesta yang telah memberikan kenikmatan, kesejahteraan dan keselamatan raja beserta keluarganya, ponggawa kerajaan dan seluruh rakyat

Penghormatan terhadap beberapa pusaka karaton yang meliputi benda (lampu, gamelan, keris dan tombak, wayang kulit dan lain-lain) bukan merupakan unsur klenik melainkan sebagai wujud kepedulian pelestarian lingkungan untuk mencapai kondisi *tata tentrem*.

Berdasarkan Fungsi dan Tujuan pelaksanaan upacara adat di Karaton Surakarta, maka dapatlah digarisbawahi bahwa upacara adat dalam komunitas Karaton Surakarta adalah wujud dari salah satu keanekaragaman kepercayaan komunitas adat yang saat ini masih diyakini sebagai ajaran moral dan kebijaksanaan yang bermanfaat sebagai National Character Building.

D. Penutup;

Local Wisdom atau kearifan yang dipunyai setiap suku bangsa di Indonesia ternyata saat ini telah menjadi bagian dari kehidupannya. Oleh karena itu keanekaragaman kepercayaan dalam komunitas adat perlu ditumbuhkan dikembangkan dalam kondisi tarik menarik kebudayaan yang saat ini berkecamuk dalam konteks globalisasi. Kearifan yang dipunyai oleh setiap suku bangsa merupakan identitas jati diri bangsa yang merupakan daya tangkal dalam ketahanan nasional. Hal ini mengingat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan embrio dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mana sumpah tersebut adalah manifestasi dari meleburnya keanekaragaman budaya komunitas adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Furchan. (1992). *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Usaha Nasional Indonesia.
- Benedict Anderson. (2001). *Imagined Commuties*. Jakarta : Insist Pres & Pustaka Pelajar
- Bram Setiadi dan Qomarul Hadi, D.S. Trihandayani. (2001). *Raja Di Alam Republik*. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara.
- Danusaputro, Munadjat, St. (1978). *Hukum Lingkungan*. Bandung : Binacipta.
- Darsiti Suratman. (2000). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830–1939*. Jogjakarta : Yayasan untuk Indonesia.
- DeGraaf & Pigeaud. (2001). *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- De Jong. (1984). *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*. Jogjakarta : Penerbit Kanisius
- Dennys Lombard. (2000). *Nusa Jawa : Silang Budaya 1,2,3*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Djuretna A. Imam Muhni (1994). *Moral & Religi Menurut Emile Durkheim & Henri Bergson*. Jogjakarta : Penerbit Kanisius.
- Drijarkara. (1978). *Percikan Filsafat* Jakarta : Pembangunan Jaya.
- Niels Mulder, (1996). *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

AKTUALISASI DAN REVITALISASI NILAI-NILAI BUDAYA SPIRITUAL UNTUK PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER BANGSA

Disusun Oleh : Suko Sudarso

I. KATA PENGANTAR

Kesediaan saya untuk disertakan sebagai pembicara dalam dialog kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah karena sekedar pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh dalam perilaku penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat **esoterik** (*hubungan pribadi dengan Tuhan*) maupun perilaku budaya spiritual yang bersifat **eksoterik** (*dampaknya dalam hubungan sosial kemasyarakatan*) sehingga terseluruhnya proses terciptanya landasan **spiritual, mental dan moral - etika**.

II. PERILAKU BUDAYA SPIRITUAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai pasal 29 dan pasal 32 UUD 1945 merupakan bagian dari sistem religi di Indonesia yang sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan untuk itu diharapkan makin berkembang untuk turut menciptakan landasan spiritual, mental, dan moral - etik yang mampu menepis dampak negatif dari program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan serta menuntaskan agenda reformasi, dan untuk itu tentunya sangat perlu diusahakan agar terus bertambah sarana untuk menunaikan perilaku budaya spiritual serta memerlukan pembinaan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga hasilnya akan nampak pada kualitas kerukunan intern maupun ekstern demi persatuan dan kesatuan bangsa serta keterpaduan tenaga untuk mendukung program pemerintah seperti tersebut diatas.

Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengenal tiga unsur dasar dari perilaku budaya spiritual, yaitu :

- Unsur Spiritual :

Mengenal **Cahaya Budi** (*Nur pepadanging Allah*) yang mengarah kepada asal dan tujuan hidup pribadi, dan mendasari keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kondisi itu cahaya pribadi siap menghayati cahaya Tuhan, sekaligus menunjukkan keterikatan hidup pribadi pada Kuasa Tuhan Yang Maha Esa.

- **Unsur Mental**

Mengenal kondisi memerankan dayanya budi terhadap **cipta, rasa dan karsa** dalam berkarya yang menunjukkan kondisi dan ciri manusia seutuhnya, bertengger pada **hati nurani**.

- **Unsur Moral – etik**

Mengenal penjabarann budaya spiritual dalam tata-adab dan tata- krama kehidupan lahir bathin yaitu penampilan **BUDI PEKERTI** kemanusiaan yang luhur, mengukir adat budaya.

Ketiga unsur dasar dari perilaku budaya spiritual tersebut dijabarkan dan dipersaksikan bersama dalam sarasehan intern, untuk dikembangkan secara bertahap dalam sarasehan ekstern.

III. PENGHAYATAN KEPERCAYAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DIJALANI OLEH PENGHAYAT DENGAN PERILAKU BUDAYA SPIRITUAL

Perilaku budaya spiritual dijalani oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui beberapa tahap pengalaman spiritual yang sekaligus mengukir eksistensi dan identitas kepercayaannya, dan untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Timbulnya gema spiritual yang berasal dari hidup yang bersemayam dalam diri penghayat sendiri, yang menyebabkan ia teringat dan sadar terhadap Sumber, Awal-Akhir dan Sangkan- Paran hidup itu sendiri. Pengalaman itu disebut **“Beatan Spiritual”**. Ia menjadi religius akibat gugatan yang bergetar dalam dirinya sendiri.

Munculnya pengalaman dan kesadaran spiritual itu adalah sewaktu sendirian atau diwaktu bersama orang lain yang sudah lebih dahulu menyaksikan proses beatan pada dirinya. Hal itu menunjukkan fungsi hidup sebagai **Pamong Pribadi (*fungsi esoterik dalam dirinya sendiri*)**, dan fungsi hidup sebagai **Pamong Umum (*fungsi eksoterik antara sesama*)** yang dapat dipersaksikan dalam kebersamaan.

- Hidup yang bersemayam dalam diri pribadi, sebagai pamong pribadi dan sebagai pamong umum, wenang membangun kondisi pribadi yang berdasarkan utuh - terpadu antara **pikiran – perasaan – dan kemauan** bertimbangan (*berpelenggahan – Jawa*) dalam hati, menegakkan martabat kemanusiaan yang dibina dalam cahayanya (*Nur*) budi, cahaya hidup yang bersinar dalam diri manusia sendiri.

Cahaya Hidup Pribadi itu secara kodrati dipersiapkan untuk mengenali dan menerima sentuhan **SINAR TUNTUNAN HAKIKI** yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Disini letak keterkaitan perilaku budaya spiritual dengan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kepercayaan yang ditempuh dengan perilaku dan persaksian dalam Tuntunan hakiki. Tahap-tahap pengalaman spiritual yang dipersaksikan dengan kesadaran hidup utuh terpadu disebut **“EVOLUSI SPIRITUAL”** atau **“EVOLUSI KESUCIAN”**.

- Pada saat cahaya hidup pribadi mengenali dan tersentuh Sinar Tuntunan Hakiki, pada saat itu pula diletakkan kondisi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semata-mata sebagai perwujudan jalur keterikatan dalam persaksian antara yang hidup dan sumber yang menciptakan

dan memberikan tuntunan hidup.

Pada tahap ini jati diri pribadi secara utuh tertampung oleh Tuntunan Hidup Hakiki atau Guru Jati untuk ditunjukkan secara bertahap hal mata laku, tata-laku, dan makna-laku yang diperlukan, mengarah kepada dua dimensi sekaligus :

- agar cahaya hidup pribadi tidak kehilangan arah yang menuju kepada Sumber Hidup, Awal-Akhir, dan Sangkan-Paran sekaligus sebagai arah-arahan.
 - agar hidup pribadi dapat menyelesaikan siklus hidup di bumi ini.
- Atas kehendak dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa semata-mata, seorang penghayat dapat menyaksikan dirinya dibebani tugas sebagai Pamong Umum, dalam hal itu ia wajib menyediakan dirinya untuk membantu sesama yang menghadapi proses “Beatan Spiritual”, agar prosesnya berjalan lancar dan mengarah kepada berfungsinya pamong pribadinya sendiri yang bertopang pada kesadaran budinya, Pengemban Tugas seperti itu dikenal dengan sebutan **Guru Laku, Pinisepuh, Paranpara, Pamong Umum, Warono** yang jati dirinya sudah tertampung oleh Tuntunan Hakiki atau Guru jati, maka dengan sadar utuh ia sekedar mengikuti mata-laku, tata-laku, dan makna-laku yang terjabar dalam arus

Tuntunan Hakiki, yang kebenarannya, keserasiannya, keselarasannya dapat dipersaksikan bersama dalam kondisi penghayatan oleh segenap penghayat yang hadir, ini merupakan ciri khas dalam syitem perilaku budaya spiritual.

IV. PEMBINAAN KUALITAS KEIMANAN DAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Kondisi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diletakkan (*dalam arti dijabarkan*) pada saat cahaya hidup pribadi (*budi luhur*) mengenali dan tersentuh oleh Tuntunan Hakiki yang bersinar dari Cahaya Ilahi. Sebelum itu, iman dan taqwa baru sekedar bayangan (*image*) yang mulai menggema dalam cahaya hidup pribadi.

Meskipun sekedar bayangan atau gema, tingkat ini saja tidak akan terpenuhi tanpa beatan spiritual.

Tanpa beatan spiritual tidak akan ada satu gema, melainkan rupa-rupa gema yang terbagi antara sekian banyak atribut kehidupan yang senantiasa berada dalam kondisi terbagi dalam kepentingan. Maka beatan spiritual sudah meletakkan pra-kondisi menuju penjabaran keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sedang kondisi penjabarannya ditangani oleh Cahaya Ilahi sendiri. Bagi Penghayat, iman dan taqwa adalah

kodrat Ilahi, bukan konsep manusia, tinggal kapan manusia itu dapat menyaksikan penjabarannya dalam dirinya.

Dalam kondisi terjabarnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*bukan lagi image*), kepada penghayat dalam penghayatannya ditunjukkan arah sangkan-paran yang menuju kepada makin akrabnya cahaya hidup pribadi dengan Cahaya Ilahi. Disitu terdapat kemungkinan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dampaknya akan meningkatkan kualitas kerukunan antara sesama hidup. Semakin tinggi meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*perilaku vertikal*), semakin luas jangkauan dampak sosial kemasyarakatannya (*perilaku horizontal*).

Hal inipun sesuai ciri kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perlu dicek dalam kenyataan mental – fisiknya, benarkah penghayat itu menjadi tenggang rasa, tenggang dalam berpikir dan beramal, atau sebaliknya ia semakin tidak mengingat perasaan – pikiran dan keadaan orang lain.

Selain itu, perlu senantiasa diamati hal kejernihan dan ketulusan dalam penjabarannya dalam rangka mencegah atau sedikit-tidaknya membatasi penjabaran yang bersifat semu dan benar-benar **LAHIR ITU UTUSAN BATIN**.

Daya tahan penghayat dalam menghadapi berbagai

tantangan, tantangan dan cobaan dalam kehidupan mental dan fisik, dibina oleh Tuntunan Hakiki yang mencakup dua dimensi kehidupan sekaligus.

Bahwa untuk menyelamatkan dan menuntaskan siklus hidup di dunia yang fana ini, penghayat harus dapat berkiprah dalam garis lurus yang ditunjukkan oleh arah Sangkan Paran.

V. TERCIPTANYA LANDASAN SPIRITUAL, MENTAL, DAN MORAL – ETIKA DALAM PERILAKU BUDAYA SPIRITUAL

Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makna “Spiritual” terkait pada batin, jiwa, rohani yang sejak dahulu diolah-laku oleh golongan kebatinan, kejiwaan dan kerohanian yang sekarang tercakup dengan istilah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Maka bagi penghayat, spiritual itu ya landasan, ya media perilakunya, yang didalamnya berperan cahaya dan dayanya **budi** terhadap **pikiran (*logika*)**, **perasaan (*estetika*)** dan **kemauan (*etika*)** membentuk **martabat kemanusiaan (*hati nurani*)**.

Dari itu muncul pengertian “**Perilaku Budaya Spiritual**” (*laku yang bertopang pada dayanya budi dalam kesadaran*

spiritual). Spiritual itu merupakan landasan, media dan kunci keberhasilan perilaku penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makna “**mental (*mentalitas*)**” terkait dengan kondisi atau sikap seorang dalam menjalani dan menghadapi berbagai tantangan hidup di bumi ini, kondisi mental secara implisit tergarap dalam perilaku budaya spiritual mengarah kepada budi luhur, maka pendidikan budi pekerti lengkapnya budi pekerti kemanusiaan yang luhur, tidak akan berhasil baik tanpa mengenali nilai spiritual yakni rohnya **BUDI/CAHAYA HIDUP PRIBADI/NUR PEPADANGING ALLAH.**

Tanpa itu pendidikan akan mengalami kejenuhan/tidak hidup.

Moral dan etika (*ilmu pengetahuan tentang moral*) bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan refleksi dari ketinggian tingkat kesadaran mental-spiritual yang dicapai atau pernah dicapainya, yang dalam hal ini usaha yang ditempuh ialah agar dapat memayu hayu diri, dalam arti senantiasa mawas diri (*budi mawas hati*), agar berada dalam kondisi memayu hayu sesama, yaitu mawas kebersamaan (*tepo seliro*). Dan itu tergolong dalam perilaku budaya spiritual.

VI. PENUTUP

Sebagai Penutup dapat kami simpulkan bahwa aktualisasi dan revitalisasi dari nilai-nilai budaya spiritual untuk pendidikan budi pekerti sebagai landasan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter, harus dimulai dengan mengenali banggunya nilai spiritual pada diri bangsa Indonesia yakni rohnya **BUDI/CAHAYA HIDUP PRIBADI** atau dinamakan juga **NUR PEPADANGING ALLAH**, yang secara teknis dapat dipraktekkan bagi yang berminat atau mungkin pada waktu-waktu yang akan datang dapat diajarkan dimuka kelas pada sekolah-sekolah di Indonesia bahkan dunia.

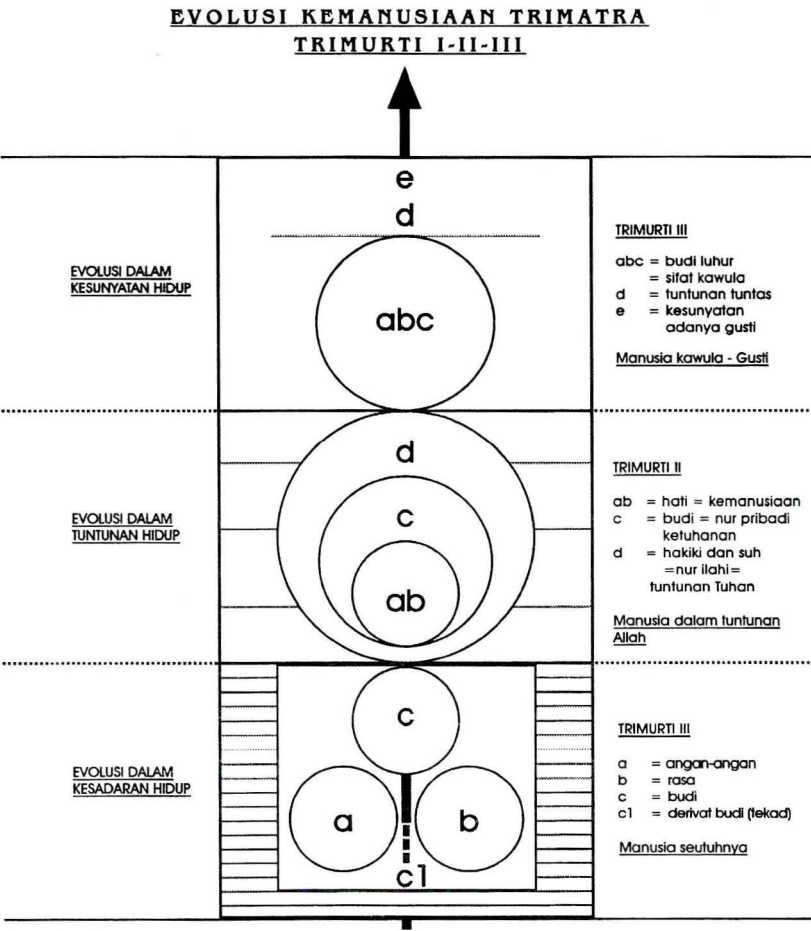
Denpasar, 31 Mei 2006

SUKO SUDARSO

Bahan :

- *Pengalaman dalam penghayatan pribadi*
- *Tuntunan para warono pendahulu*

Gambar



KERAGAMAN BUDAYA SPIRITUAL SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Oleh

ETIKO KUSJATMIKO, SH

I. PENDAHULUAN

Melalui makalah ini, penulis mencoba mengajak kepada semua yang hadir dalam pertemuan ini, untuk berdiskusi bersama dengan hati yang jernih dalam suasana damai penuh rasa kekeluargaan dan merasa senasib sebagai manusia sebangsa dan setanah air yang sama-sama menginginkan perbaikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang dirasakan kurang kondusif akhir-akhir ini.

Betapa tidak, kalau kita mengingat bahwa bangsa kita ini telah dianugerahi banyak keistimewaan oleh Tuhan YME, namun ternyata masih ada warga bangsa yang kurang pandai mensyukuri keistimewaan itu dengan cara merawat dan memanfaatkannya. Kongkritnya, nenek moyang Bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan khususnya kebudayaan spiritual atau budaya untuk menyembah Dzat Tertinggi yang telah menciptakan manusia dan alam dengan segala isinya. Hal

ini jelas tergambar dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia yang memiliki adat istiadat budaya maupun tata upacara ritual untuk setiap kegiatan baik yang dilaksanakan individu masyarakat maupun kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian pada saat ini banyak masyarakat yang justru memilih meniru budaya milik bangsa lain yang belum tentu cocok dengan jiwanya sendiri, jiwa bangsa Indonesia.

Akibatnya, meskipun bumi Indonesia ini apa saja ada, sejak minyak bumi, emas, tembaga, nikel, besi, sampai uranium tersedia di perut bumi negeri ini, namun rakyat relatif tidak bisa menikmati kekayaan itu, kecuali hanya beberapa gelintir manusia saja, dan justru bangsa lain yang jauh lebih banyak menikmati. Ini lebih sering terjadi karena masih ada manusia Indonesia yang perilakunya justru menunjukkan ketidak cintaan kepada Tanah Airnya sendiri Tanah Air Indonesia. Sebab apabila seseorang mencintai Tanah Airnya, dia tidak akan pernah mengorbankan kepentingan bangsa dan negaranya dengan alasan apapun.

Bumi Indonesia ini terkenal sangat subur, bahkan Koes Plus dalam syair lagunya menyampaikan “Bukan lautan hanya kolam susu” serta “tongkat kayu dan batu jadi tanaman”, syair tersebut sangat sederhana namun sungguh sarat makna bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya raya baik alam maupun budayanya tapi mengapa yang terjadi justru saudara - saudara kita banyak yang menderita kelaparan,

kesengsaraan dan ketertinggalan padahal di lain sisi banyak saudara kita yang berlebihan. Kecenderungan yang bisa kita lihat adalah rakyat sudah tidak lagi menghargai ibu pertiwi, negara telah jauh mencampuri urusan yang paling hakiki yaitu penyembahan kepada Tuhan Yang maha Esa, bahkan telah menimbulkan banyaknya konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat . Padahal leluhur kita telah banyak mengajarkan betapa indah perbedaan karena perbedaan itu sendiri adalah bukti ke”Esa”an Tuhan Yang Maha Esa, yang memang menciptakan perbedaan manusia sejak dilahirkan Disamping itu para leluhur kita juga telah mengajarkan bagaimana menghargai alam dengan cara bertani yang santun, beternak yang alami, dan sebagainya yang dulunya tumbuh subur berdampingan dengan adat istiadat setempat.

Oleh karena itu, mari di forum yang terhormat ini, kita bersama-sama mencoba meletakkan ke-AKU-an kita sejenak, menepiskan rasa fanatik kita untuk mendiskusikan mengenai salahnya bangsa kita kini, dan sekaligus merumuskan bersama jalan dan langkah untuk membenarkan khususnya dari sisi dan kaca mata budaya, dan lebih khusus lagi dari sisi budaya spiritual bangsa.

II. BUDAYA SPIRITUAL LELUHUR BANGSA INDONESIA

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki adab dan tata aturan kehidupan yang saling menghargai sesama maupun alam lingkungannya. Sikap ini lahir dari ajaran spiritual

leluhur asli Nusantara yang memang lengkap, tertib, serta adhiluhung, dan apabila diterapkan secara baik akan menjamin manusia hidup damai, tenteram, serasi dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak (yang bersifat ghaib). Keseimbangan alam dijamin tercipta, juga baik dari sisi alam nyata maupun alam yang tidak nyata, sehingga bencana demi bencana tidak akan melanda bumi sesering yang terjadi seperti yang selama ini kita alami.

Dari ajaran inilah generasi penerus diharapkan dapat hidup lebih berkualitas, oleh karena proses adanya (*sangkan paraning dumadi*) maupun pembinaannya telah sarat dengan perilaku pengakuan dan bersujud dengan rasa ke-Tuhanan yang sangat dalam, rapi, teratur dan sarat dengan tata krama dan tata susila semenjak proses perkawinan, kehamilan 4 bulan, kehamilan 7 bulan, kelahiran dan seterusnya yang merupakan perwujudan dari keyakinan adanya kuasa Tuhan terhadap kehidupan manusia.

Tata susila dan tata krama yang merupakan bagian dari budi pekerti luhur asli nenek moyang kita, telah memberikan dasar kepada bangsa Indonesia dalam melaksanakan tata kehidupan sehari-hari untuk saling menghormati, menghargai serta memiliki toleransi. Namun pada kenyataannya ajaran nenek moyang yang adhiluhung tersebut telah banyak mengalami pergeseran dan ditinggalkan oleh para generasi muda/anak bangsa yang justru semakin bangga dengan budaya maupun

perilaku yang datang dari luar (asing). Hal ini tidak terlepas dari ketidakberdayaan kita untuk dapat menunjukkan bahwa budaya yang kita miliki adalah budaya yang benar--benar sarat dengan nilai -nilai Ketuhanan.

Artinya, kita semakin kehilangan nilai - nilai luhur dalam tata kehidupan yang berlandaskan saling percaya dan saling menghargai terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan YME, yang pada akhirnya kita tidak mengerti siapa yang sebenarnya menjadi inti dari ajaran leluhur bangsa ini yang lahir dan diperoleh dari hasil Manembah dan Bersujud kepada Tuhan YME. Dengan kata lain kita telah kehilangan ***Jati Diri*** sebagai bangsa .

Ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kita mengerti dan selalu berpedoman kepada Dasar Negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kristalisasi dari segala ajaran atau nilai-nilai luhur asli bangsa Indonesia yang telah disusun oleh Bung Karno secara sistimatis, tepat dan sesuai dengan tata kehidupan bangsa. Tetapi pada prakteknya Pancasila tidak lagi menjadi pedoman dalam tata cara berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga banyak terjadi penyimpangan maupun pelanggaran pada aturan-aturan baku Yang telah berabad-abad lamanya diajarkan oleh nenek moyang kita, yang disebabkan adanya kepentingan dari segelintir golongan yang tidak menginginkan bangsa Indonesia memperoleh jati dirinya lagi.

III KERAGAMAN BUDAYA

Inti ajaran leluhur bangsa Indonesia yang mampu sebagai perekat keragaman budaya spiritual di Indonesia adalah “Memayu Hayuning Bawana”, dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”, yang pengertian bebasnya meskipun berbeda-beda ritual dalam manembah, pada hakekatnya yang disembah sama juga.

Sekali lagi, ajaran spiritual leluhur bangsa Indonesia bukan hanya sekedar untuk diketahui dan dihafal, melainkan berupa perilaku dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Jadi tidak hanya berbenti pada “Pitutur Luhur” melainkan harus bisa masuk pada tataran “Perilaku luhur”, tidak hanya sekedar berbicara namun juga melaksanakan.

Sehingga kits lebih mengedepankan pada tingkah laku yang “Tuhur” (menghargai, menghormati dan toleran) dengan mengajarkan untuk tidak mudah mengklaim bahwa kepercayaan seseorang atau kelompoknya sendiri itu yang paling benar, sebab itu merupakan pangejawantahan (manifestasi) pengakuan kita kepada Sang Pencipta.

Ajaran Spiritual leluhur Bangsa Indonesia mengajarkan bahwa pada hakekatnya sebagai manusia, sama sekali tidak mempunyai kewenangan otoritas untuk menilai atau memvonis, apakah ibadah *seseorang manusia* diterima oleh Tuhannya atau tidak. Diterima atau

ditolak ibadah seseorang, itu mutlak menjadi wewenang/otoritas Tuhan YME..

Karena ajarannya yang demikian itulah, sehingga toleransinya leluhur bangsa Indonesia terhadap berbagai ajaran spiritual yang masuk di Indonesia sangat tinggi, bahkan mendukungnya, asal sasarannya adalah “Memayu Hayuning Bawana”.

Sejarah membuktikan, bahwa agama Hindu masuk di Nusantara silahkan dan berkembang, agama Budha masuk silahkan dan berkembang dengan damai. Begitu juga agama Kristen, Khatolik, Islam, Konghuchu, Tao dan lain-lain, asal tujuannya adalah dalam rangka memayu hayuning bawana, dipersilahkan bahkan didukung. Namun beberapa dekade belakangan segelintir orang yang karena kepentingan pribadi ataupun golongan telah memanfaatkan agama-agama yang datang di Indonesia dan telah berkembang pesat itu ternyata sudah tidak murni spiritual, namun telah memasuki wilayah politik bahkan telah dipolitisasi. Celaknya lagi politik yang berpengaruh juga bukan politik yang sesuai dengan ajaran budaya leluhur Nusantara, yang memiliki filosofi sangat jauh dari nilai-nilai luhur

Agama yang semula merupakan referensi umat manusia, dalam upayanya menemukan jawaban atas banyak hal, termasuk mengajarkan sistem etika bagi manusia, yang terkait dengan banyaknya larangan melakukan sesuatu yang dapat merendahkan eksistensi kemanusiaannya, menjadi tidak berarti.

BAB IV DAMPAKTERCAMPURADUKNYAKEYAKINANDAN POLITIK

Dampak terburuk yang sekarang dirasakan bangsa Indonesia adalah semakin banyak warga bangsa yang tidak mencintai Tanah Airnya sendiri. Bahkan dengan sistematis Indonesia ingin mereka ubah seperti negara asing asal agama yang mereka yakini barasal. Negara yang mereka banggakan sadar atau tidak adalah bukan Indonesia tetapi negara dimana agama yang mereka yakini yang dibangga-banggakan.. Mereka pada hakekatnya tidak mencintai Tanah Airnya sendiri Tanah Air Indonesia. Kaki mereka menginjak bumi Indonesia tetapi langit Arab atau langit Amerika yang mereka junjung tinggi-tinggi. Wajar bukan kalau Ibu Pertiwi menjadi marah basar dengan berbagai bencana seperti gempa bumi yang disertai tsunami, gunung meletus dan sebangsanya?

Contoh konkrit, aplikasi demokrasi yang diberlakukan di era reformasi ini adalah demokrasi barat yang mereka anggap baik dengan mengutamakan hak dengan hampir mengesampingkan kewajiban, yang jelas-jelas bukan demokrasi ajaran leluhur Nusantara.

Ajaran leluhur Nusantara menekankan tata krama dan tata susila, anak menghormati orang tua, murid menghormati guru, dan proses kelahiran manusia ditata begitu rapi dengan berbagai acara ritual yang lebih menjamin lahirnya manusia-manusia yang beradab (budaya bidang pribadi). Proses pendidikan yang mengutamakan budi

pekerti luhur tidak mereka setuju. Mata pelajaran budi pekerti telah dihilangkan sejak Mendikbud Daud Yusuf, dan setelah sekian puluh tahun kemudian, menghasilkan manusia-manusia yang tidak berbudi luhur, sehingga demonstrasi dimana-mana, pencuri berdasi (koruptor) merajalela. Terbukti cocokkah budaya asing itu untuk mengatur Indonesia? .

Demokrasi yang benar menurut ajaran leluhur kita adalah demokrasi yang berke-Tuhanan, demokrasi yang berKemanusiaan, demokrasi yang mengutamakan persatuan, demokrasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan demokrasi yang tujuan akhirnya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Bandingkan dengan demokrasi yang berlaku sekarang, dengan seenaknya membakar kantor Bupati yang mestinya mereka jaga karena cinta kepada Tanah Airnya, dan sebangsanya, dengan dalih demokrasi. Menyebut presidennya cukup dengan SBY, budaya luhurkah itu ? Sesuai dengan hati nurani manusia Indonesiakah itu ? Demokrasi yang benarkah yang demikian itu?

Dikala pelajaran budi pekerti masih diajarkan dibangunku-bangku sekolah, begitu guru datang menggunakan sepeda, murid berebut menerima sepedanya dan membawakan tasnya karena hormatnya murid kepada guru.

Kemana budaya santun itu menguap, karena pelajaran budi

pekerti telah diganti pelajaran agama. Tidak sukakah budaya santun itu berlaku di Republik ini? Lebih banggakah mereka menyaksikan anak memegang--megang kepala orang tuanya dibandingkan dengan melihat anak berjalan membungkuk dengan rasa hormat dikala berjalan dimuka Bapak/Ibunya?

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau penulis berpendapat kalau ujung benang kusut dalam krisis multi dimensi sekarang ini adalah lebih disebabkan oleh kurang pedulian kita terhadap Budaya Lokal yang menjadi Jatidiri Bangsa. Salama ini bangsa kita lebih kepada ke-Tunggal Ika-an daripada ke-Bhinekaan, padahal keduanya merupakan rahmat yang nilainya sama pentingnya.

Oleh karenanya, tidaklah mengherankan kalau krisis yang kita alami sekarang pada hakekatnya disebabkan oleh akumulasi kekeliruan kebijakan sehingga terjadi krisis budaya dan moral. Krisis budaya atau moral seperti yang terjadi sekarang, dapat diatasi hanya bila ada kemauan politik Pemerintah untuk mengembalikan jatidiri bangsa dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD'45, dan pada saat yang sama digerakkan peran serta masyarakat dari bawah untuk merubah sikap mentalnya sendiri. Tugas pemerintah memotivasi dan memfasilitasi peraturan-peraturan yang adil dan benar.

V. KESIMPULAN

1. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah sejak berabad-abad yang lalu memiliki budaya spiritual sebagai landasan tata kehidupannya.
2. Bahwa telah terjadi pergeseran terhadap nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia, sebagai akibat begitu derasnya budaya luar masuk ke Indonesia dan ketidak berdayaan Pemerintah dalam memberikan proteksi atas budaya asli.
3. Bahwa keberagaman, ketidakseragaman dan perbedaan adalah merupakan unsur penting untuk dapat menghayati arti kebesaran atau KeEsaan Tuhan YME, karena itu semua adalah ciptaanNYA.
4. Bahwa Pancasila adalah kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa, yang harus dilestarikan, ditegakkan, diamalkan dan dijaga agar tetap menjadi dasar dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

KERAGAMAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Oleh

I GUSTI AGUNG ARNAWA

BAB. I

A. PENDAHULUAN

Bung Karno sang proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai penyambung lidah Rakyat Indonesia selalu mengajarkan kepada kita “ *Belajarlah dari sejarah*” karena *Bangsa yang lupa akan sejarahnya* adalah *Bangsa yang hilang, Rakyat, yang tanpa masa lalu* adalah *Rakyat yang tidak lagi memiliki jiwa semangat perjuangan*. dari sejarah kita akan menemukan bahwa Budaya Nusantara memiliki dasar peradaban yang tinggi, sebagai perekat Nusantara.

Keberadaan penjajah yang dengan sistimatis sengaja menghilangkan sejarah asal usul peradaban tersebut, kita dipecah belah , agar tidak bisa bersatu sebagai bangsa yang tangguh , akhirnya kita menjadi bangsa yang kehilangan karakter dan jati

diri aslinya, yang pernah menjadi *perekat Nusantara*. (sri sultan Hamengku Buwono IX, peranan nilai nilai budaya dan adat istiadat dalam memantapkan karakter dan jatidiri bangsa)

Sebelum Indonesia merdeka, semua daerah seNusantara berasal dari berbagai kerajaan dan masyarakat etnik yang mempunyai adatisti adat serta kebudayaan dengan ciri khas masing-masing, selanjutnya lahir kesadaran politik dan diproklamirkan Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bung Karno & Hatta tanggal 17 Agustus 1945, dari sejak diproklamirkan Kemerdekaan Republik Indonesia, kita tanggalkan baju identitas etnik, menjadi satu bangsa “*Indonesia*” dengan tetap membawa budaya lokalnya, kalau diibaratkan sebuah taman yang penuh dengan kembang warna warni yang memperlihatkan keindahan, tetap menyatu di taman tersebut.

B. KERAGAMAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT SEBAGAI PEMERSATU BANGSA.

Bangsa Indonesia yang mendiami wilayah kepulauan Nusantara ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, kepercayaan dan adat istiadat. Dengan keberagaman tersebut makin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah bangsa lain dimuka bumi ini. Tampilan Indonesia secara utuh dimata dunia dengan kekayaan

budaya yang dimilikinya di dukung oleh kesadaran semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*”

Desa adat / Desa pakraman di Bali dengan budayanya yang sangat kental dan kehidupan masyarakat dari Indonesia yang berazaskan *Bhineka Tunggal Ika*, hal ini nampak sangat jelas dalam *kekawin Sutasoma* (tembang wasanta Tilaka) yang menyebutkan : *Rwaneka Hatu winuwus Wara wisur Budaya, shineka Rakwa Ring Apang Parwonosen. Mangkang Jinatwa Ka lawan Shiwa Tua Tunggal shineka Tunggal Ikal Tan Hana Dharma Mangrwa* yang arti nya ada 2 (dua) kebenaran yang terkenal berbeda itu 1 tetapi sebenarnya tidak bisa dipisahkan.

Atas dasar filosofi *Bhineka Tunggal Ika*, kita mengakui adanya kemajemukan sistem budaya Indonesia, walaupun beraneka, kita adalah satu kesatuan dalam Negara Indonesia, untuk menghindari kisah sedih di kemudian hari, perhatian khusus serta penghargaan yang layak bagi masyarakat Adat harus lebih diintensifkan oleh pemerintah.

Kita seharusnya merasa beruntung dengan adanya lebih dari seribu kelompok Masyarakat Adat di Indonesia, keberadaan mereka merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai, ini berarti lebih dari seribu ragam ilmu pengetahuan, kepercayaan terhadap

Tuhan dan kearifan lokal yang telah dikembangkan.

Ada seribu lebih bahasa yang menjadi media komunikasi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkaya pengembangan khasanah bahasa Indonesia yang dampaknya bisa lebih mempekokoh ikatan ke Indonesiaan kita sebagai bangsa kedepan.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan yang tidak bisa lepas dari Agama yang di anut dengan (komunitas Adat sebagai pengamalannya merupakan warisan leluhur budaya bangsa yang sudah lama ada secara turun temurun, diyakini, dihayati dalam pelaksanaan oleh sebagian rakyat Indonesia.

BAB II

A. REGIONAL BALI.

Sekte sekte Agama Hindu berdasarkan prasasti dan kesusastraan yang ada atau pernah di Bali adalah :

1. Brahma - Agenisala
2. Waisnawa - Danu krtih
3. Linggayat - pemujaan Lingga
4. Ganapatha - pemujaan Gana
5. Pasupatha- pemujaan pasupati
6. Siwa sidanta - pemujaan Tri purusa

7. Tantrayana - pemujaan Durga dan Dewi
8. Indra- pemujaan Akasa dan mohon hujan.
9. Kala- Mengupacarai Gunung dan Hutan
10. Shambu - Mengupacari Jagat
11. Bayu- pemujaan terhadap Kekuatan (prana)
12. Saurapatha - pemujaan Surya
13. Banddha - pemujaan wairocana

Peluluhan secara intensif terjadi di Bali setelah periode Mpu Kuturan di Bali tahun 1039 masehi, sampai sekarang dikenal dengan Brahma berstana dipura Desa (shiwa) - wisnu berstana di pura puseh (sada shiwa) - Shiwa berstana dipura Dalem (parama Shiwa).

Sekilas diinformasikan mengenai Bali yang tatanan kehidupannya dimulai dari tingkat Banjar / Desa pakraman (adat), diambil dari beberapa sumber.

Bali adalah merupakan pulau terbesar terdiri lagi dari pulau Nusa penida, pulau Nusa ceningan, pulau Nusa Lembongan, pulau serangan dan pulau Menjangan. Luas wilayah Bali secara keseluruhan 5.632,86 km² (0,29 %) dari luas kepulauan Indonesia. Jumlah penduduk tahun 2004, data kutipan tahun 2005 (dari beberapa sumber) adalah 3.678.779 jiwa. Disebelah barat Bali adalah Jawa Timur, dibatasi oleh selat Bali, ditimur dengan

Lombok dengan selat Lombok, utara terdapat laut Jawa, selatan adalah Samudra Indonesia.

B. LUAS DAN JUMLAH PENDUDUK.

Secara administrasi provinsi Bali dibagi menjadi 9, 1 koLa & 8 kabupaten, sebagai berikut : (data 2004)

1. Denpasar luasnya 123,98 km², jumlah penduduk 430.271 jiwa.
2. Klungkung 315 km², jumlah penduduk 172.542 jiwa
3. Gianyar 368 km², jumlah penduduk 350.316 jiwa
4. Badung 418,52 km², jumlah penduduk 577.843 jiwa
5. Bangli 520,81 km², jumlah penduduk 191.541 jiwa
6. Tabanan 839,33 km², jumlah penduduk 570.228 jiwa
7. Karangasem 839,54 km², jumlah penduduk 354.380 jiwa
8. Jembrana 841,80 km², jumlah penduduk 253.271 jiwa
9. Buleleng 1.365,88 km², jumlah penduduk 704.546 jiwa.

C. JUMLAH UMAT - TEMPAT PERIBADATAN & PEMUKAAGAMA.

penduduk di Bali yang jumlahnya 3.678.779 jiwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama digolongkan sebagai berikut :

1. pemeluk Hindu 3.296.155 jiwa dengan 5.617 tempat peribadatan, 19.739 pemuka agama,
2. pemeluk Islam 285.396 jiwa dengan 642 tempat peribadatan, 1.530 pemuka agama,
3. pemeluk Budha 21.590 jiwa dengan 66 tempat peribadatan, 65 pemuka agama,
4. pemeluk protestan 50.280 jiwa dengan 91 tempat peribadatan, 163 pemuka agama,
5. pemeluk Katholik 25.358 jiwa dengan 33 tempat peribadatan, 80 pemuka agama.

D. JUMLAH ETNIS & KERUKUNAN DALAM UMAT.

Dari lebih dari seribu etnis yang ada di Nusantara, di Bali telah tercatat sebanyak 27 tergabung dalam paguyuban Etnis Nusantara / FKPEN provinsi Bali yaitu :

1. paguyuban Marha Tionghwa / PSMT.
2. NTT / Flobamora
3. Ikatan Keluarga Minang Saiyo
4. paguyuban Madura
5. paguyuban Jawa Barat
6. IKSAT / sangir Talaud
7. IKM / Ikatan Keluarga Minahasa
8. IMMAPA / Ikatan Mahasiswa papua

9. IKAS / Ikatan Keluarga Andalas
10. KKK / Keluarga Kalimantan
11. pagerboyo / Arek suroboyo
12. KKSS / Keluarga Sulawesi Selatan
13. Banyumasan / Banyumas
14. Giri Putro / Gunung Kidul
15. Pakubesi / sidoarjo
16. Ngeksi Gondo / Yogyakarta
17. Laka / Aceh
18. Sindoro Sumbing / Temanggung
19. Kesuma / surakarta Mataram
20. Ikemal / Maluku
21. IKL / Ikatan Keluarga Lumajang
22. IKSHA / Ikatan Keluarga Surakarta
23. Tana Toraja / Toraja
24. Morowali / Tosyintuwua.poso
25. Saroha / Tapanuli selatan
26. Gustar / Blitar
27. Keluarga Besar exs Timor - Timur

Untuk terjalannya beragam etnis yang dalam kesehariannya menjalankan ibadah di Bali sesuai dengan Agama yang dianutnya, kita mengenal adanya “ TRI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA “ yaitu :

1. Kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan sesama umat didalam satu agama yang dianutnya, (Hindu dengan Hindu, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen dstnya).
2. Kerukunan (ekstern) antar umat beragama, yaitu kerukunan sesama umat beragama satu dengan umat beragama lainnya (Hindu dengan Islam, Islam dengan Kristen dstnya)
3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, kerukunan sesama umat pemeluk agama dengan pemerintah.

Di Bali Tri Kurukunan Umat Beragama cukup baik, dari ketiga point yang sama pentingnya, satu di antaranya yang menonjol untuk mendapatkan perhatian serius adalah Kerukunan antar umat beragama, mengingat kalau kurang mendapatkan pembinaan dari para tokohnya, akan sangat sensitif serta akan gampang menimbulkan gesekan-gesekan yang berbau SARA. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka para tokoh agama sepakat membentuk suatu forum yang angkat dengan nama Forum Komunikasi Antar umat Beragama tanggal 12 pebruari 1999, difasilitasi oleh Kepala Kantor wilayah Agama provinsi Bali (FKAUB) .program kerja tahunan yang selalu diangkat adalah:

1. Secara kontinyu mengadakan rapat di sekretariat masing-masing dan ataupun bergantian ditempat yang disepakati

bersama sesama pengurus,

2. Mengadakan sosialisasi tentang arti atribut / simbol agama masing-masing, untuk saling mengenal dan saling menyayang,
3. Secara terpadu melakukan kunjungan pembinaan ke wilayah pedesaan / perkotaan dalam rangka mengkampanyekan hidup rukun (menyama braya) yang sudah diwarisi sejak dari jaman dahulu kala,
4. Sedini mungkin , selalu mengadakan musyawarah antar umat beragama dalam menyelesaikan selisih paham yang ada dimasing-masing umatnya,
5. Selalu mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah dalam pelaksanaan program kerja demi tercapai serta terciptanya hubungan yang harmonis antara umat beragama dengan pemerintah.

Agama dapat dijadikan sebagai perekatnya persatuan dan kesatuan karena dalam praktek keagamaan ataupun dalam pelaksanaan ajaran agama , semua anggota masyarakat akan terlibat didalamnya, baik kegiatan agama yang dilakukan secara intern agama masing-masing dan ataupun antar agama, maka disitu akan terkumpul para pemeluk agama, serta disitu mereka dapat saling memahami satu dengan yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan kerukunan hidup beragama, perlu dihayati butir-butir kerukunan hidup yang ada pada setiap ajaran agama, sesuai dengan cara masing-masing demi menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Umat Hindu dalam kerukunannya dalam hidup dikutip dalam sloka “*VASUDHAIVA KUTUMBAKHAM*” yang artinya seluruh dunia adalah satu keluarga besar, manusia adalah saudara kita, alam adalah rumah kita, hewan dan tumbuhan adalah teman kita, kalau kita ada masalah marilah kita selesaikan secara kekeluargaan.

Demikian juga halnya dengan umat lainnya, mempunyai inti yang sama untuk hidup dalam kerukunan, tidak satupun agama yang menyarankan umatnya saling menyakiti, kecuali menyimpang dan atau mengikuti aliran sesat.

Dengan telah terbentuknya Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) di Propinsi Bali, maka sedini mungkin masalah yang ada tendensi mengarah kekonflik dapat dengan segera diselesaikan.

Surat peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 & Nomor 8 tanggal 21 Maret tahun 2006 dalam BAB II, pasal 8 sebagai berikut :

- i. FKUB dibentuk di provinsi dan Kabupaten / Kota
- ii. pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah Daerah,
- iii. FKUB sebagai mana dimaksud pasal (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

pasal 9

(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat,
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, dan
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat

(2) FKUB. kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat,
- b. Menampung aspi rasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dari masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota,
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dari kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dan
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah

E. TATANAN DESA DI BALI

Banjar & Desa pakraman adalah merupakan tatanan kehidupan terdepan masyarakat di Bali yang dalam proses selanjutnya berkembang seperti apa yang telah terjadi sampai saat sekarang. Desa adalah suatu perkataan yang sangat populer di Bali, dipergunakan untuk menunjuk suatu permukiman penduduk

yang beragama Hindu, desa dalam pengertian ini menunjukkan suatu wilayah yang dihuni oleh penduduk yang beragama Hindu, kecuali di beberapa desa dalam kota atau desa-desa yang terletak di pinggir pantai yang penduduknya sudah bercampur dan terdiri dari beberapa agama. Jumlah Desa pakraman sampai data terakhir adalah 1.429 dengan karakter tersendiri, namun masih dalam kesatuan umat Hindu di Bali.

Kapan sesungguhnya mulai didirikan desa di Bali sebagai suatu kesatuan hukum masyarakat ???, suatu jawaban yang belum pasti dan masih memerlukan penelitian mendalam. Sekedar ceritera yang dikutip dari lontar Markandya purana antara lain sebagai berikut :

1. Seorang bernama Maharsi Markendya setelah bertapa di gunung Rawung (*Jatim*) datang ke Bali diikuti ribuan pengikutnya menuju suatu tempat yang dinamakan Taro, kecamatan Tegalalang - Gianyar, maksudnya akan membuka hutan dengan merabas, akan dijadikan ladang pertanian dan tempat tinggal, namun pekerjaan ini tidak berhasil -banyak pengikutnya di serang binatang buas, sakit tanpa sebab yang menyebabkan kematian,
2. Maharsi tidak putus asa, beliau kembali bertapa ke gunung Rawung. Setelah mendapat petunjuk gaib, kembali ke Bali

dengan pengikut yang lebih banyak, setelah sampai tidak langsung merabas hutan tapi terlebih dahulu menyelenggarakan upacara keagamaan Hindu yaitu Bhuta Yadnya di kaki Gunung Agung (*pura Basukian*) dengan menanam panca Datu atau 5 jenis logam mulia (emas, perak, tembaga, besi, perunggu) sebagai pelengkap.

3. Setelah upacara selesai, barulah beliau bersama pengikutnya kembali kedesa Taro untuk melanjutkan pekerjaan membuka hutan dan berhasil dengan baik, saat itu juga beliau membagi tanah-tanah tersebut untuk di garap oleh para pengikutnya, tempat membagikan tanah--tanah tersebut diberikan nama tanah piakan (*desa pi akan*), selanjutnya para pengikut Maharsi menyebar ketanah--tanah (*desa-desa lainnya*).

Sejak jaman Bali kuno (abad IX) masyarakat Bali telah mengenal masyarakat desa di sebut "*Kraman*" tempat atau wilayah dimana kraman berada disebut "*Desa*" atau Desa pakraman (wanua, tani)

Tatanan kehidupan bermasyarakat dalam Desa pakraman di Bali selain berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, juga diatur dengan Hukum Adat. Yang di maksud dengan Hukum Adat dalam hal ini adalah seperti apa yang telah dirumuskan dalam seminar pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975 yaitu Hukum Adat

diartikan sebagai Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.

Desa adat mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan dalam kekuasaannya ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram,
2. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat religius seperti membina dan mengembangkan nilai-nilai agama Hindu, memelihara adat istiadat yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara (darmaning agama lan negara)
3. Kekuasaan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan antara warga desa atau berupa tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, aturan-aturan inilah yang dikatakan awig-awig.

II. DESA PAKRAMAN

Pemahaman Desa pakraman sebagai pengemban fungsi Keagamaan di samping pengemban fungsi Adat dan

Kebudayaan “adalah sangat penting , sel alu mengingatkan kita semua agar ajaran Agama Hindu Bali senantiasa dijadikan nilai yang utama dalam kehidupan dan pelaksanaan sistim Adat. Tidak disadari Desa pakraman pengemban tugas & fungsi ke Agama an yang melekat dengan Tradisi / Adat , sesuai dengan dalil “*Receptio in Complexu U* dari *Van Den Berg.*” Tidak seperti komoditas Adat lainnnya di Indonesia, karena tatanan Adatnya berpisah dengan Agama yang dipeluknya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah propinsi Bali nomor 3 tahun 2003 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2001 tentang Desa pakraman, sesuai bab I - ketentuan pasal 1 dikatakan antara lain:

- (4) Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga / kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri,
- (5) Banjar adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian desa pakraman / adat,
- (6) Krama desa / krama banjar adalah merekayang menempati karang desa pakraman / karang banjar

pakraman dan atau bertempat tinggal diwilayah desa / banjar pakraman dan atau bertempat tinggal diwilayah desa pakraman / karang banjar atau ditempat lain yang menjadi warga desa /banjar pakraman

- (7) Krama pengempon / pengemong adalah krama desa pakraman/banjar pakraman yang mempunyai ikatan lahir batin terhadap kahyangan yang berada diwilahnya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, peralatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara tersebut
- (8) Krama penyungsong adalah. krama desa pakraman / banjar pakraman yang mempunyai ikatan batin terhadap suatu kahyangan dan atau ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan, perawatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara berupa dana punia,
- (9) palemahan desa pakraman adalah wilayah yang dimiliki oleh desa pakraman yang terdiri dari satu atau lebih palemahan banjar yang tidak dapat dipisah-pisahkan,
- (10) Tanah ayahan desa pakraman adalah tanah milik desa pakraman yang berada baik di dalam maupun di luar desa pakraman,
- (11) Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau banjar pakraman yang dipakai sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tri hita karena sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa pakraman di propinsi bali,

(12) Prajuru desa pakraman / banjar pakraman adalah pengurus desa pakraman / banjar pakraman di propinsi bali,

(13) Paruman desa pakraman . Banjar pakraman adalah paruman permusyawaratan / permufakatan krama desa pakraman / banjar pakraman yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam desa pakraman / banjar pakraman,

(17) Pacalang adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar pakraman dan atau di wilayah desa pakraman.

Desa pakraman di provinsi Bali yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, yang memiliki otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan,

Desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama hindu dan nilai-nilai budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan dan dibudayakan.

peraturan daerah provinsi Bali nomor 3 tahun 2003 tanggal 16 maret 2003, di undangkan di Denpasar tanggal 14 maret 2003, lembaran daerah provinsi Bali tahun 2003 nomor 11 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Bali nomor 3 tahun 2001 tanggal 21 maret 2001, diundangkan di Denpasar tanggal 8 mei 2001 lembaran daerah propinsi Bali tahun 2001 nomor 29, seri d nomor 29 tentang Desa pakraman. beberapa pointer yang dianggap paling dominan diangkat dari keseluruhan isi peraturan daerah ini antara lain:

BAB III.

TUGAS DAN WEWENANG DESA PAKRAMAN

pasal 5

DESA PAKRAMAN MEMPUNYAI TUGAS SEBAGAI BERIKUT:

- a. Membuat awig-awig
- b. Mengatur krama desa
- c. Mengatur pengelolaan krama desa,
- d. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan,

- e. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan “ paras-paras, sagilik saguluk, salunglung sabayantaka “ (musyawarah mufakat),
- f. Mengayomi krama desa.

pasal 6

DESA PAKRAMAN MEMPUNYAI WEWENANG SEBAGAI BERIKUT:

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat,
- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan tri hita karana,
- c. Melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar desa pakraman.

BAB VIII.

PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN DESA

PAKRAMAN

pasal 13

1. pemberdayaan dan pelestarian desa pakraman di arahkan kepada hal-hal berikut
 - a. pembangunan krama sesuai dengan budaya Bali,
 - b. Terwujudnya pelestarian kebudayaan di desa pakraman,
 - c. Terciptanya kebudayaan daerah bali di desa yang mampu menyaring secara selektif nilai-nilai budaya asing
 - d. Terciptanya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi desa pakraman dalam upaya :
 1. Meningkatkan harkat dan martabat serta jati diri,
 3. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang.
2. Dalam melaksanakan pemberdayaan dan pelestarian desa pakraman sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendorong terciptanya.:
 - a. Sikap demokratis dan objektif dikalangan prajuru dan krama desa pakraman masing-masing,
 - b. pelestarian adat dan budaya bali dengan tidak menutup pengaruh nilai budaya lain yang positif

mengacu peraturan daerah nomor 3 tahun 2001 yo.nomor 3 tahun 2003, maka disetiap Kecamatan dibentuk Majelis Alit, ditingkat Kabupaten / Kota dibentuk Majelis Madya dan ditingkat provinsi dibentuk Majelis Utama.

III. VISI & MISI DESA PAKRAMAN.

Menuju satu payung langit Bali

visi Majelis Desa pakraman adalah terwujudnya persatuan krama desa pakraman yang harmonis dan terjaganya adat dan sosial budaya bagi yang di landasi agama hindu.

Misi Majelis Desa pakraman adalah :

- 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan desa pakraman*
- 2. Menciptakan kesukertan di bali*
- 3. Mengayomi adat dan sosial budaya bali*
- 4. Meningkatkan sumber daya krama desa pakraman*
- 5. Melestarikan lingkungan dan tanah bali.*

Dalam setiap awig-awig Desa pakraman yang menjadi pegangan dasar awig-awig banjar ada tersurat kalimat sukertha tata parhyangan, sukertha tata pawongan, sukertha tara palemahan, intinya secara umum adalah agar dapat terciptanya keharmonisan dalam kehidupan

warga untuk menjaga wilayahnya serta menjalankan kewajiban sebagai umat beragama.

Desa pakraman benteng pertama dan terakhir Bali

Agama Hindu adalah jiwanya Bali

Budaya adalah nafasnya Bali

Desa pakraman ada tah urat nadinya Bali

*Bali - Agama Hindu - Budaya Bali - Desa pakraman tidak
dapat*

*dipisahkan dan berada da lam satu kesatuan sistim
semua itulah identitas Bali, sebagai benteng ia harus
selalu kokoh, harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan
agar tidak lemah dan rapuh,*

*kalau Desa pakraman lemah dan rapuh
maka dan ambruklah Bali.*

*oleh karena itu pemberdayaan Desa pakraman
harus dilakukan secara berkesinambungan
dan tak pernah berhenti.*

BAB III

KEPERCAYAAN MELALUI YADNYA.

I. SEKILAS TENTANG YADNYA.

Dalam kitab Atharwa Weda di sebutkan bahwa melakukan upacara yadnya adalah merupakan langkah yang di yakini sebagai kegiatan beragama Hindu yang amat penting, karena Yadnya adalah salah satu Penyangga Bumi. pemeliharaan kehidupan didunia ini dapat berangsur terus sepanjang yadnya terus menerus dapat dilakukan oleh umat manusia. Yadnya adalah pusat terciptanya alam semesta (Bhuwana Agung) sesuai uraian dalam Yayur weda. Disamping sebagai pusat terciptanya alam semesta, Yadnya juga merupakan sumber berlangsungnya perputaran kehidupan yang dalam kitab Bhagawadgita di sebut *cakra Yadnya*, kalau Cakra Yadnya ini tidak berputar maka kehidupan ini akan mengalami kehancuran. Wedha mengatakan, Tuhan menciptakan alam semesta ini berdasarkan Yadnya, karena itu manusia yang bermoral akan merasa berhutang kepada Tuhan. Untuk menyampaikan rasa berhutang kepada Tuhan, umat Hindu melakukan *Dewa Yadnya*, sebagai rasa bakti umat kepada Tuhan, dan melakukan *Bhuta Yadnya* untuk memelihara semua ciptaan Tuhan. Rasa berhutang kepada leluhur (pitra) diwujudkan dengan berbakti kepada leluhur atau pitra dalam bentuk *Pitra Yadnya*

dan mengabdikan kepada keturunan, karena keturunan tersebut pada hakikatnya adalah leluhurlah yang menjelma. Mengabdikan kepada keturunan dalam bentuk *Manusa* Yadnya. Terciptanya ajaran ajaran moral spiritual dan ajaran mengenai kehi dupan duniawi yang baik menuju kesejahteraan hidup jasmaniah, merupakan jasa jasa para Rshi. Manusia yang bermoral akan merasakan betapa besarnya hutang umat manusia pada para Rshi tersebut. Untuk menunjukkan rasa berhutang itulah umat manusia wajib beryadnya kepada para Rshi dan inilah yang disebut *Rshi Yadnya*.

2. SKETSA MANUSIA BERAGAMA HINDU.

Dasar & tujuan hidup manusia adalah 4 pokok kebutuhan hidup (*catur purusa artha*) yaitu

1. Dharma, menjunjung tinggi kebenaran,
2. Artha, mendapatkan materi dengan kebenaran,
3. Kama, menikmati kesenangan . Materi dengan baik, benar,
4. Moksa, menuju kebahagiaan yang kekal dan abadi,

Mencapai kesejahteraan atau kemakmuran hidup masyarakat manusia dan makhluk. Menyelaraskan kehidupan lahiriah dengan kehidupan bathiniah sehingga terwujudnya suatu keharmonisan dalam kehidupan di dunia.

Kalau catur purusa artha diamaliahkan didalam

melaksanakan segala bentuk kegiatan haruslah berdasarkan ketentuan / kebenaran (*dharma*), kemampuan (*artha*) kemauan (*kama*) barulah akan mendapatkan kebahagiaan yang seimbang lahir batin (*moksa*)

untuk menjalankan dan mencapai catur purusa. artha didasari oleh panca cradda (5 keyakinan) yaitu:

1. widhi cradda, percaya adanya ida sang hyang widhi,
2. Atma cradda, percaya adanya jiwa atma,
3. Karma pela cradda, percaya dengan perbuatan karma, baik yang dibuat, baik hasilnya, buruk yang dibuat buruk hasilnya,
4. Punarbhawa cradda, percaya adanya reinkarnasi (*kelahiran kembali*)
5. Moksa cradda, percaya adanya kehidupan yang lain bersifat kekal abadi.

Jika keyakinan tersebut tidak dijalankan , akan tidak ada artinya, umat hindu menyatakan keyakinan itu dengan melaksanakan 4 (*empat jalan*) yang disebut catur marga :

1. Bhakti marga, adalah usaha untuk mencapai kesempurnaan dengan jalan sujud bhakti kepada kehadiran ida. sang hyang widi / manifestasi “ nya “

2. Karma marga adalah jalan atau usaha mencapai kesempurnaan dengan melakukan kewajiban mengabdikan dengan berbuat amal kebajikan untuk kesejahteraan umat manusia serta sesama makhluk,
3. Ynana marga adalah suatu jalan atau usaha mencapai kesempurnaan dengan mempergunakan kebijaksanaan filsafat atau- pengetahuan,
4. Yoga marga adalah suatu jalan atau usaha mencapai kesempurnaan dengan membersihkan pikiran dan batin.

(Menjalankan catur marga adalah dengan menghaturkan bhakti suci yang disebut yadnya. Yadnya adalah bahasa sanskerta yang berasal dari kata “*Yad*” berarti memuja dan mengadakan selamatan, *Yadnya* adalah pemujaan yang suci, dilakukan dengan perasaan tulus iklas dan harus dilakukan pada hari-hari tertentu . Yadnya mendidik kita untuk mendekatkan diri pada alam lingkungan sebagai kepercayaan terhadap yang ada dan yang tidak ada (*sekala & niskala*) ada 5 persembahan yang lazim disebut *panca Yadnya* yaitu :

1. Dewa. yadnya, suatu pengorbanan ditujukan kepada Tuhan / Ida sang Hyang widhi Waca dengan segala manifestasi “NYA”
2. pitra yadnya, pengorbanan yang ditujukan kepadanya leluhur

/ yang telah mendahului kita,

3. Rsi yadnya, pengorbanan yang ditujukan kepada orang-orang suci dan pimpinan agama,
4. Bhuta yadnya, pengorbanan yang ditujukan kepada para butha dan segala makhluk ciptaan Tuhan yang lebih rendah dari manusia,
5. Manusa yadnya, pengorbanan yang ditujukan untuk pemeliharaan umat manusia mulai dari masih dalam kandungan sampai akhir hidup manusia itu.

Agar panca yadnya tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan maksud & tujuannya, maka dalam pelaksanaannya tetap berpegang teguh pada hari / waktu yang tepat, disebut wariga dan biasanya ditentukan oleh

1. 10 wewaran,
2. 30 wuku,
3. 12 sasih .

Mulat sarira : introspeksi diri sebelum melakukan sesuatu

Tat TWam Asi : Aku adalah engkau , engkau adalah aku

BAB IV

PERMASALAHAN.

Membaca semua uraian tersebut diatas, permasalahan ada dan kadang-kadang muncul kepermukaan adalah :

1. Apakah suatu kepercayaan komunitas adat yang dilakukan oleh umatnya tidak akan mengurangi dan atau menghilangkan umatnya menjalankan ajaran Agama yang dianutnya ???
2. Apakah keragaman kepercayaan Komunitas Adat justru dapat menimbulkan gesekan / benturan dari para umatnya ???
3. Di Bali khususnya, apakah dengan banyaknya upacara adat ritual keagamaan, pelaksanaannya ada yang berbeda untuk menyembah kepada Tuhan / Ida Sang Hyang widhi Waca, tidak menimbulkan gejolak ???

BAB IV

PEMECAHAN PERMASALAHAN.

Membaca semua uraian tersebut di atas, untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam paper ini dapat diajukan langkah-langkah sebagai berikut antara lain:

1. Hendaknyalah dalam setiap melaksanakan kegiatan yang merupakan suatu kepercayaan dari komunitas adat untuk menyembah Tuhan, tidak menyimpang dari ajaran yang telah diberikan dan atau sesuai dengan apa yang telah diwarisi dari leluhurnya,
2. Antara para pemuka Adat selalu Hening, Eling, waspada mengarahkan serta membimbing umat / pengikutnya dalam melaksanakan kegiatan kepercayaan yang dianutnya,
3. Di Bali dalam setiap waktu tertentu & routine mengadakan upacara ritual Agama melalui kegiatan adat yang sudah berjalan dari ribuan tahun, hendaknya sketsa umat beragama Hindu dapat dipakai acuan, sehingga gejolak yang timbul baik dari intern umat Hindu dan ataupun ekstern umat Hindu dapat dihindari.

BAB VI

SIMPULAN & HIMBAUAN.

1. SIMPULAN.

Berangkat dari apa yang telah diuraikan dari masing--masing Bab,dapatlah diambil suatu kesimpulan umum bahwa :

1. Desa di Bali sudah ada jauh sebelum Republik Indonesia berdiri,ada desa Bali mula, ada desa setelah Mpu Kuturan menata menjadi Desa pakraman,
2. Bali secara Nasional adalah pulau yang sangat kecil, tapi mempunyai keunikan tersendiri,
3. Perda.3 tahun 2001 / 3 tahun 2003 tentang Desa pakraman adalah merupakan Forum Komunikasi Desa pakraman, dari tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten / Kota dan tingkat provinsi Bali, menuliskan kembali apa yang telah dilaksanakan dari sejak dahulu kala dengan menyelipkan beberapa pasal yang bersifat koordinasi antar Desa pakraman,
4. Banyaknya etnis di Bali dengan berbagai kepercayaan yang dianut untuk menjalankan ibadahnya,hidup ditengah masyarakat mayoritas beragama Hindu yang menyembah Tuhan / Ida Sang Hyang widhi Waca melalui yadnya sebagai kepercayaan yang melekat,
5. Keberagaman kepercayaan Komunitas Adat mampu sebagai

pemersatu masyarakat di Bali

II. HIMBAUAN.

KEPADA SEMUA KRAMA DI BALI

Ingat selalu kata bijak yang telah diwariskan oleh leluhur kita sebagai perekat dalam kehidupan yang indah, penuh warna warni

- *pasikian, paiketan, pakilitan, pasubayan,*
- *Gilik saguluk, salunglung sabayantaka, sarpanaya*
- *Lulut asih, mulat sarira, Tat Twam Asi,*
- *vasudha i va Kutumbakam*

KEPADA PESERTA.

- Apapun yang di dapat dari pertemuan ini seperti ; barat satu titik dihampanan luas, syukurilah dan kembangkanlah semaksimal mungkin, yang baik (relatif) diteruskan, kurang baik agar dibuat baik,
- sebar luaskan materi yang telah diperoleh kepada keluarga secara beruntun agar dapat menambah wawasan setidaknya lebih dapat memahami peran komunitas adat dalam proses pemersatu bangsa mulai dari tingkat yang paling kecil.

KEPADA PENYELENGGARA,

- . Rumusan hasil pelaksanaan kegiatan ini yang telah didiskusikan dapat dimediasi / dipromosikan, dilaporkan & di serahkan kepada yang berwenang, dipakai salah satu masukan dalam pemersatu bangsa,
- . Penyelenggaraan kegiatan ini agar secara berkesinambungan dengan mengangkat tema yang strategis diadakan secara koordinasi, hasilnya disosialisasikan.

BAB VII

PENUTUP.

Demikian tulisan uraian ringkas ini dapat disajikan dengan segala kekurangannya, semoga saja dapat diterima dengan baik, walaupun hasilnya masih sangat banyak kurang dan atau ada yang menyimpang dari materi yang diberikan.

Terima kasih atas waktu yang disediakan oleh panitia dan diberikan kesempatan bertemu muka dengan peserta, karena akan dapat menambah teman sebagai kerabat yang akan diajak turut bersama sesuai bidang masing masing.

Mohon maaf bila dalam penulisan, membawakan materi ini ada suatu yang kurang, baik isi tulisan dan ataupun cara membawakan

yang kurang pas, semoga ada manfaatnya.

KUTIPAN KALIMAT BIJAK.

Indriyanam ni rodhena ragadwecaksayana cam
Ahimsaya ca bhutanam amritatwaya kalpate

DAFTAR PUSTAKA.

PENYAJI MENYUSUN TULISAN INI DALAM BENTUK MAKALAH DENGAN MENGAMBIL BEBERAPA SUMBER YAITU :

1. SENI BALI BERPESTA, CATATAN KRITIS PKB, DINAS KEBUDAYAAN PROPINSI BALI, TAHUN 2002,
2. KARYA TIDAK DITERBITKAN, KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA BALI, TAHUN 2005,
3. PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 03 TAHUN 2001 & NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG DESAPAKRAMAN,
4. MELANGKAH KEARAH PERSIAPAN YADNYA, DISUSUN OLEH SURAYIN, IDA AYU PUTU, PENERBIT PT.UPADA SASTRA TAHUN 1992,
5. AJARAN AGAMA HINDU (MANIFESTASI SANG HYANG WIDHI) OLEH DRS.I.B.PUTU SUDARSANA, MBA.MM PENERBIT YAYASAN DHARMA ACARYA, TAHUN 2003,
6. PERANAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DALAM MEMANTAPKAN KARAKTER DAN JATIDIRI BANGSA - DITULIS OLEH SRI SULTAN HAMENGKU

BUWONO)(- KARYA TIDAK DITERBITKAN,

7. DHARMA WACANA, IDA PEDANDA GEDE MADE GUNUNG YANG DIRANGKUM DALAM BUKU OLEH YAYASAN WIDYA SHANTIDHARMA, PENULIS WAYAN P.WINDIA, TAHUN 2004,
8. EKSISTENSI DESA ADAT DI BALI, PENULIS I WAYAN SURPHA,
9. THE 7 HABITS OF HIGLY EFFEKTIVE PEOPLE (7 KEBIASAAN MANUSIA YANG SANGAT EFFEKTIF), STEFHEN R. COVEY / COVEY LEADERSHIP CENTER.
10. ANALISIS - DIMENSI-SOSIAL PARTISIPATIF DESA ADAT DALAM KEPENDUDUKAN DI BALI, TIM PENERBIT & DISBUD TAHUN 2001
11. MEMBANGKITKAN JATI DIRI MASYARAKAT BALI, PEMERINTAH PROVINSI BALI, BIRO KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - 2005.

BIO DATA PENYAJI.

NAMA : DRS.AGUNG ARNAWAMBA.MM.

ALAMAT : 1.JALAN GUNUNG KAWI 44 -
ALANGKAJENG
PEMECUTAN-DENPASAR BARAT-
(O361) 245444

RUMAH : 2.JALAN SOKA GG.KERTHAPURA II / 2
KESIMAN KERTHALANGU -
DENPASAR TIMUR, 462578

PEKERJAAN : KEPALA BIRO (PURNABAKTI) DI PT.
BANK BPD.BALI

PENGABDIAN : 1 BANDESA DESA PAKRAMAN
DENPASAR,
2.KETUA BADAN PENGAWAS LPD.
DENPASAR,
3.BANDESA ALIT DESA PAKRAMAN
DENBAR,
4.MANGGALA PARUM BANDESA KOTA
DENPASAR,

5. PTJH.BANDESA AGUNG / MAJELIS
UTAMA DESA PAKRAMAN (*MOP*)
BALI
6. POLISI KEHORMATAN POLDA BALI.

PENGALAMAN:

1. KETUA KELATNAS PERISAI DIRI
BADUNG,
- 2 .SEKT.PENGDA.KELATNAS PERISAI
DIRI BALI,
3. KETUA DEWAN MAHASISWA UNMAR
DENPASAR,
4. KETUA BKS.SENAT/SEMA . APTS
.BALI,
5. KETUA BIRO PMD.KNPI.BALI,
6. BENDAHARA KNPI BALI,
7. KETUA KNPI BADUNG,
8. KLIAN BANJAR,
9. PENGURUS PELTI BALI,

10.DOSEN LUAR BIASA DI D3/FE.UNUD.

11.DOSEN LUAR BIASA LAB.
PERBANKAN FE. UNWAR

12. NARA SUMBER DALAM BEBERAPA
SEMINAR PERBANKAN / DESA
PAKRAMAN.

KERAGAMAN KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Oleh

PUTU WINDIA, SH. MSi

***Nganten Ngerorod*¹**

**Menjadikan Budaya Lokal dan Kepercayaan Komunitas Adat
Sebagai Alat Pemersatu Bangsa**

Wayan P. Wndia²

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terutama kalau dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, budaya serta kepercayaannya. Wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, penduduknya ratusan juta, terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa,

1 Disajikan dalam acara “Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat”, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 30 Mei - 1 Juni 2006, bertempat di Taman Budaya, Denpasar.

2 Wayan P. Windia, seorang staf dosen Hukum Adat Bali, Fakultas Hukum Unud, Denpasar.

agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta kepercayaan komunitas adat. Kedua kepercayaan tersebut merupakan warisan yang diyakini dan dihayati oleh rakyat Indonesia secara turun temurun.³ Dalam kepercayaan tersebut terkandung nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan pedoman dalam usaha pengembangan jati diri dan integritas bangsa. Eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepercayaan komunitas adat sebagai warisan budaya luhur bangsa dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945.⁴

Kepercayaan komunitas adat diyakini dan dihormati oleh masyarakat pendukungnya, karena kepercayaan tersebut mengandung nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Oleh karena itu, kepercayaan tersebut patut dilestarikan dan diamalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana budaya lokal dan kepercayaan komunitas adat harus ditempatkan, dilestarikan, dan diamalkan, sehingga nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat menjadi alai pemersatu bangsa ? Peper singkat ini

3 Berdasarkan catatan di Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2005), masyarakat penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terwadahi dalam 249 organisasi di tingkat pusat dan 980 organisasi ditingkat cabang. Tersebar di-25 propinsi, dengan jumlah anggota sekitar 9 juta orang.

4 Pasal 28 E ayat (2) U.U.D 1945 menentukan "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap/sesuai dengan hati nuraninya". Pasal 29 ayat (2) menentukan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan itu". Pasal 32 ayat (I) menentukan "Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu".

mencoba menemukan jawab atas pertanyaan tersebut, dengan menjadikan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Bali, sebagai contoh soal.

Komunitas Adat di Bali

Komunitas adat di Bali, pada awalnya dikenal dengan sebutan *desa*. Awal abad ke 20 mulai dikenal istilah *desa adat* dan sejak tahun 2001 *desa adat* disebut *desa pakraman*. Kata “desa” pada jaman Bali kuna disebut *banwa* atau *wanua* (Goris, 1954: 59; Astra, 1997: 64; Reuter, 2002: 25-63;). Kata “desa” seperti halnya kata “negara”, “negeri” dan “nagari”, berasal dari bahasa Sansakerta, yang artinya tanah air, tanah asal dan tanah kelahiran (Kartohadikoesoemo, 1984: 4; Soepomo, 1977: 1; Surpha, 1992: 4). *Pakraman* berasal dari *kraman* yang kemudian berubah menjadi *krama*. Pada mulanya berarti kumpulan orang-orang (orang yang sudah berumah tangga), yang kemudian berubah menjadi masyarakat dalam wilayah suatu desa yang juga disebut *thani* (Surpha, 2002: 51).

Berdasarkan Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, istilah “desa adat” kemudian diganti menjadi “desa pakraman”. Dalam Perda tersebut ditentukan bahwa *desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup

masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri” (pasall nomor umt 4).

Sebuah *desa pakraman*, terdiri dari tiga unsur, yaitu: (1) Unsur *parahyangan* (berupa pura atau tempat suci agama Hindu). (2) Unsur *pawongan* (warga desa yang beragama Hindu, lebih dikenal dengan *krama desa*). (3) Unsur *palemahan* (wilayah desa yang terdiri dari tanah milik desa atau *karang ayahan desa* dan tanah milik pribadi atau *karang gunakaya*). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa *desa pakraman* adalah salah satu organisasi tradisional Bali, tempat orang Bali melaksanakan aktivitas sosial dan religius sesuai ajaran agama Hindu.

Desa pakraman pada umumnya terdiri dari beberapa *banjar pakraman* dan ada pula yang hanya terdiri dari satu *banjar pakraman*. Perangkat pimpinan di *desa pakraman* disebut *prajuru desa* dan *prajuru banjar* untuk *banjar pakraman*. Pucuk pimpinan *prajuru desa* disebut *bendesa* atau *bendesa adat* atau *kelihan adat*, sedangkan pucuk *pimpinan prajuru banjar* disebut *kelihan banjar*.⁵

Sesuai dengan unsur-unsur *desa pakraman* seperti dikemukakan diatas, dapat dikemukakan bahwa tugas wewenang *desa*

5 di Bali kini ada 1.420 desa pakramandan 3.945 banjar pakraman, serta 693 “desa dinas” yang terdiri dari desa dari kelurahan (Bappeda Bali, 2004: V-I)

pakraman dan *banjar pekraman* lebih banyak berkaitan dengan agama Hindu dan adat serta hukum adat Bali. Tugas dan wewenang tersebut, dijalankan oleh *prajuru desa* dan *prajuru banjar* berdasarkan hukum adat Bali, yang tertuang dalam bentuk *awig-awig desa* dan *perarem desa*.⁶

Selain *desa pakraman*, di Bali juga ada “desa”. Desa ini pada awalnya disebut *keperbekelan*. Dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke 20. Umumnya dilakukan dengan jalan menggabungkan beberapa *desa pakraman* kecil menjadi satu *keperbekelan*. Tetapi untuk *desa pakraman* yang luas dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, langsung “dibaliknama” menjadi *keperbekelan*. Desa ini dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan bagi pemerintah kolonial Belanda menjalankan roda pemerintahannya. Sesudah Indonesia merdeka, *keperbekelan* menjadi perangkat pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan U.U.NO: 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, *keperbekelan* mengalami nasib yang sama dengan organisasi pemerintahan desa serupa yang ada di seluruh Indonesia, diseragamkan menjadi “desa”. Tugas wewenang desa ini, lebih banyak berhubungan dengan administrasi pemerintahan

6 Sebelum hukum adat Bali (*awig-awig* dari *perarem*) lazim dikenal, ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut aturan yang dipergunakan menata kehidupan di *desa adat* atau *desa pakraman*, seperti *lekita*, *paswara*, *kerta*, *palo kerta*, *dresta*, *catur dresta*, *sima*, *toto krama*, *tata loka cara* (Warren, 1993: 4, Picard, 1999: 30, Surpha (2002: 50).

atau kedinasan. Oleh karena itu, desa ini dikenal pula dengan sebut “desa dinas” atau “desa administratif”. Berdasarkan pertimbangan heterogenitas penduduknya, beberapa desa (dinas) yang ada di kawasan perkotaan, dijadikan “kelurahan”. Desa (dinas) terdiri dari beberapa “dusun” dan kelurahan terdiri dari beberapa “lingkungan”.

Perangkat pimpinan desa ini disebut perangkat desa, terdiri dari kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes) dan beberapa kepala urusan. Dusun dikepalai oleh kepala dusun (kadus). Perangkat pimpinan kelurahan disebut perangkat kelurahan, terdiri dari lurah, sekretaris lurah dan beberapa kepala urusan. Lingkungan dikepalai oleh seorang kepala lingkungan (kaling).

Perkawinan menurut hukum Adat Bali

Perkawinan dalam komunitas adat Bali (*desa pakraman*) dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali. Dalam hal ini perkawinan lebih dikenal dengan istilah *pawiwahan*, *nganten*, *makerab kambe*, *pewarangan*. Perkataan “kawin” sendiri dalam bahasa sehari-hari lebih umum disebut *nganten* dan *makerab kambe*, yang hakekatnya sama dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta mengemukakan bahwa perkawinan menurut umat Hindu adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak, guna mendapatkan

keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya. Sesudah melangsungkan perkawinan pasangan suami istri ini disebut *alakirabi*, *masomahan*, atau *makurenan*. *Kuren*, *somah*, *rabi*, dapat berarti suami atau istri. Suami disebut juga *raka* dan istri biasanya dipanggil *rai*. *Raka-rai* dapat berarti suami istri.⁷

Bentuk perkawinan menurut hukum adat Bali, dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perkawinan *biasa* (*nganten biasa*). Dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Keseluruhan aktivitas perkawinan, menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki.
2. Perkawinan *nyentana* (*nganten nyentana* atau *nganten nyeburin*). Bentuk perkawinan ini biasanya dipilih oleh keluarga yang tidak memiliki anak atau keturunan laki-laki. Dalam perkawinan *nyeburin*, pihak laki-laki *meawak luh* (berstatus wanita atau *predana*) dan pihak wanita *meawak muani* (berstatus laki-laki atau *purusa* dan dikenal pula dengan istilah *sentana rajeg*). Pihak laki-laki meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya dan bertempat tinggal tetap

⁷ Lebih jauh tentang keluarga dan perkawinan, baca, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1976/1977. *Adat Istiadat Daerah Bali*. (hal101 - 112). Geertz, Hildred and Clifford Geertz. 1975. *Khinsip in Bali*. The University of Chicago.

dalam lingkungan keluarga istrinya. Keseluruhan aktivitas perkawinan, menjadi tanggung jawab keluarga istri.

Baik dalam *nganten biasa* (perkawinan *biasa*) maupun *nganten nyentana* (perkawinan *nyentana*), umumnya dilaksanakan dengan memilih salah satu diantara dua cara melangsungkan perkawinan, yaitu :

- (1) Perkawinan dengan cara *memadik* (meminang),
- (2) Perkawinan dengan cara *ngerorod* (lari bersama).⁸

Pilihan cara perkawinan tergantung dari “suasana” pada saat *magelanan* (berpacaran atau bertunangan), *Gelan* artinya, pacar atau tunangan. Apabila proses *magelanan* berjalan mulus, dalam arti ada restu orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak, maka akan dipilih perkawinan dengan cara *memadik* (meminang), Sebaliknya, apabila proses *magelanan* berjalan kurang mulus (dua sejoli saling mencintai, tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua salah satu pihak), maka mereka cenderung melangsungkan perkawinan dengan cara *ngerorod* (lari bersama).

8 Jaman dahulu dikenal juga ada perkawinan dengan cara *kajengkepan* atau *adung-adungan* (dijodohkan). Selain itu ada juga perkawinan dengan cara *melegandang* (menculik). Kedua cara melangsungkan perkawinan ini jaman sekarang nyaris tidak terdengar. Bahkan perkawinan dengan cara *ngerorod* (lari bersama) mulai jarang dipilih, kecuali dalam keadaan amat kepepet. Pada umumnya pasangan calon pengantin memilih perkawinan dengan cara *memadik* (meminang).

Cara manapun yang dipilih, perkawinan menurut hukum adat Bali dianggap sah apabila berjalan sesuai hukum adat Bali dan agama Hindu, yang teraktualisasikan dalam *tri upa saksi* (tiga kesaksian), yang terdiri dari (1) *bhuta saksi* (bersaksi kepada *bhutakala*, dengan menggunakan sarana *upakara* atau *banten* (sesajen) yang dikenal dengan *banten byakala* atau *banten byakaonan*; (2) *manusa saksi* (disaksikan oleh keluarga dan *krama* (warga) *desa pakraman*, yang ditandai dengan kehadiran *prajuru desa* (perangkat pimpinan *desa pakraman*) atau *prajuru banjar* (perangkat pimpinan *banjar pakraman*), dan ditandai pula dengan adanya *suaran kulkul* (bunyi kentongan desa atau kentongan banjar); (3) *dewa saksi* (bersaksi kepada Tuhan, dengan menggunakan sarana upacara yang dikenal dengan *banten tataban*).⁹ Setelah rangkaian upacara perkawinan menurut agama Hindu dan hukum adat Bali seperti diatas selesai dilaksanakan, perkawinan tersebut dianggap sah, walaupun tanpa dihadiri perangkat “desa dinas”, tanpa pencatatan perkawinan dan belum memiliki akte perkawinan.¹⁰

9 Baca juga I Gusti Ketut Kaler, , 1979. *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar, Bali Agung (hall17).

10 Berbagai kelengkapan administrasi perkawinan yang hams dimiliki untuk menyelesaikan akte perkawinan, akan diurus sesudah upacara perkawinan selesai dilaksanakan. Dilihat dari sudut U.U.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kenyataan ini memang agak aneh, tetapi itulah yang selama hampir 30 tahun berjalan di Bali.

Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pada tahun 1974, mulai berlaku UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.¹¹ Untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1973.¹² Sebelum berlakunya U.U.Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku sejumlah hukum perkawinan bagi berbagai golongan dan daerah. Hal ini ada hubungannya dengan penggolongan penduduk di Indonesia, sebagai warisan penggolongan penduduk sesuai dengan pasal 163 *Indisehe Staatsregeling* (Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda).¹³ Masing-masing golongan berlaku hukum yang berbeda, termasuk hukum perkawinan. Bagi Golongan Eropa, berlaku hukum Eropa, bagi Golongan Timur Asing (Cina, dll), sebagian berlaku hukum Eropa dan sebagian berlaku hukum adatnya. Bagi Golongan Pribumi (Indonesia asli), yang beragama Islam berlaku hukum Islam dan Golongan Pribumi yang lainnya (termasuk Bali), berlaku hukum adatnya masing-masing.

11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto tanggal 2 Januari 1974. Hari itu juga diundangkan oleh Mensekneg Republik Indonesia Mayor Jenderal TNI Soedarmono, dalam Lembaran Negara No.1 tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3019.

12 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 12 tahun 1975 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

13 Pasal 163 membedakan penduduk Di Hindia Belanda menjadi tiga golongan (1) Golongan Eropa (termasuk Jepang), (2) Golongan Pribumi (Indonesia), dan (3) Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen (Supomo, 1983: 27; Hadikusuma, 1990: 5).

Berlakunya berbagai hukum perkawinan seperti digambarkan, diatas berakhir setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berkaitan dengan sahnya perkawinan, pasal 2 U.U. No. 1/1974, yang menentukan sebagai berikut.

- (1) Perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ketentuan diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan, seperti, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (pasal 6). Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, kecuali ada dispensasi dari Pengadilan (pasal 7). Pada azasnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi ijin bagi suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 13). Pasal 8 menegaskan mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang:

Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke

bawah atau ke atas.

berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara , antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Bali

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara nasional. Oleh karena itu, baik mengenai persyaratan perkawinan maupun larangan perkawinan seperti dikemukakan di atas berlaku pula bagi *krama desa* (warga) komunitas adat di Bali (*desa pakraman*). Tidak ada masalah, karena baik mengenai persyaratan perkawinan maupun larangan perkawinan, substansinya mendekati persyaratan perkawinan dan larangan perkawinan yang dikenal dalam agama Hindu dan hukum adat Bali (*awig-awig* maupun *perm'em*)

yang ada pada masing-masing *desa pakraman* di Bali.¹⁴ Oleh karena itu, sepanjang menyangkut persyaratan dan larangan perkawinan, relatif tak ada soal bagi komunitas adat Bali (*desa pakraman*) maupun *prajuru desa* di Bali.

Persoalan muncul dalam hubungan dengan pencatatan perkawinan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte perkawinan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 D.O. No. 1/1974, yang menentukan sebagai berikut.

- (1) Perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini lebih dipertegas lagi dengan ketentuan pasal 3 P.P. Nomor 9/1975, yang menentukan sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

14 Dalam "Pedoman/Teknis Penulisan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat" yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Pemprov. Bali, 2002, ditentukan mengenai persyaratan perkawinan antara lain: *Sampun manggeh daha-teruna* (sudah dewasa); *sangkaning pada lila* (dilaksanakan atas dasar stika sama stika), *kemargiang sudhi wadani prade pengambilan lias agama* (diawali dengan upacara sudhi wadani kalau kawin dengan orang beda agama). Selain memuat ketentuan seperti tersebut, dalam *awig-awig desa* Adat Denpasar Juga ada ketentuan sbb: *Manut kecaping agama, utawi tan gamia gamana* (perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan bukan mpakan perkawinan antar keluarga dekat yang dilarang agama). Ketentuan serupa dapat juga dijumpai dalam *awig-awig* Desa Adat Pejeng dan hampir semua *awig-awig* desa adat memuat ketentuan seperti itu.

- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian dalam batas waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.

Komunitas adat Bali (*krama desa*, *prajuru desa* dan *prajuru banjar*), sempat terperangah, bingung, dan ragu-ragu dengan ketentuan ini, disebabkan karena dalam budaya Bali (*awig-awig desa* maupun *perarem desa*), tidak ada ketentuan serupa. Yang ada justru ketentuan sebaliknya, dimungkinkan melangsungkan *nganten ngerorod* (kawin dengan cara lari bersama), dalam “suasana” perkawinan tanpa restu keluarga. Tentu tidak masuk akal kalau sebelum *nganten ngerorod* diawali dengan mengemukakan dan mencatat keinginan kawin pada lembaga berwenang untuk kemudian diumumkan, karena hal ini justru dapat menyulitkan calon pengantin mempersiapkan “pelariannya”. Jangankan dalam *nganten ngerorod*, dalam *nganten memadik-pun* hampir tidak pernah ada pasangan pengantin yang mencatatkan keinginannya 10 hari sebelum melangsungkan perkawinan. Kalau pencatatan perkawinan dipaksakan, hal ini dapat melukai perasaan *krama* (warga) *desa pakraman* di Bali.

Untuk menghindari suasana kebingungan dan pertentangan (*matinjakan*) antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan

budaya Bali (*awig-awig desa* maupun *perarem desa*), Provinsi Daerah Tingkat I Bali mengusahakan jalan tengah dengan mengeluarkan “Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bagi Umat Hindu dan Budha di Bali dan Kemungkinan Pelaksanaan di Luar Daerah Bali”. Pedoman ini pada dasarnya memberi kebebasan bagi komunitas adat Bali (*desa pakraman* beserta jajarannya seperti *krama desa*, *prajuru desa* dan *prajuru ban jar*), untuk melangsungkan perkawinan dengan cara yang persis sama dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atau dengan cara lari bersama (*nganten ngerorod*), sesuai dengan *awig-awig* dari *perarem* yang selama ini berjalan. Dengan kata lain, jalan manapun yang mati dilewati tak soal, asalkan tujuannya kedamaian bersama (*kerahayuan sareng sami*).

Penutup

Kembali pada pertanyaan bagaimana budaya lokal dan kepercayaan komunitas adat harus dihargai, dilestarikan, dan diamalkan, sehingga nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat menjadi alat pemersatu bangsa ? Untuk mencapai tujuan itu saya berpendapat, pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Bali dengan segala “keanehannya”, dapat dijadikan renungan. Dalam konteks budaya lokal dan kepercayaan komunitas adat, hal ini mengandung arti, hendaknya lah berbagai aturan perundang-undangan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat dari beragama yang berlaku secara nasional, jangan sampai meniadakan atau mengesampingkan budaya lokal dan kepercayaan komunitas adat, melainkan senantiasa memberi peluang bagi kelangsungan hidupnya. Hanya dengan demikian, nilai luhur yang terkandung dalam budaya lokal dan kepercayaan komunitas adat, akan dapat menjadi alat pemersatu bangsa, demi kedamaian bersama. Semua hendaknya berusaha menciptakan kedamaian bersama (*sami patut ngulati kerahayuan sareng sami.*) -o0o--

Daftar Pustaka

- Astra, I Gde Semadi, 1997. "Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII - XIII. Sebuah Kajian Epigrafis". Disertasi pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bappeda Bali, 2005. "Data Bali Membangun 2004". Pemerintah Provo Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Biro Hukum dan HAM Pemproy. Bali, 2002. "Pedoman teknis Penulisan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat".
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1976/1977. *Adat istiadat Daerah Bali*.
- Desa Adat Pejeng, 2002. *Awig-awig Desa Adat Pejeng*.
- Desa Adat Denpasar, 1987. *Awig-awig Desa Adat Denpasar*.
- Dherana, Tjok Raka, 1995. *Desa Adat dan Awig-awig dalam Struktur Pemerintahan Bali*. Denpasar, Upada Sastra.
- Geertz, Hildred and Clifford Geertz. 1975. *Khinsip in Bali*. The University of Chicago.
- Goris, R, 1954. "Inscriptions yoor Anak Wungsu", dalam *Prasasti Bali*. Jakarta, N.V Masa Bani. Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.
- Kaler, I Gusti Ketut, 1979. *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar, Bali Agung. Kartohadikoesoemo,

- Soetardjo, 1984. *Desa*. Jakarta, P.N. Balai Pustaka.
- Parimatha, I Gde, 2004. "Desa Adat, Desa Dinas, dan Desa parkaman di Bali: Tinjauan Historis Kritis", dalam I Wayan Ardika dan Danna Putra (ed), 2004. *Politik Kebudayaan dan Identitas etnis*. Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, Bali Mangsi Press.
- Perda Propinsi Bali Nomod Tahun 2001, tentang Desa Pakraman.
- "Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bagi Umat Hindu dan Budha di Bali dan Kemungkinan, Pelaksanaan di Luar Daerah Bali"
- Picard, Michel, 1999. "The Discourse of Kebalian: Transcultural Constructions of Balinese Identity" dalam dalam Kaeche He Rubeinstein dan Linda H. Connor, *Staying Local in 'the Global Village*. University of Hawai'i Press, Honolulu.
- Reuter, Thomas A, 2002. *Custodians of the Sacred Mountains. Culture and Society in the Highland of Bali*. Honolulu, University of Hawai Press. Halaman 25 - 63.
- Sekretariat Jenderal MPRRI, 2002. *UUD 1945*.
- Surpha, I Wayan, 1992. *Eksistensi Desa Adat dengan Diundangkannya UU Nomor : 5/1979*. Denpasar, Upada Sastra.
- _____, 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar, Bali Post.

Soepomo, R, 1977. *Bab-bab ten tang Hukum Adat*. Jakarta, Pradnya Paramita.

_____, 1983. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia 11*. Jakarta, Pradnya Paramita.

U. U. Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

U. U. Nomor : 32. Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

U. U. Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta P.P. Nomor 9 Tahun 1975.

Warren, Carol. 1993. *Adat and Dinas. Balinese Community in The Indonesian State*. Oxford University Press, Sangapure New York.

AKTUALISASI DAN REVITALISASI NILAI-NILAI BUDAYA SPIRITUAL UNTUK PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER BANGSA

Oleh : Dr. Budya Pradipta
(UI/Yayasan KERTAGAMA)

ISI

- **PEMAHAMAN**
- **ANALISIS**
 - A. DESKRIPSI
 - B. KEKUATAN
 - C. KELEMAHAN
 - D. ANCAMAN
 - E. PELUANG
 - F. STRATEGI
 - G. METODE
 - H. SASARAN

I. PIRANTI

J. UPAYA

■ **PROGRAM PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER BANGSA**

A. UMUM

B. LANGKAH-LANGKAH

I. PEMAHAMAN

Sebelum sampai pada analisis, ada baiknya diterangkan terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam judul makalah saya *Aktualisasi dan Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Spiritual untuk Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa*.

- **AKTUALISASI** adalah pekerjaan merealisasikan/ mengoperasionalkan suatu kegiatan secara aktual (kekinian, sedang hangat-hangatnya).
- **REVITALISASI** adalah pekerjaan memberi dan/atau menambah tenaga pada sesuatu kegiatan agar nampak makin “hidup”.
- **NILAI** adalah sesuatu yang dapat diserap untuk memperkuat daya-daya rasional, spiritual, dan/atau imajinatif.

- **BUDAYA** adalah hasil cipta-rasa-karsa seseorang, keluarga, komunitas, masyarakat, pemerintah, dan bangsa yang biasa dipergunakan untuk menyelenggarakan, melangsungkan, memelihara, mengantisipasi, menangkis, membangun, dan melestarikan kehidupan dan kehidupan tertentu.
- **SPIRITUAL ATAU ROHANI** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dan/atau tumbuh/timbul dari spirit (semangat) atau roh (daya elektisitas hidup). Spiritual dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh rasio (akal dan imajinasi daya khayal). Karena tidak/belum terjangkau oleh rasio dan imajinasi, maka istilah tersebut sering dikatakan: gaib. Dunia spiritual dalam arti gaib ini mempunyai penalaran sendiri yang berbeda dengan penalaran rasional dan imajinatif. Ada orang yang menyamakan istilah spiritual dengan **irrasional** (sesuatu yang tidak masuk akal). Penyamaan ini kurang tepat, sebab dunia spiritual itu memiliki penalaran tersendiri. Yang agak mendekati dengan istilah tersebut adalah istilah **supranatural/supernatural** (adi kodrati), yang secara harafiah berarti alam atas.
- **BUDAYA SPIRITUAL** di sini adalah hasil cipta rasa karsa yang bersumber dari, berorientasi, bermuara kepada Ketuhanan YME.
- **BUDI PEKERTI** adalah budi yang dipekertikan

(diaktualisasikan, dioperasionalkan, dilakukan) dalam kenyataan hidup sehari-hari. Budi itu sendiri adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia. Sebelum dipekertikan dalam kenyataan hidup sehari-hari, budi itu masih berupa nilai artinya masih berupa konsep atau masih di awang-awang belum dibumikan. Oleh sebab itu, timbul istilah **budi luhur** yaitu kumpulan nilai-nilai tentang keluhuran budi. Sedangkan **budi pekerti luhur** yaitu budi luhur yang telah direpresentasikan ke dalam kenyataan hidup sehari-hari.

- **PENDIDIKAN BUDI PEKERTI** adalah kumpulan aturan/acuan tentang budi yang hendak dipekertikan secara terdidik ke dalam kenyataan sehari-hari.

II. ANALISIS

A. DESKRIPSI

- Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Kepercayaan Komunitas adat merupakan warisan leluhur budaya bangsa yang sudah lama ada, diyakini, dan dihayati oleh sebagian rakyat Indonesia secara turun temurun. Di dalam kedua kepercayaan tersebut terkandung nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan pedoman dalam usaha pengembangan jati diri dan integritas bangsa.
- Eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

sebagai warisan budaya luhur bangsa memang riil karena ada masyarakat yang mendukungnya, dan dijamin oleh UUD 45, pasal 28 E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2.

- Organisasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tersebar di 25 propinsi dengan jumlah anggota sekitar 9 juta orang.

B. KEKUATAN

- Dilindungi Tuhan Yang Maha Kasih.
- Diayomi Pancasila.
- Dijamin UUD 1945.
- Didanai oleh pemerintah (melalui Direktorat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME).
- Secara nyata ada masyarakat pendukungnya (Menurut catatan Direktorat terdapat 249 organisasi penghayat tingkat pusat, 980 tingkat cabang/daerah. Jumlah warga secara keseluruhan: kurang lebih 9.000.000 orang. Perkiraan saya pribadi minimal sekitar 20.000.000 orang, didalamnya termasuk orang-orang yang belum mendaftarkan secara resmi, karena adanya pendapat bahwa urusan hubungan antara manusia dengan tuhan nya adalah urusan pribadi dan oleh sebab itu tidak perlu diorganisasikan).

- Refleksi dan manifestasi dari kedaulatan rohani bangsa Indonesia.
- Representasi dari persembahan kepada Tuhan YME yang bersumber dari jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia.
- Salah satu sumber utama untuk hidup berbudi pekerti luhur.
- Bagian dari tradisi Indonesia.
- Memiliki kekuatan yang ampuh dalam membangun kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa.
- Toleran dan akomodatif (contoh: asimilasi dan akulturasi).
- Halus dan lembut.
- *Karyenak tyasing sasama* (membuat enak hati sesama manusia).
- Memiliki visi Ketuhanan YME dan misi *memayu hayuning bawana* (mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia).

C. KELEMAHAN

- Sebagai lembaga pemerintah, direktorat belum menampilkan organisasi yang handal dan terpuji dalam mengelola secara nasional masyarakat penghayat.
- Sesebuah penghayat antara satu dengan lainnya, umumnya belum bersikap *aja rumangsa bisa, bisaa rumangsa* (jangan merasa pandai, tetapi hendaknya dapat merasa

bahwa segala kemampuan berasal dari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa).

- Para penghayat umumnya malas belajar dan malas pula menganalisis, akibatnya nampak minder kalau dihadapkan pada ahli-ahli ilmu pengetahuan dan ahli-ahli pikir (filsafat).
- Organisasi penghayat tingkat nasional (HPK, FKPK, dan BKOK), daerah, cabang, dan ranting umumnya masih lemah dalam laku, ilmu, dan manajemen (pengelolaan).
- Masyarakat penghayat belum rukun, bersatu, dan menyatu dalam wadah nasional tunggal.

D. ANCAMAN

- Menyaingi agama.
- Adanya anggapan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah sesat, pra-agama, atau pesedo-agama.
- Kepercayaan tempat berlindung orang-orang abangan dan politik terlarang.
- Pornografi dan pornoaksi.
- Narkoba/narkotika.
- Pergaulan bebas kelewat batas.
- Isu dan teror.
- *Jarkoni (bisa ngajar ora bisa ngelakoni/bisa mengajar tidak bisa menjalankan), gajah diblangkoni (bisa kojah*

ora bisa ngelakoni/bisa berbicara macam-macam tidak bisa menjalankan).

- Fanatisme berlebihan.
- Kemiskinan, kebodohan, dan kemalasan.

E. PELUANG

- Kepercayaan terhadap Tuhan YME: khas dan unik. Di luar negeri disebut sebagai *indegenious religion* atau *traditional faith*.
- Rakyat dan bangsa Indonesia memerlukan ketentraman yang bersumber dari Ketuhanan YME (*tata titi tentrem karta tur raharja/tata titi tentren gemah ripah loh jinawi*-teratur cermat tentram makmur dan sejahtera/ teratur cermat tentram subur makmur sejahter).
- Masyarakat memerlukan pendidikan budi pekerti.
- Direktorat membuka peluang seluas-luasnya bagi peningkatan peri kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan kepercayaan komunitas adat.
- Situasi dan kondisi bangsa membutuhkan ilmu, laku dan pencerahan hidup.
- Pemerintah dan masyarakat memerlukan informasi dan penjelasan yang cermat dan mutakhir tentang kepercayaan terhadap Tuhan YME.

- Pemerintah dan masyarakat memerlukan peningkatan peran masyarakat penghayat dalam menjaga keutuhan NKRI.
- Masyarakat dan bangsa Indonesia mendambakan kedaulatan dan kemerdekaan spiritual yang bersumber dari Ketuhanan YME.
- Rakyat dan bangsa Indonesia memerlukan tuntunan hidup yang *bener lan pener* (benar dan tepat).

F. STRATEGI

- Menggunakan visi Ketuhanan YME dan misi *memayu hayuning bawana* (mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia).
- Menjalankan laku keteladanan (*laku becik*/laku kebaikan).
- Dalam pergaulan sebaiknya yang ditampilkan sikap, kata-kata, dan perbuatan yang baik-baik saja dan/atau yang lucu-lucu saja (tanpa diwarnai pornografi dan pornoaksi).

G. METODE

- Menggunakan metode estetika. keserasian (kesamaan,

kesejajaran) dan metode estetika. pertentangan (perbedaan, penyimpangan) yang diterapkan sesuai dengan tuntutan situasi, kondisi, iklim, lingkungan, dan suasana tertentu.

- Pelaksanaan metode tersebut dibawakan dengan halus dan lembut diselingi humor seperlunya.
- Menyiapkan solusi pada setiap perhentian yang diperlukan

H. SASARAN

- Terciptanya situasi, kondisi, lingkungan, iklim, dan suasana yang pas bagi masuknya pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa secara sukses.
- Terwujudnya dukungan fisik dan non fisik bagi pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama untuk masyarakat, pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi.
- Terwujudnya hidup berbudi pekerti luhur bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

I. PIRANTI

TENAGA INTELEKTUAL yang cerdas yang menjalankan laku spiritual bentukan pemerintah dan masyarakat yang sanggup dan mampu menyiapkan:

- Kurikulum
- Buku ajar.
- SDM (guru dan dosen yang berbudi pekerti luhur) yang dapat menjadi guru dan dosen budi pekerti dan karakter bangsa.
- Dana memadai yang wajib disiapkan oleh pemerintah

J. UPAYA

- Menerbitkan buku-buku seri pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa:
- Bahan ajar (ajaran, wulang wuruk, tuntunan, dll).
- Bahan bacaan pendukung
- Menampilkan pentas teater tradisional yang mengandung tuntunan, seperti wayang, drama, teater lainnya, nyanyian, tari, dan sebagainya.
- Mengajak murid-murid untuk menikmati alam ciptaan Tuhan YME, dengan tuntunan yang mengagungkan Tuhan YME.

III. PROGRAM PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER BANGSA

A. UMUM

PERSIAPAN

- Penyiapan master plan.
- Penyiapan SDM
- Penyiapan sarana dan prasarana.
- Penyiapan Dana.
- Penyiapan rancangan program terperinci.
- Penyiapan strategi besar.
- Penyiapan tim evaluasi.

■ PROGRAM AKSI

1. Menyampaikan buku pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa kepada pemerintah dan masyarakat:
 - Buku pedoman.
 - Buku ajar.
 - Buku bacaan
2. Sosialisasi pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa:
 - Ke kalangan pemerintah dan masyarakat
 - Kepada presiden dan wakil presiden.
 - Kepada masyarakat.

- Kepada instansi swasta.
 - Lain-lain yang dipandang perlu.
-
- **PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER DAN BANGSA**
 1. Melakukan kerjasama dengan Depdiknas, Depdagri, Depnaker, Deppan, Depkominfo, Departemen lain yang dianggap perlu, dan instansi swasta yang memerlukan
 2. Meresmikan dicanangkannya pendidikan budi pekerti oleh presiden.

B. LANGKAH

1. Pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa dijadikan proyek nasional.
2. Mengadakan seminar-seminar.
3. Minta dukungan dan persetujuan kepada DPR dan MPR.
4. Mengusulkan kepada presiden agar berkenan Melembagakan secara resmi terbentuknya: Lembaga Nasional Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa.
5. Memberdayakan Lembaga Nasional Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa.

TERIMA KASIH

AKTUALISASI DAN REVITALISASI NILAI-NILAI KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT UNTUK PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER BANGSA

Oleh: Ade Makmur K

PENGANTAR

- Perbincangan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kepercayaan komunitas adat untuk pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa tidak dapat dilepaskan dari konteks Indonesia yang berbilang suku bangsa dan kebudayaan
- Aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kepercayaan komunitas adat memperingatkan kita kepada pertumbuhan ekonomi yang seolah-olah menjadi tolak ukur keberhasilan utama kesejahteraan
- Dalam konteks itu, pendidikan untuk kemajuan material seakan-akan menjadi tujuan utamanya mengalahkan pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa
- Padahal pendidikan budi pekerti dalam mewujudkan karakter bangsa sudah semestinya berperan untuk mengimbangi kemajuan ekonomi yang tidak mengenal batas

BUDI PEKERTI :

Cerminan Nilai-nilai Kepercayaan

- Dalam antropologi dapat diartikan sebagai aktivitas-aktivitas dan proses-proses rohaniah seperti: penangkapan pengalaman, rasa, kemauan dan keinginan yang berlangsung dalam alam pikiran individu atau kolektif yang terkait langsung dengan ketentraman dan keseimbangan untuk menempatkan person (individu) di bawah kolektif (masyarakat) dan masyarakat di bawah semesta alam.
- Kehidupan di dunia maupun kehidupan dalam masyarakat diatur melalui kaidah-kaidah atau tata krama (etik) yang mengatur kelakuan manusia untuk dapat mengatasi dorongan-dorongan dan emosi-emosi pribadi
- Artinya, bahwa etik dalam hubungan dengan penjelmaan nilai-nilai adalah menjadi inti dari kebudayaan yang dapat menjadi motivasi, pendorong dan sekaligus tujuan dari kelakuan dan tindakan (perbuatan)
- Dalam tataran etik inilah usaha yang gigih untuk mengumpulkan kekayaan material dikendalikan oleh tuntutan keselarasan atau harmoni sosial.
- Tataran itu berbeda dengan teori yang menyebutkan bahwa: “seseorang yang telah mencapai kedudukan tertinggi di dunia dari sudut ekonomi dan material, ialah seseorang yang akan

ditempatkan di sorga sepeninggalnya dengan mengabaikan hak-hak individu lainnya” (Max` Weber = Ajaran Calvin yang melahirkan kapitalisme)

- Nilai ekonomi/material menjadi utama, berbeda dengan nilai moral/etika yang mengutamakan keseimbangan kehidupan individu dan kolektif
- Dalam tatatan Weber itulah, pengaturan kehidupan setiap individu seolah terlepas dari ikatan nilai-nilai [moral] dan peraturan hidup masyarakat, dan yang taat kepada tuntutan nilai-nilai masyarakat menjadi terpinggirkan
- Nilai-nilai [moral] yang ditumbuhkembangkan dalam tataran kepercayaan ini dapat dijadikan rujukan mengatasi masalah *mal-adjustment* atau kegagalan individu menyesuaikan diri dalam suasana kehidupan sosial
- Untuk itu, pentingnya spirit sosial sebagai *moral order* yang mampu menyederhanakan kehendak yang tidak terbatas.
- Durkheim, menyebut spirit sosial seperti itu sebagai *social solidarity* dengan meletakkan kehidupan masyarakat dan individu pada proses pengintegrasian ke dalam kehidupan komunitas dengan mengatasi gejala egoisme dan individualisme.
 - Dalam tataran nilai-nilai kepercayaan komunitas adat itulah pendidikan budi pekerti menjadi relevan bagi

‘pembentukan’ karakter bangsa

- Budi pekerti merupakan pancaran dari adanya integrasi proses nilai dan penilaian yang tertanam pada setiap individu.
- Seperti ‘*Pikukuh Karuhun*’, yang menjadi pegangan hidup penduduk Desa Kanekes, yaitu:

KARAKTER BANGSA:

Manifestasi Nilai-nilai Kepercayaan

- Dalam konteks itu, nilai-nilai kepercayaan komunitas adat seperti yang tercemin pada '*pikukuh karuhun*' menjadi penting artinya dalam membina karakter bangsa melalui pendidikan budi pekerti.
- Penelusuran dan pengembangan nilai-nilai kepercayaan seperti itu sebagai modal pembangkit dan pembentuk pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa
- Definisi karakter dalam pengertian ini, adalah keseluruhan potensi dan keaktifan jiwa setiap individu yang menentukan kelakuan dengan lebih menekankan pada kemauan, perasaan, dan temperamen yang dikendalikan oleh kemampuan diri untuk selalu menilai diri dan menempatkan diri pada keseimbangan atau keselarasan sebagai personalisme atau kepribadian
- Karakter Bangsa, terkait langsung dengan kewujudan kesadaran setiap individu yang merupakan bagian dari bangsa
- Karakter bangsa serupa itu merupakan satu proses yang berlaku dalam konteks dua realitas sosial, yaitu: realitas pembentuk karakter oleh negara (ideologi negara), dan realitas yang diartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap individu

- Karakter bangsa, pada dasarnya dibentuk dalam konteks sejarah dan mempunyai daya tahan dalam jangkauan masa yang panjang untuk mencorakkan identitas bangsa yang keujudannya selalu diperjuangkan dan dipertahankan
- Karakter atau watak bangsa dalam pengertian itu, adalah kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan itikad yang kuat menuju tujuan yang dianggap bernilai oleh negara.
- Membentuk karakter bangsa dalam tataran kenegaraan menjadi penting, karena karakter sering dijadikan ukuran nilai seseorang dalam kehidupan bermasyarakat baik pada lingkup negara maupun antarnegara.
- Karakter bangsa menjadi wadah integrasi sosial melalui enkulturasi, sosialisasi dan internalisasi dalam proses menumbuhkan dan mengorganisasi nilai-nilai dan proses penilaian kepercayaan

Aktualisasi/Revitalisasi

- Dalam suasana egoisme dan individualisme yang mengarah kepada dis-organisasi atau kehilangan pegangan itulah pentingnya aktualisasi/ revitalisasi nilai-nilai kepercayaan
- Dalam tataran filsafati aktualisasi/revitalisasi nilai-nilai kepercayaan merupakan pancaran dari adanya integrasi proses nilai dan penilaian yang tertanam pada setiap individu yang meliputi tiga nilai utama,

yaitu: (1) ekspresif, (2) progresif, dan (3) integratif.

- Prakteknya ketiga nilai dan penilaian itu menjadi satu kesatuan untuk memahami realitas yang dihadapi oleh setiap individu dalam berbangsa dan bernegara.
- Untuk capaian itu, pendidikan budi pekerti menjadi penting untuk membentuk karakter bangsa

PENUTUP

- Tiadanya pendidikan budi pekerti sebagaimana ditumbuhkan oleh nilai-nilai kepercayaan dapat menyebabkan keruntuhan norma yang menjadi sumber pengaturan hidup
- Pewujudan nilai-nilai kepercayaan dalam pendidikan budi pekerti dapat menjadi faktor utama untuk pengekalan kesadaran akan identitas suatu bangsa dan negara yang berkarakter
- Etika dan nilai moral yang tumbuh dari kesadaran yang ditumbuhkan oleh nilai-nilai kepercayaan menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

**FOTO-FOTO DALAM GELAR
BUDAYA SPIRITUAL DAN
KEPERCAYAAN KOMUNITAS
ADAT**



Spanduk Gelar Budaya Spiritual, di depan Gedung Pameran



Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan pada acara pembukaan Gelar Budaya Spiritual



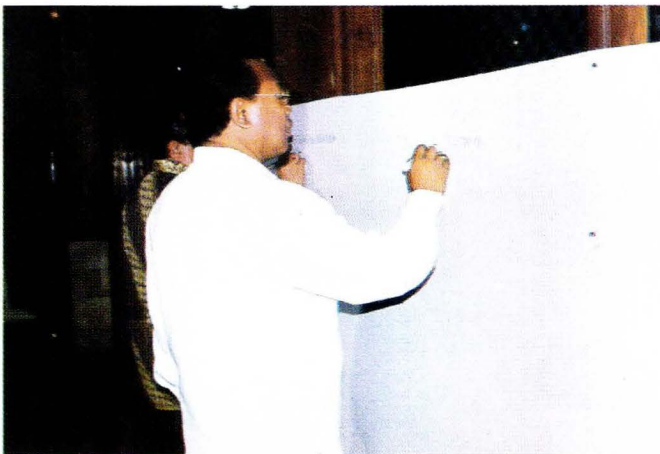
Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film sedang mengunjungi pameran
didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan.



Suasana ramah tamah diantara Dirjen NBSF, Direktur Kepercayaan dan para
pejabat lainnya setelah acara pembukaan Gelar Budaya Spiritual dan
Kepercayaan Komunitas Adat.



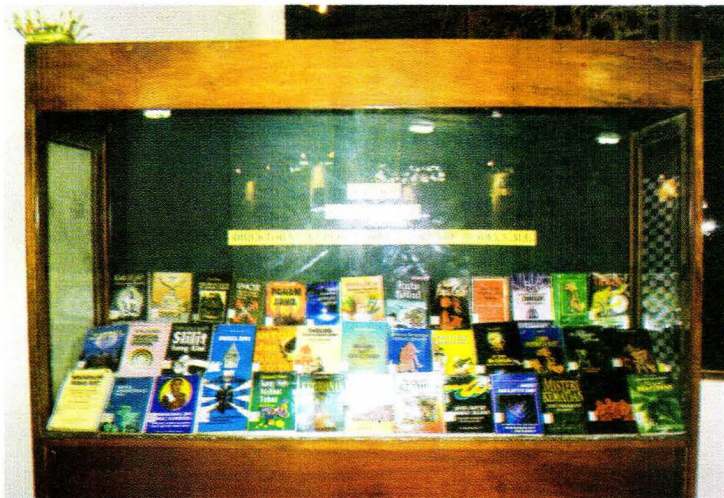
Para penari sedang menari dalam acara pembukaan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat.



Kepala Dinas Kebudayaan sedang menulis kesan dan pesan



Salah satu koleksi Foto



Salah satu koleksi pameran buku



Salah satu koleksi pameran buku



Pameran benda-benda pusaka



Seorang pengunjung sedang berdialog dengan peserta pameran “Uang Kepeng”.



Seorang pengunjung pameran sedang mengamati benda pusaka yang dipamerkan.



Para pengunjung sedang mengisi buku tamu.



Pengunjung pameran dari unsur pelajar mengamati benda pusaka yang dipamerkan.



Pengunjung pameran dari unsur pelajar yang memakai pakaian adat setempat sedang mengamati foto-foto yang dipamerkan.



Pengunjung pameran dari unsur Pelajar dan Guru sedang mengamati foto-foto yang dipamerkan.



Peragaan upacara perkawinan adat Sunda.



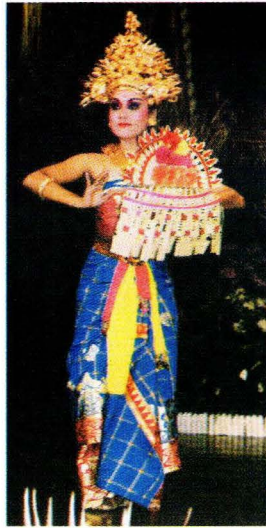
Acara upacara adat perkawinan Minangkabau.



Salah satu pemakalah sedang menyampaikan makalahnya.



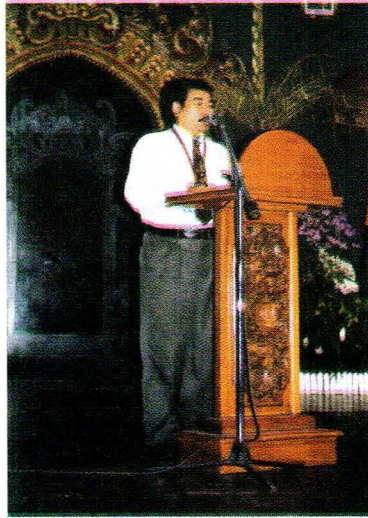
Dari kiri ke kanan; Drs. Lutfhi Asiarto (Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa), Drs. Nunus Suparadi (Mantan Staf Ahli Menteri), dan DR. IGN Anom (Mantan Dirjen Kebudayaan) menyimak Gelar Budaya Spiritual secara seksama.



Seorang penari sedang menampilkan tarian untuk meramaikan acara Gelar Budaya Spiritual.



Tim perumus sedang berdiskusi.



Ketua tim perumus sedang membacakan hasil rumusan.



Penyerahan hasil rumusan dari ketua Tim perumus kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME.



Sambutan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam acara penutupan Gelar Budaya Spiritual



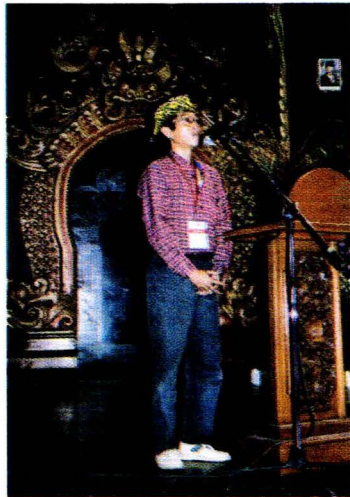
Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan pada acara penutupan Gelar Budaya Spiritual.



Bapak Bismar Siregar (Mantan Hakim Agung), Ibu Prof. DR. Edi Sedyawati (Mantan Dirjen Kebudayaan) sedang berdoa.



Pemukulan Gong oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam penutupan Gelar Budaya Spiritual.



Salah seorang peserta menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti Gelar Budaya Spiritual 2006.

I. PIRANTI

TENAGA INTELEKTUAL yang cerdas yang menjalankan laku spiritual bentukan pemerintah dan masyarakat yang sanggup dan mampu menyiapkan:

- Kurikulum
- Buku ajar.
- SDM (guru dan dosen yang berbudi pekerti luhur) yang dapat menjadi guru dan dosen budi pekerti dan karakter bangsa.
- Dana memadai yang wajib disiapkan oleh pemerintah

J. UPAYA

- Menerbitkan buku-buku seri pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa:
- Bahan ajar (ajaran, wulang wuruk, tuntunan, dll).
- Bahan bacaan pendukung
- Menampilkan pentas teater tradisional yang mengandung tuntunan, seperti wayang, drama, teater lainnya, nyanyian, tari, dan sebagainya.
- Mengajak murid-murid untuk menikmati alam ciptaan Tuhan YME, dengan tuntunan yang mengagungkan Tuhan YME.

III. PROGRAM PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER BANGSA

A. UMUM

PERSIAPAN

- Penyiapan master plan.
- Penyiapan SDM
- Penyiapan sarana dan prasarana.
- Penyiapan Dana.
- Penyiapan rancangan program terperinci.
- Penyiapan strategi besar.
- Penyiapan tim evaluasi.

■ PROGRAM AKSI

1. Menyampaikan buku pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa kepada pemerintah dan masyarakat:
 - Buku pedoman.
 - Buku ajar.
 - Buku bacaan
2. Sosialisasi pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa:
 - Ke kalangan pemerintah dan masyarakat
 - Kepada presiden dan wakil presiden.
 - Kepada masyarakat.

- Kepada instansi swasta.
 - Lain-lain yang dipandang perlu.
-
- **PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER DAN BANGSA**
 1. Melakukan kerjasama dengan Depdiknas, Depdagri, Depnaker, Deppan, Depkominfo, Departemen lain yang dianggap perlu, dan instansi swasta yang memerlukan
 2. Meresmikan dicanangkannya pendidikan budi pekerti oleh presiden.

B. LANGKAH

1. Pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa dijadikan proyek nasional.
2. Mengadakan seminar-seminar.
3. Minta dukungan dan persetujuan kepada DPR dan MPR.
4. Mengusulkan kepada presiden agar berkenan Melembagakan secara resmi terbentuknya: Lembaga Nasional Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa.
5. Memberdayakan Lembaga Nasional Pendidikan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa.

TERIMA KASIH

AKTUALISASI DAN REVITALISASI NILAI-NILAI KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT UNTUK PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KARAKTER BANGSA

Oleh: Ade Makmur K

PENGANTAR

- Perbincangan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kepercayaan komunitas adat untuk pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa tidak dapat dilepaskan dari konteks Indonesia yang berbilang suku bangsa dan kebudayaan
- Aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kepercayaan komunitas adat memperingatkan kita kepada pertumbuhan ekonomi yang seolah-olah menjadi tolak ukur keberhasilan utama kesejahteraan
- Dalam konteks itu, pendidikan untuk kemajuan material seakan-akan menjadi tujuan utamanya mengalahkan pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa
- Padahal pendidikan budi pekerti dalam mewujudkan karakter bangsa sudah semestinya berperan untuk mengimbangi kemajuan ekonomi yang tidak mengenal batas

BUDI PEKERTI :

Cerminan Nilai-nilai Kepercayaan

- Dalam antropologi dapat diartikan sebagai aktivitas-aktivitas dan proses-proses rohaniah seperti: penangkapan pengalaman, rasa, kemauan dan keinginan yang berlangsung dalam alam pikiran individu atau kolektif yang terkait langsung dengan ketentraman dan keseimbangan untuk menempatkan person (individu) di bawah kolektif (masyarakat) dan masyarakat di bawah semesta alam.
- Kehidupan di dunia maupun kehidupan dalam masyarakat diatur melalui kaidah-kaidah atau tata krama (etik) yang mengatur kelakuan manusia untuk dapat mengatasi dorongan-dorongan dan emosi-emosi pribadi
- Artinya, bahwa etik dalam hubungan dengan penjelmaan nilai-nilai adalah menjadi inti dari kebudayaan yang dapat menjadi motivasi, pendorong dan sekaligus tujuan dari kelakuan dan tindakan (perbuatan)
- Dalam tataran etik inilah usaha yang gigih untuk mengumpulkan kekayaan material dikendalikan oleh tuntutan keselarasan atau harmoni sosial.
- Tataran itu berbeda dengan teori yang menyebutkan bahwa: “seseorang yang telah mencapai kedudukan tertinggi di dunia dari sudut ekonomi dan material, ialah seseorang yang akan

ditempatkan di sorga sepeninggalnya dengan mengabaikan hak-hak individu lainnya” (Max` Weber = Ajaran Calvin yang melahirkan kapitalisme)

- Nilai ekonomi/material menjadi utama, berbeda dengan nilai moral/etika yang mengutamakan keseimbangan kehidupan individu dan kolektif
- Dalam tatatan Weber itulah, pengaturan kehidupan setiap individu seolah terlepas dari ikatan nilai-nilai [moral] dan peraturan hidup masyarakat, dan yang taat kepada tuntutan nilai-nilai masyarakat menjadi terpinggirkan
- Nilai-nilai [moral] yang ditumbuhkembangkan dalam tataran kepercayaan ini dapat dijadikan rujukan mengatasi masalah *mal-adjustment* atau kegagalan individu menyesuaikan diri dalam suasana kehidupan sosial
- Untuk itu, pentingnya spirit sosial sebagai *moral order* yang mampu menyederhanakan kehendak yang tidak terbatas.
- Durkheim, menyebut spirit sosial seperti itu sebagai *social solidarity* dengan meletakkan kehidupan masyarakat dan individu pada proses pengintegrasian ke dalam kehidupan komunitas dengan mengatasi gejala egoisme dan individualisme.
- Dalam tataran nilai-nilai kepercayaan komunitas adat itulah pendidikan budi pekerti menjadi relevan bagi

‘pembentukkan’ karakter bangsa

- Budi pekerti merupakan pancaran dari adanya integrasi proses nilai dan penilaian yang tertanam pada setiap individu.
- Seperti ‘*Pikukuh Karuhun*’, yang menjadi pegangan hidup penduduk Desa Kanekes, yaitu:

KARAKTER BANGSA:

Manifestasi Nilai-nilai Kepercayaan

- Dalam konteks itu, nilai-nilai kepercayaan komunitas adat seperti yang tercemin pada '*pikukuh karuhun*' menjadi penting artinya dalam membina karakter bangsa melalui pendidikan budi pekerti.
- Penelusuran dan pengembangan nilai-nilai kepercayaan seperti itu sebagai modal pembangkit dan pembentuk pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa
- Definisi karakter dalam pengertian ini, adalah keseluruhan potensi dan keaktifan jiwa setiap individu yang menentukan kelakuan dengan lebih menekankan pada kemauan, perasaan, dan temperamen yang dikendalikan oleh kemampuan diri untuk selalu menilai diri dan menempatkan diri pada keseimbangan atau keselarasan sebagai personalisme atau kepribadian
- Karakter Bangsa, terkait langsung dengan kewujudan kesadaran setiap individu yang merupakan bagian dari bangsa
- Karakter bangsa serupa itu merupakan satu proses yang berlaku dalam konteks dua realitas sosial, yaitu: realitas pembentuk karakter oleh negara (ideologi negara), dan realitas yang diartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap individu

‘pembentukan’ karakter bangsa

- Budi pekerti merupakan pancaran dari adanya integrasi proses nilai dan penilaian yang tertanam pada setiap individu.
- Seperti ‘*Pikukuh Karuhun*’, yang menjadi pegangan hidup penduduk Desa Kanekes, yaitu:

KARAKTER BANGSA:

Manifestasi Nilai-nilai Kepercayaan

- Dalam konteks itu, nilai-nilai kepercayaan komunitas adat seperti yang tercemin pada '*pikukuh karuhun*' menjadi penting artinya dalam membina karakter bangsa melalui pendidikan budi pekerti.
- Penelusuran dan pengembangan nilai-nilai kepercayaan seperti itu sebagai modal pembangkit dan pembentuk pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa
- Definisi karakter dalam pengertian ini, adalah keseluruhan potensi dan keaktifan jiwa setiap individu yang menentukan kelakuan dengan lebih menekankan pada kemauan, perasaan, dan temperamen yang dikendalikan oleh kemampuan diri untuk selalu menilai diri dan menempatkan diri pada keseimbangan atau keselarasan sebagai personalisme atau kepribadian
- Karakter Bangsa, terkait langsung dengan kewujudan kesadaran setiap individu yang merupakan bagian dari bangsa
- Karakter bangsa serupa itu merupakan satu proses yang berlaku dalam konteks dua realitas sosial, yaitu: realitas pembentuk karakter oleh negara (ideologi negara), dan realitas yang diartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap individu

- Karakter bangsa, pada dasarnya dibentuk dalam konteks sejarah dan mempunyai daya tahan dalam jangkaun masa yang panjang untuk mencorakkan identitas bangsa yang keujudannya selalu diperjuangkan dan dipertahankan
- Karakter atau watak bangsa dalam pengertian itu, adalah kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan itikad yang kuat menuju tujuan yang dianggap bernilai oleh negara.
- Membentuk karakter bangsa dalam tataran kenegaraan menjadi penting, karena karakter sering dijadikan ukuran nilai seseorang dalam kehidupan bermasyarakat baik pada lingkup negara maupun antarnegara.
- Karakter bangsa menjadi wadah integrasi sosial melalui enkulturasi, sosialisasi dan internalisasi dalam proses menumbuhkan dan mengorganisasi nilai-nilai dan proses penilaian kepercayaan

Aktualisasi/Revitalisasi

- Dalam suasana egoisme dan individualisme yang mengarah kepada dis-organisasi atau kehilangan pegangan itulah pentingnya aktualisasi/ revitalisasi nilai-nilai kepercayaan
- Dalam tataran filsafati aktualisasi/revitalisasi nilai-nilai kepercayaan merupakan pancaran dari adanya integrasi proses nilai dan penilaian yang tertanam pada setiap individu yang meliputi tiga nilai utama,

yaitu: (1) ekspresif; (2) progresif, dan (3) integratif.

- Prakteknya ketiga nilai dan penilaian itu menjadi satu kesatuan untuk memahami realitas yang dihadapi oleh setiap individu dalam berbangsa dan bernegara.
- Untuk capaian itu, pendidikan budi pekerti menjadi penting untuk membentuk karakter bangsa

PENUTUP

- Tiadanya pendidikan budi pekerti sebagaimana ditumbuhkan oleh nilai-nilai kepercayaan dapat menyebabkan keruntuhan norma yang menjadi sumber pengaturan hidup
- Pewujudan nilai-nilai kepercayaan dalam pendidikan budi pekerti dapat menjadi faktor utama untuk pengekalan kesadaran akan identitas suatu bangsa dan negara yang berkarakter
- Etika dan nilai moral yang tumbuh dari kesadaran yang ditumbuhkan oleh nilai-nilai kepercayaan menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

**FOTO-FOTO DALAM GELAR
BUDAYA SPIRITUAL DAN
KEPERCAYAAN KOMUNITAS
ADAT**



Spanduk Gelar Budaya Spiritual, di depan Gedung Pameran



Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan pada acara pembukaan Gelar Budaya Spiritual



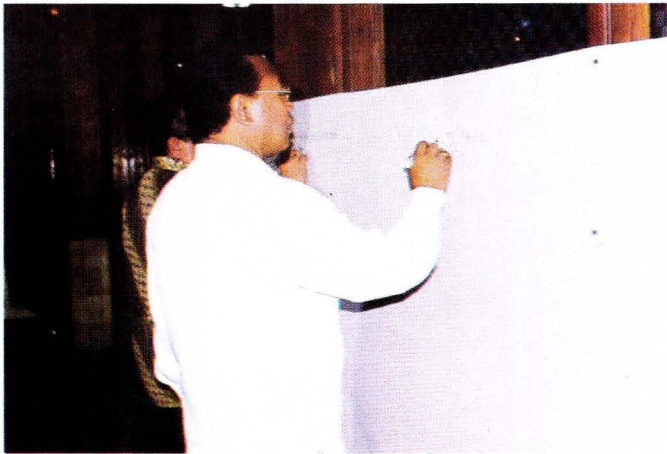
Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film sedang mengunjungi pameran didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan.



Suasana ramah tamah diantara Dirjen NBSF, Direktur Kepercayaan dan para pejabat lainnya setelah acara pembukaan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat.



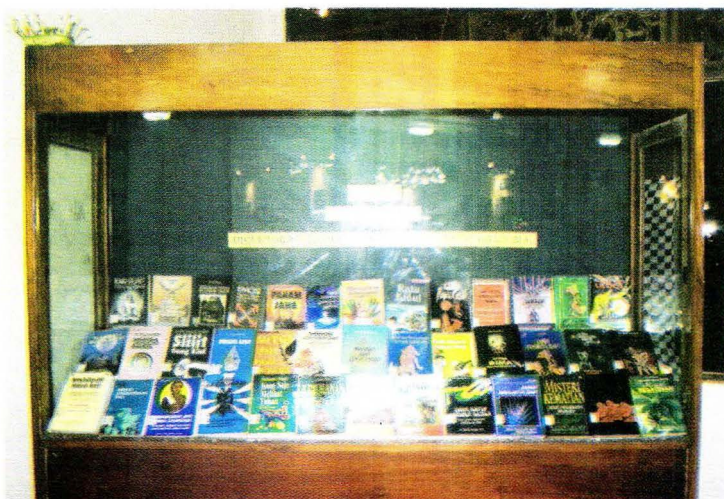
Para penari sedang menari dalam acara pembukaan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat.



Kepala Dinas Kebudayaan sedang menulis kesan dan pesan



Salah satu koleksi Foto



Salah satu koleksi pameran buku



Salah satu koleksi pameran buku



Pameran benda-benda pusaka



Seorang pengunjung sedang berdialog dengan peserta pameran “Uang Kepeng”.



Seorang pengunjung pameran sedang mengamati benda pusaka yang dipamerkan.



Para pengunjung sedang mengisi buku tamu.



Pengunjung pameran dari unsur pelajar mengamati benda pusaka yang dipamerkan.



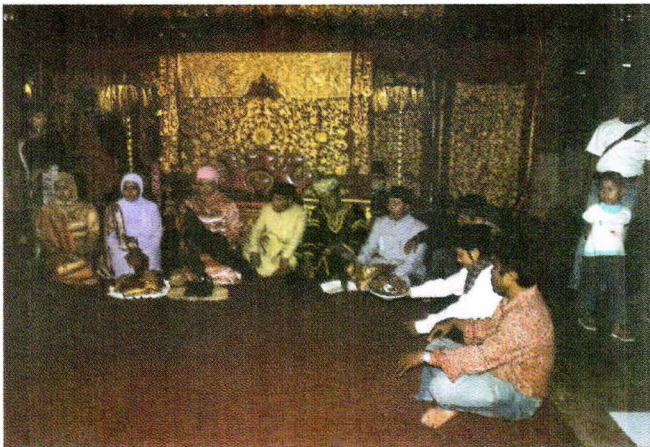
Pengunjung pameran dari unsur pelajar yang memakai pakaian adat setempat sedang mengamati foto-foto yang dipamerkan.



Pengunjung pameran dari unsur Pelajar dan Guru sedang mengamati foto-foto yang dipamerkan.



Peragaan upacara perkawinan adat Sunda.



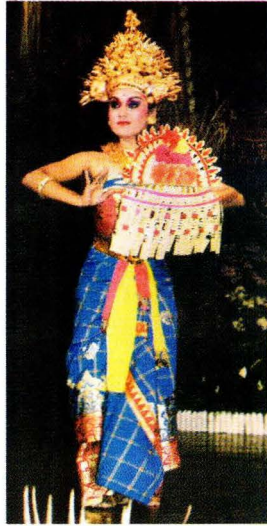
Acara upacara adat perkawinan Minangkabau.



Salah satu pemakalah sedang menyampaikan makalahnya.



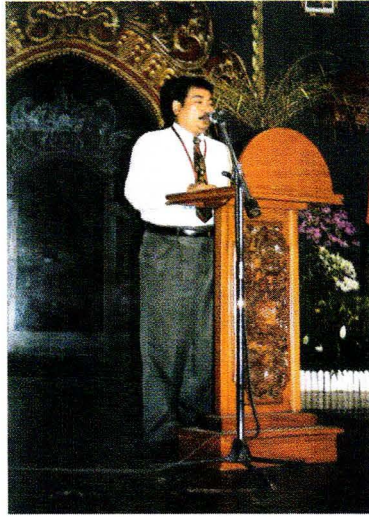
Dari kiri ke kanan; Drs. Lutfhi Asiarto (Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa), Drs. Nunus Suparadi (Mantan Staf Ahli Menteri), dan DR. IGN Anom (Mantan Dirjen Kebudayaan) menyimak Gelar Budaya Spiritual secara seksama.



Seorang penari sedang menampilkan tarian untuk meramaikan acara Gelar Budaya Spiritual.



Tim perumus sedang berdiskusi.



Ketua tim perumus sedang membacakan hasil rumusan.



Penyerahan hasil rumusan dari ketua Tim perumus kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME.



Sambutan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam acara penutupan Gelar Budaya Spiritual



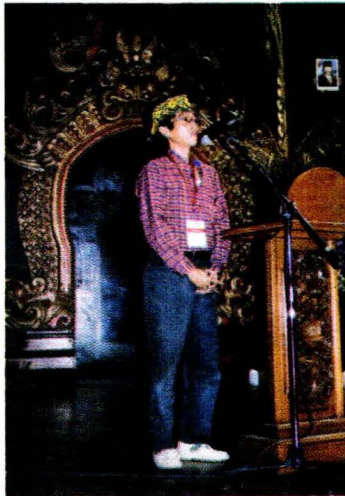
Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan pada acara penutupan Gelar Budaya Spiritual.



Bapak Bismar Siregar (Mantan Hakim Agung), Ibu Prof. DR. Edi Sedyawati (Mantan Dirjen Kebudayaan) sedang berdoa.



Pemukulan Gong oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam penutupan Gelar Budaya Spiritual.



Salah seorang peserta menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti Gelar Budaya Spiritual 2006.

PROSIDING CELAR BUDAYA SPIRITUAL DAN KEPERCA



Perpustakaan D
Jenderal Kebu

306.4
PRO

ISBN : 978-979-16071-2-4

AS ADAT